



BANDARA DJALALUDDIN
GORONTALO

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)

TAHUN 2025

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI GORONTALO





Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo tahun 2025 memuat informasi tugas dan fungsi serta hasil capaian kinerja selama tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja yang diamanahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo telah menetapkan tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun di dalam Renstra Tahun 2025 – 2029.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo tersebut maka dijabarkan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai dimana masing-masing sasaran strategis mempunyai indikator kinerja yang diukur setiap tahun untuk dievaluasi tingkat ketercapaiannya dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

LKIP Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo tahun 2025 merupakan laporan kinerja tahun pertama atas pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2025 - 2029. Dari hasil pengukuran capaian kinerja, Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo telah melaksanakan program dan kegiatan strategis tahun 2025 dengan sangat baik, dimana semua target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berhasil terealisasi 100%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan strategi tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo didukung anggaran sebesar **Rp. 22.442.704.353,-** yang kemudian mengalami perubahan anggaran sebesar **Rp. 26.974.432.353,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 22.334.525.713,-** atau **81.82 %**. Selain itu juga, terdapat dukungan sumber daya manusia sebanyak 80 orang pegawai yang terdiri atas 54 orang pegawai tetap dan 17 orang PPPK paruh waktu dan 9 orang pegawai *outsorching*.

Adapun uraian yang lebih terinci mengenai sasaran strategis, indikator kinerja, target dan realisasi indikator kinerja dapat dilihat pada Bab II dan Bab III LKIP Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo tahun 2025.



Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo ke depan, sebagai berikut:

1. Terdapat 6 Terminal Tipe B yang berada di Kab/Kota yang merupakan kewenangan Provinsi namun sampai tahun 2025 baru 1 Terminal Tipe B yang diserahkan ke Pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu Terminal Tipe B Limboto Kab Gorontalo.
2. Terdapat wilayah/daerah yang terisolir, sentra-sentra produksi dan objek wisata unggulan yang terlayani oleh angkutan umum dan belum masih kurangnya angkutan massal di perkotaan sehingga memerlukan adanya layanan angkutan yang lebih memadai.
3. Terdapat beberapa sekolah SMA/SMK yang belum/tidak dilayanani angkutan umum.
4. Minimnya sarana penunjang pelaksanaan pengawasan angkutan jalan.
5. Masih minimnya layanan digitalisasi perizinan dan pengawasan angkutan umum.
6. Terdapat beberapa ruas jalan Provinsi yang belum terpasang fasilitas keselamatan LLAJ.
7. Belum optimalnya layanan sistem ATCS pada simpang bersinyal.
8. Belum optimalnya sistem pelaporan aktivitas/produktivitas dari masing-masing UPT Kementerian Perhubungan RI kepada Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah.
9. Belum optimalnya layanan sistem pelaporan aktifitas Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan sesuai kewenangan Gubernur yang beraktifitas di Pelabuhan.
10. Dikawasan Timur Indonesia (Pulau Sulawesi) Embarkasi Haji hanya berada di Makassar sehingga mengalami penumpukan layanan haji yang berpusat di Makassar Sulawesi Selatan.
11. Terdapat beberapa badan usaha yang beraktifitas di Pelabuhan yang belum memiliki izin.



Kata Pengantar

Puji syukur hanya patut dihaturkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga penyusunan laporan kinerja ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 dan Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003, Peraturan Menteri dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 53 Tahun 2014 yang dilaksanakan pada akhir tahun pelaksanaan anggaran. Laporan ini merupakan sajian secara utuh tentang kegiatan yang telah dilaksanakan dan hasil yang dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Laporan ini ditujukan untuk memenuhi tugas dan fungsi serta kewenangan organisasi, seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo.

Dalam penyusunan laporan kinerja ini, Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik berkat dukungan dan kerjasama seluruh staf sehingga laporan ini dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Dengan adanya pengukuran kinerja kegiatan / program ini dapat menumbuhkan lebih baik lagi semangat motivasi dan semangat kerja sama semua staf dalam menjalankan dan mensukseskan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo.

Gorontalo, Maret 2026

Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Gorontalo



Putabone, ST, M.M
NIP. 197111205 200212 2 006



Daftar Isi

IKHTISAR EKSKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
D. Isu Strategis	4
E. Keadaan Pegawai.....	5
F. Sarana dan Prasarana.....	8
G. Keuangan	10
H. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. Rencana Strategis.....	13
1. Visi Dan Misi.....	13
2. Tujuan dan Sasaran.....	13
3. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	15
4. Sasaran Strategis	16
5. Sasaran dan Arah Kebijakan	18
6. Indikator Kinerja Utama (IKU)	19
7. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	22
8. Rencana Anggaran Tahun 2025	25
- Target Belanja Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo	26
- Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	26
8. Instrumen Pendukung.....	27



BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	43
A.	Capaian Kinerja Organisasi	43
1.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	44
2.	Kegiatan Lainnya	73
3.	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan beberapa Tahun yang lalu	82
4.	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	86
5.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional	91
6.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	95
7.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	107
8.	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan Ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kerja.....	109
9.	Realisasi Anggaran	112
10.	Penghargaan yang diterima	115
BAB IV	PENUTUP.....	117



Daftar Tabel

Tabel 1.1 Jumlah ASN berdasarkan Golongan	6
Tabel 1.2 Jumlah ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan	7
Tabel 1.3 Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo Tahun 2025	8
Tabel 2.1 Ringkasan Tujuan RPJMD Provinsi Gorontalo 2025-2029	14
Tabel 2.2 Tujuan Strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029	14
Tabel 2.3 Tujuan Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029	16
Tabel 2.4 Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029	17
Tabel 2.5 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029	18
Tabel 2.6 Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan RPD Tahun 2023 - 2026	20
Tabel 2.7 Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan RPJMD Tahun 2025 - 2029	21
Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo Tahun 2025	23
Tabel 2.9 Target Belanja Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo APBD Sebelum Perubahan Tahun 2025	26
Tabel 2.10 Target Belanja Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo APBD Perubahan Tahun 2025.....	26
Tabel 2.11 Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo	26
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	40
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2025.....	41
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Tujuan Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo Tahun 2025.....	42



Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo sesuai RPD tahun 2023 - 2026	43
Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo sesuai RPJMD tahun 2025 - 2029	52
Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 dengan beberapa tahun lalu	79
Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo Tahun 2025 dengan Tahun Lalu	80
Tabel 3.8 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo Tahun 2025 dengan Tahun Lalu	81
Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2025 dengan Target jangka Menengah dalam Dokumen RPJMD	84
Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2025 dengan Target jangka Menengah dalam Dokumen Renstra	84
Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2025 dengan Target jangka Menengah dalam Dokumen Renstra	86
Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2025 dengan Standar Nasional	88
Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2025 dengan Standar Nasional	89
Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2025 dengan Standar Nasional	90
Tabel 3.15 Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2025.....	110



Daftar Lampiran

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Lampiran 3 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Lampiran 4 Dokumen Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025



Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Provinsi Gorontalo merupakan pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 yang diresmikan pada tanggal 16 Februari 2001 oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. Bertitik tolak dari Undang-Undang tersebut maka Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan kebijakan pemerintahan telah membentuk Badan, Dinas, dan Biro yang mana didalamnya termasuk pembentukan Dinas Perhubungan, Postel, Pariwisata, dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo melalui Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang kemudian mengalami beberapa perubahan nomenklatur hingga pada tahun 2017 menjadi Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo sampai dengan sekarang.

Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo merupakan organisasi/perangkat daerah yang memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan tugas Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam bidang perhubungan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Gorontalo agar setara dengan pertumbuhan provinsi-provinsi lainnya di negara kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut maka Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo telah menyusun rencana strategis (Renstra) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo 2025 – 2029 yang menitikberatkan pada 5 (lima) program unggulan yaitu Mengoptimalkan Posisi Strategis Gorontalo Terhadap IKN Nusantara Untuk Akselerasi Pembangunan, Menstimulasi Program Kegiatan Yang Dapat Meningkatkan Pendapatan Masyarakat, Mewujudkan Infrastruktur dan Pelayanan Publik Yang Merata Dan Berkualitas, Menjadikan “Adat Bersendikan Syara, Syara Bersendikan Kitabullah” Sebagai Spirit Pembangunan Dan Kehidupan Masyarakat. Rencana strategis empat tahunan tersebut kemudian dijabarkan dalam rencana kerja (Renja) per tahun yang memuat rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun.



Untuk penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Perangkat Daerah, maka Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo menyusun satu laporan kinerja yang menyajikan secara utuh pertanggungjawaban atas kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025 dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo Tahun 2025 .

B. Struktur Organisasi

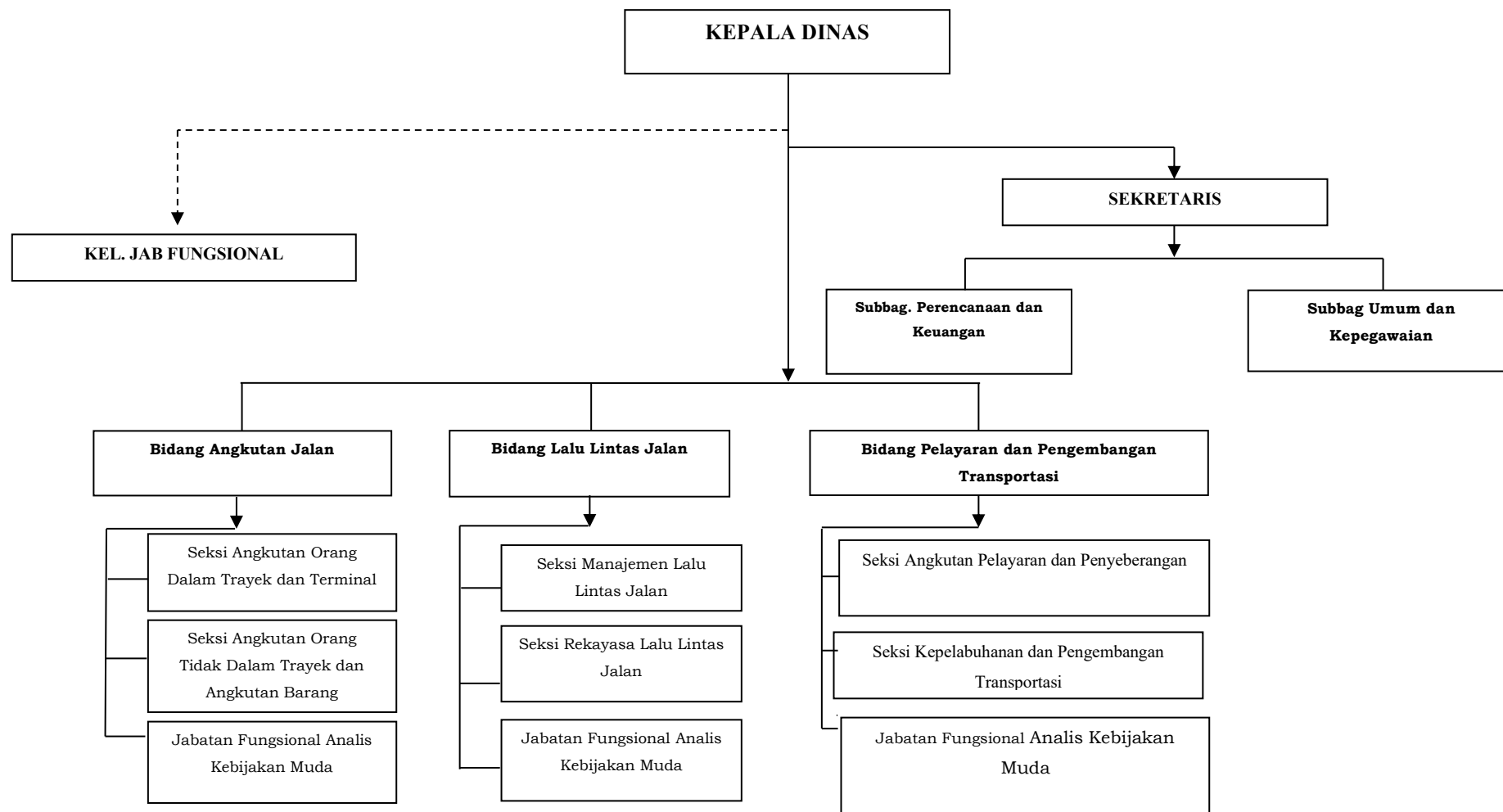
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:

- (1). Kepala Dinas
- (2). Sekretaris
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- (3). Kepala Bidang Angkutan Jalan
 - a. Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Terminal
 - b. Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek & Angkutan Barang
 - c. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda
- (4) Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan
 - a. Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan
 - b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan
 - c. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda
- (5) Kepala Bidang Pelayaran dan Pengembangan Transportasi
 - a. Seksi Angkutan Pelayaran dan Penyeberangan
 - b. Seksi Kepelabuhanan dan Pengembangan Transportasi
 - c. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda



Gambar 1.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo





C. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo sesuai Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja dan Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata kerja Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

- **Tugas**

Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka desentralisasi dan dekosentrasi dibidang perhubungan untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan.

- **Fungsi**

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, maka Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan dan pengelolaan keuangan, penyusunan rencana dan program di bidang perhubungan;
2. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan tugas di bidang perhubungan;
3. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan tata usaha dinas perhubungan;
4. Pelaksanaan tugas konsultasi dan koordinasi di bidang perhubungan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

D. Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan. eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, antara lain sebagai berikut:



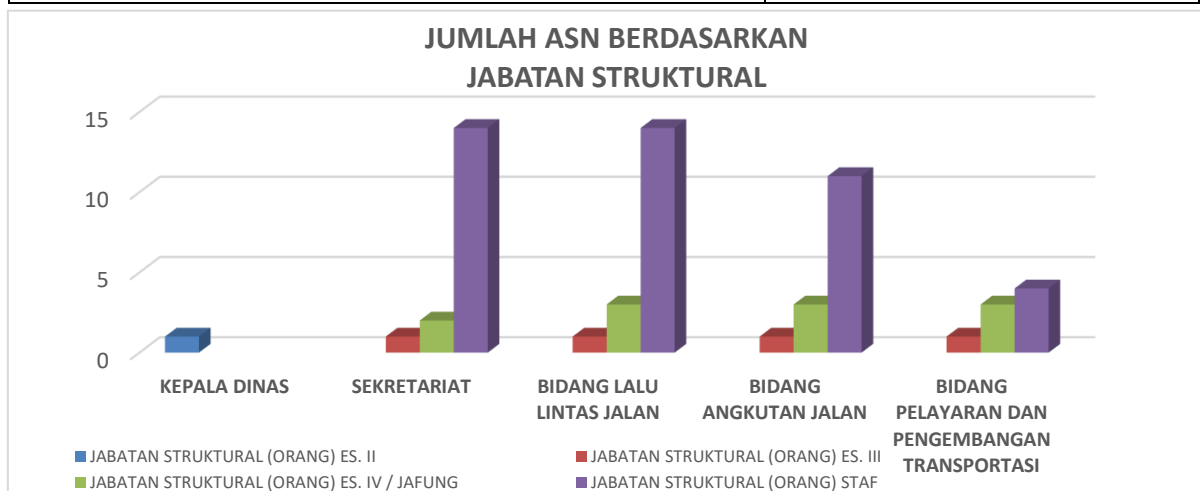
1. Terdapat 6 Terminal Tipe B yang berada di Kab/Kota yang merupakan kewenangan Provinsi namun sampai tahun 2025 baru 1 Terminal Tipe B yang diserahkan ke Pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu Terminal Tipe B Limboto Kab Gorontalo.
2. Terdapat wilayah/daerah yang terisolir, sentra-sentra produksi dan objek wisata unggulan yang terlayani oleh angkutan umum dan belum masih kurangnya angkutan massal di perkotaan sehingga memerlukan adanya layanan angkutan yang lebih memadai.
3. Terdapat beberapa sekolah SMA/SMK yang belum/tidak dilayanani angkutan umum.
4. Minimnya sarana penunjang pelaksanaan pengawasan angkutan jalan.
5. Masih minimnya layanan digitalisasi perizinan dan pengawasan angkutan umum.
6. Terdapat beberapa ruas jalan Provinsi yang belum terpasang fasilitas keselamatan LLAJ.
7. Belum optimalnya layanan sistem ATCS pada simpang bersinyal.
8. Belum optimalnya sistem pelaporan aktivitas/produktivitas dari masing-masing UPT Kementerian Perhubungan RI kepada Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah.
9. Belum optimalnya layanan sistem pelaporan aktifitas Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan sesuai kewenangan Gubernur yang beraktifitas di Pelabuhan.
10. Dikawasan Timur Indonesia (Pulau Sulawesi) embarkasi haji hanya berada di Makassar sehingga mengalami penumpukan layanan haji yang berpusat di Makassar Sulawesi Selatan.
11. Terdapat beberapa badan usaha yang beraktifitas di Pelabuhan yang belum memiliki izin.

E. Keadaan Pegawai

Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo sebagai salah satu organisasi publik lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya membutuhkan sumber daya yang dapat menggerakkan roda organisasi. Sumber daya (*resources*) yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD diidentifikasi sebagai berikut :



NO.	URAIAN	JABATAN STRUKTURAL (ORANG)			
		ES. II	ES. III	ES. IV / JAFUNG	STAF
1	KEPALA DINAS	1			
2	SEKRETARIAT		1	2	14
3	BIDANG LALU LINTAS JALAN		1	3	14
4	BIDANG ANGKUTAN JALAN		1	3	11
5	BIDANG PELAYARAN DAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI		1	3	4
JUMLAH		1	4	11	43
TOTAL		59			

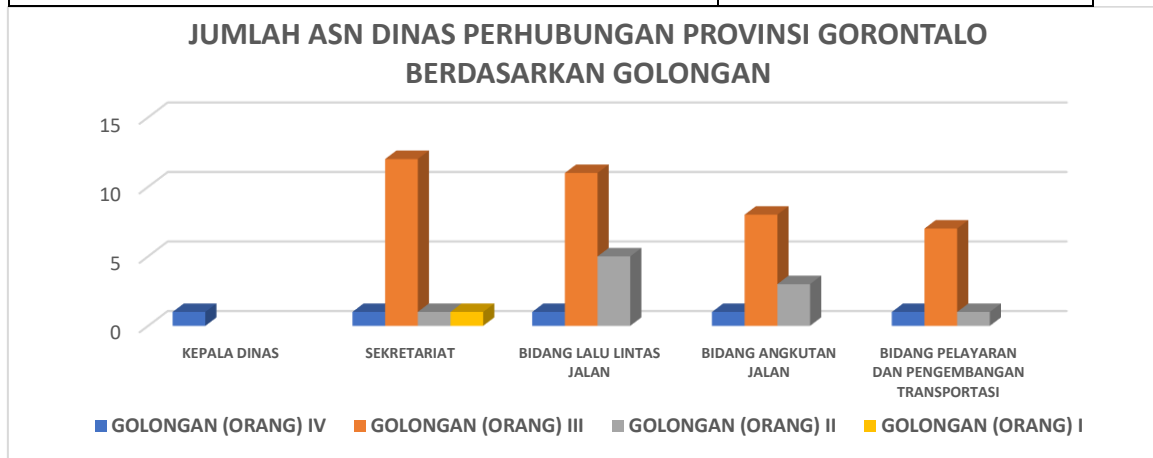


Tabel 1.1 Aparatur Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo berdasarkan Golongan

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sesuai Struktur Organisasi yang telah ditetapkan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo didukung dengan jumlah pegawai 80 orang (*Data pegawai per 31 Desember 2025*) yang terdiri dari 54 orang status ASN, 17 orang PPPK Paruh waktu dan 9 orang tenaga *Outsourcing* yang terdiri dari Pejabat Eselon II 1 orang, Pejabat Eselon III 4 orang, Pejabat Eselon IV 8 orang dan Jabatan Fungsional 3 orang serta Pelaksana 43 Orang serta 17 orang PPPK Paruh waktu dan 9 orang tenaga *Outsourcing*.



NO	URAIAN	GOLONGAN (ORANG)			
		IV	III	II	I
1	KEPALA DINAS	1	-	-	-
2	SEKRETARIAT	1	12	4	-
3	BIDANG LALU LINTAS JALAN	1	11	6	-
4	BIDANG ANGKUTAN JALAN	1	11	3	-
5	BIDANG PELAYARAN, PENERBANGAN DAN PERKERETAAPIAN	1	6	1	-
JUMLAH		5	40	14	
TOTAL		59			



Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, 2025

Berdasarkan tabel diatas Pegawai di Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo berdasarkan golongan terbagi atas 4 golongan yaitu Golongan IV sebanyak 5 Orang, Golongan III sebanyak 40 Orang dan Golongan II sebanyak 14 Orang. Untuk Golongan I sudah tidak ada pegawai pada Golongan I.

Tabel 1.2 Jumlah ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	URAIAN	PENDIDIKAN (ORANG)					
		S3	S2	S1	DIII	SMU	SMP
1	KEPALA DINAS	1	-	-	-	-	-
2	SEKRETARIAT	-	-	12	1	4	-
3	BIDANG LALU LINTAS JALAN	-	-	8	6	4	-
4	BIDANG ANGKUTAN JALAN	-	1	9	2	3	-
5	BIDANG PELAYARAN DAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI	-	1	4	2	1	-
JUMLAH		1	2	33	11	12	-
TOTAL		59					

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, 2025



Berdasarkan tabel diatas Pegawai di Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo berdasarkan tingkat Pendidikan yaitu Pendidikan S3 sebanyak 1 orang yaitu Bapak Kepala Dinas, Pendidikan S2 sebanyak 2 Orang, Pendidikan S1 sebanyak 33 Orang dan Pendidikan SMU sebanyak 12 Orang.

F. Sarana dan Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja.

Saat ini aset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3 Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo Tahun 2025

NO	NAMA	JUMLAH	KONDISI			KETERANGAN
			RB	RR	B	
A	TANAH (KIB A)					
	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan	1	-	-	1	
B	PERALATAN MESIN (KIB B)					
1	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor					
	Mobil	7 Unit	-	1	6	
	Bus	11 Unit	-	-	11	
	Motor	11 Unit	-	-	11	
	Rotator	2 Unit	1	-	1	
2	Alat-alat Ukur					
	Timbangan	2 Unit	1	-	1	
	Digital Soil Thermometer	1 unit	-	-	1	
3	Peralatan Kantor					
	Mesin Facsimile	2 Unit	-	-	2	
	Mesin Ketik Elektronik	2 Unit	2	-	-	
	Mesin Penghitung Uang	1 Unit	-	-	1	
	Mesin Absensi	1 Unit	-	-	1	



NO	NAMA	JUMLAH	KONDISI			KETERANGAN
			RB	RR	B	
	Finger Print dan Anjungan Absensi	1 Unit	1	-	-	
4	Perlengkapan Kantor					
	Rak Kayu	3 Unit	-	-	3	
	Lemari Besi	3 Unit	-	-	3	
	Lemari Arsip	5 Unit	-	-	5	
	Brankas	1 buah	-	-	1	
	AC	16 unit	1	-	15	
	Scanner	2 Unit	1	-	1	
5	Komputer					
	Komputer/PC	12 Unit	-	2	10	
	Laptop/Notebook	15 Unit	-	3	12	
	Hardisk	1	-	-	1	
	Printer	20 Unit	1	-	19	
	Komputer Unit/Server	1 Unit	-	-	1	
	Komputer Unit Lainnya (UPS)	7 Unit	-	2	5	
6	Meubelair					
	Meja Kerja	39 Buah	-	-	39	
	Meja Rapat	13 Buah	4	-	9	
	Meja Panjang	3 Buah	-	-	3	
	Kursi Kerja	34 Buah	-	-	34	
	Kursi Tunggu	2 Buah	-	-	2	
	Kursi Sofa	5 set	-	-	5	
	Kursi Rapat	25 Buah	-	-	25	
7	Alat-alat Studio					
	Kamera Digital	2 Buah	-	-	2	
	Amplifiler	1 Buah	-	-	1	
	Proyektor/LCD	2 Unit	1	-	1	
	Sound System	3 Buah	-	-	3	
8	Alat-Alat Komunikasi					
	Telepon	4 Buah	4	-	-	
	TV	3 Buah	-	-	3	
	Microphone	10 Buah	2	-	8	
	Handy Talky (HT)	75 Buah	9	-	66	
	CCTV	1 Buah	1	-	-	
	Audio Adress	12 Buah	12	-	-	
C	GEDUNG DAN BANGUNAN (KIB C)					
	Bangunan Gedung Kantor	2 unit	-	-	2	
	Bangunan Gudang	1 unit	-	-	1	



NO	NAMA	JUMLAH	KONDISI			KETERANGAN
			RB	RR	B	
	Bangunan Gedung Pertokoan	2 unit	2	-	-	
	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	1 unit	-	-	1	
	Bangunan Gedung Garasi/Pool	2 unit	-	-	2	
	Bangunan Gedung Terminal	1 unit	1	-	-	
	Bangunan Fasilitas Umum	5 unit	2	-	3	
	Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	3 Paket	-	-	3	
	Taman	2 unit	1	-	1	
D	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN (KIB D)					
	Jalan Provinsi Lain-lain	4 Paket	-	-	4	
	Jalan Khusus	1 Paket	-	-	1	
	Bangunan Penguat tebing/pantai	1 paket			1	
	Jaringan Transmisi (Genset)	1 unit	-	-	1	
	Jaringan Listrik Lainnya	5 unit	-	-	5	
	Jalan Telepon (Tower telekomunikasi) Pelabuhan Anggrek	1 Paket	-	-	-	Sudah tidak ditemukan
	Instalasi Air Bersih	2 Paket	-	-	2	
	Instalasi Listrik	3 Paket	-	-	3	

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

G. Keuangan

Faktor lain yang sangat menentukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sumber daya keuangan. Sumber Daya Anggaran digunakan sesuai rencana dan prioritas program dengan menganut proporsi belanja yang mengutamakan kepentingan publik. Anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo yang selama tahun 2025 mendapatkan alokasi anggaran sebesar sebesar **Rp. 22.442.704.353,-** yang kemudian mengalami perubahan anggaran sebesar **Rp. 26.974.432.353,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 22.334.525.713,-** atau **81.82 %**. Terdapat kegiatan pembebasan lahan Bandara Djalaluddin sebesar Rp. 4.000.000.000 yang tidak dapat dilaksanakan



karena ketidaksesuaian nomenklatur dan dianggarkan kembali pada tahun 2026. Dan kemudian sub kegiatan tersebut diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung yang didukung oleh 3 program dan 11 Kegiatan dan 14 sub kegiatan.

H. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Bab I (PENDAHULUAN)

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LAKIP/manfaat LAKIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LAKIP.

Bab II (PERENCANAAN)

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

Bab III (AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN)

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis



perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

Bab IV (PENUTUP)

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN



Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk mewujudkan tujuan organisasi. Dengan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara terarah serta dapat mengakomodir dan mengantisipasi perubahan yang terjadi pada lingkungan internal maupun eksternal.

RPJMD Pemerintah Provinsi Gorontalo merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan pemerintahan selama lima tahun, sesuai Peraturan Gubernur Nomor 3 tahun 2025 tentang RPJMD tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo tahun 2025 – 2029 merupakan implementasi dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2025 - 2029. Dalam Renstra dijabarkan potret dan rencana pembangunan yang memuat tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan selama 5 tahun ke depan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo sesuai dengan RPJMD 2025 – 2029 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tujuan dan Sasaran

- Tujuan

Tujuan Pembangunan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo dalam kurun waktu 2025 – 2029 adalah :

Peningkatan Ekonomi yang Berkelanjutan

- Sasaran

Sasaran Pembangunan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo dalam kurun waktu 2025 – 2029 adalah :

Terwujudnya Pengembangan Wilayah dan Konektivitas Perkotaan dan Pedesaan.



Selanjutnya tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alur cascade RPJMD Provinsi Gorontalo 2025-2029 sebagai berikut,

Tabel 2.1 Ringkasan Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Gorontalo 2025-2029

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Ekonomi yang berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	Terwujudnya Pengembangan Wilayah dan Konektivitas Perkotaan dan Pedesaan	Proporsi kontribusi PDRB Provinsi Gorontalo terhadap Nasional

Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo mendukung sasaran RPJMD yaitu Peningkatan Ekonomi yang berkelanjutan dengan indikator Tujuan RPJMD adalah Pertumbuhan Ekonomi yang mempunyai sasaran yaitu Terwujudnya Pengembangan Wilayah dan Konektivitas Perkotaan dan Pedesaan dengan indikator sasaran Proporsi kontribusi PDRB Provinsi Gorontalo terhadap Nasional yang merupakan dasar pengambilan arah dan kebijakan di Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo.

Lebih lanjut untuk mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Gorontalo maka yang menjadi tujuan strategis pemerintah Provinsi Gorontalo di bidang Perhubungan tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2 Tujuan Strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Base line 2024	Target Tahunan					Target Akhir RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	
1	Peningkatan Ekonomi yang berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	%	4.13	5.54	5.65	5.74	5.80	5.86	5.92



Tujuan strategis Peningkatan Ekonomi yang berkelanjutan indikator kinerjanya Pertumbuhan ekonomi target tahunan dari 2025 sampai 2029 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu pada tahun 2025 sebesar 5.54, pada tahun 2026 di angka 5.65, tahun 2027 di angka 5.74, pada tahun 2028 diangka 5.80 dan di tahun 2029 sebesar 5.86 hingga berada target akhir RPJMD sebesar 5.92. Peningkatan target pertumbuhan ekonomi tersebut menggambarkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah, kelancaran mobilitas orang dan barang, serta penguatan sektor-sektor produktif daerah. Dalam hal ini, peran sektor transportasi menjadi sangat strategis dalam mendukung distribusi logistik, memperlancar arus perdagangan, serta membuka akses terhadap pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Gorontalo. Oleh karenanya berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi, keselamatan lalu lintas, serta ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai, sehingga dapat berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi daerah.

Berangkat dari tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo berupaya mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah yaitu Terwujudnya Pengembangan Wilayah dan Konektivitas Perkotaan dan Pedesaan dengan indikator sasaran Proporsi kontribusi PDRB Provinsi Gorontalo terhadap Nasional.

3. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo selama 5 tahun anggaran adalah mewujudkan Perhubungan Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Tujuan Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo Tahun 2025 - 2029**

No	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Base line 2024	Target Tahunan					Target Akhir Renstra
					2025	2026	2027	2028	2029	
1	Terwujudnya Pengembangan Wilayah dan Konektivitas Perkotaan dan Pedesaan	Proporsi kontribusi PDRB Provinsi Gorontalo terhadap Nasional	%	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24

Tujuan strategis Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo yaitu Terwujudnya pengembangan wilayah dan konektivitas perkotaan dan pedesaan dengan indikator Proporsi kontribusi PDRB Provinsi Gorontalo terhadap Nasional dengan target dari tahun 2025 sebesar 0.25 % sampai tahun 2027 masih 0.25 dan ditahun 2028 sampai tahun 2029 turun menjadi 0.24 %. Stabilitas target tersebut menunjukkan upaya Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mempertahankan kontribusi perekonomian daerah terhadap perekonomian nasional melalui peningkatan konektivitas antar wilayah, baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan. Konektivitas transportasi yang baik diharapkan mampu mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta membuka akses wilayah-wilayah yang memiliki potensi ekonomi untuk berkembang.

4. Sasaran Strategis

Sehubungan dengan berakhirnya periode RPD sebelumnya maka sasaran strategis dalam RPD 2023 – 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Base line 2023	Target Tahunan				Target Akhir Renstra
					2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Wilayah	Rasio Konektivitas Transportasi Darat	Rasio	Rasio 0.54	Rasio 0.54	Rasio 0.54	Rasio 0.54	Rasio 0.54	Rasio 0.54
		Rasio Konektivitas Transportasi Aglomerasi Perkotaan (BRT)	Rasio	Rasio 0.33	Rasio 0.33	Rasio 0.33	Rasio 0.33	Rasio 0.33	Rasio 0.33
		Rasio dukungan Konektivitas Transportasi	Rasio	Rasio 0.66	Rasio 0.66	Rasio 0.66	Rasio 0.80	Rasio 0.66	Rasio 0.66



		Laut dan Udara							
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	On-Time Performance (OTP) Transportasi Aglomerasi Perkotaan (BRT)	Persentase	70 %	70 %	70 %	80 %	80 %	80 %
3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) per 1000 keberangkatan	Rasio	0 (Zero Accident)	0 (Zero Accident)	0 (Zero Accident)	0 (Zero Accident)	0 (Zero Accident)	0 (Zero Accident)
		Persentase Perlengkapan Jalan yang terpasang di ruas jalan Provinsi	Persentase	48.27 %	48.27 %	48.27 %	48.59 %	48.59 %	48.59 %

Kemudian Berdasarkan pada tujuan strategis yang telah ditetapkan maka sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun berdasarkan RPJMD 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Base line 2024	Target Tahunan					Target Akhir Renstra
					2025	2026	2027	2028	2029	
1	Meningkatnya Kualitas Transportasi Darat	Konektivitas Darat	Rasio	0.50	0.50	0.50	0.50	0.52	0.52	0.52
		Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Provinsi	%	48.59	48.59	48.92	49.21	49.67	50.10	50.10
		Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan	Perusahaan	2	2	3	3	3	3	3



2	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut	Rasio Konektivitas Laut	Rasio	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
		Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
		Persentase Pelayanan Jasa terkait Angkutan di Perairan	Persentase	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %	50 %	50 %

5. Sasaran dan Arah Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Transportasi Darat	1. Peningkatan Penyelenggaraan angkutan jalan serta Penyediaan fasilitas terminal tipe B 2. Peningkatan Layanan Perizinan dan Pengendalian Layanan Angkutan Umum 3. Penguatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelayaran dan Penerbangan	1. Pengembangan pelayanan keperintisan, daerah terisolir, sentra-sentra produksi dan objek wisata unggulan 2. Layanan Transportasi Sekolah 3. Layanan angkutan perkotaan (BRT) 4. Penyediaan fasilitas dan operasional terminal tipe B
		1. Peningkatan Layanan Perizinan dan Pengendalian Layanan Angkutan Umum	1. Pembinaan jasa angkutan dan keselamatan transportasi 2. Transformasi Layanan Digital Angkutan



		1. Peningkatan Layanan angkutan perkotaan (BRT)	1. Layanan angkutan perkotaan (BRT)
		1. Peningkatan penyediaan Perlengkapan prasarana jalan diruas jalan provinsi 2. Manajemen rekayasa lalu lintas	1. Peningkatan fasilitas keselamatan LLAJ 2. Penataan Manajemen Rekayasa lalu lintas 3. Peningkatan Koordinasi Penyelenggara LLAJ 4. Peningkatan Pengawasan Andalalin
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut	1. Penguatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelayaran dan Penerbangan	1. Koordinasi penyelenggaraan pelayaran dan penerbangan
		1. Peningkatan layanan perizinan dan pengendalian usaha jasa terkait di perairan	1. Pembinaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa terkait Angkutan di Perairan

6. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi secara terukur dan objektif. IKU disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan strategis serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah, sehingga mampu menggambarkan kinerja utama perangkat daerah secara tepat. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo berdasarkan RPD tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut :



Tabel 2.6 Tabel Indikator Kinerja Utama berdasarkan RPD Tahun 2023-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULA PERHITUNGAN
1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Wilayah	Rasio Konektivitas Transportasi Darat	Perbandingan antara Jumlah Kawasan Prioritas Layanan Angkutan (Perintis, Sekolah dan Wisata) yang telah dilayani dibagi dengan Jumlah Kawasan Prioritas Layanan Angkutan (Perintis, Sekolah dan Wisata) yang telah ditetapkan
		Rasio Konektivitas Transportasi Aglomerasi Perkotaan (BRT)	Perbandingan antara Jumlah Kawasan Perkotaan yang telah dilayani angkutan Perkotaan dibagi dengan Jumlah Kawasan Perkotaan Prioritas yang telah ditetapkan
		Rasio dukungan Konektivitas Transportasi Laut dan Udara	Perbandingan antara jumlah perusahaan jasa terkait angkutan di perairan dan keudaraan yang aktif beroperasi di Pelabuhan dan Bandara dibagi dengan Jumlah Perusahaan jasa terkait angkutan di perairan dan keudaraan yang telah memperoleh izin
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	On-Time Performance (OTP) Transportasi Aglomerasi Perkotaan (BRT)	Perbandingan antara jumlah pelayanan RIT tepat waktu dibagi dengan jumlah pelayanan RIT tepat waktu dalam 1 tahun
3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) per 1000 keberangkatan	Perbandingan antara Jumlah kejadian Kecelakaan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) dibagi dengan Jumlah Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) per 1000 keberangkatan
		Persentase Perlengkapan Jalan yang terpasang di ruas jalan Provinsi	Perbandingan antara Jumlah Perlengkapan jalan yang terpasang pada tahun (n) dibagi dengan Jumlah Kebutuhan total perlengkapan jalan di ruas jalan Provinsi
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP	A
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat mengacu pada Permenpan RB No 14 Tahun 2017

Sebagai bagian dari masa transisi perencanaan, setelah penguraian IKU Tahun 2023–2026 berdasarkan RPD dan dengan memperhatikan perkembangan kebijakan pembangunan daerah serta hasil evaluasi capaian kinerja sebelumnya, berikut disajikan



Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025–2029 yang disusun mengacu pada RPJMD terba guna menjamin kesinambungan dan peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Tabel 2.7 Tabel Indikator Kinerja Utama berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULA PERHITUNGAN	METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Rasio Konektivitas Darat	$\frac{\text{Jumlah Kawasan Prioritas Layanan Angkutan (Perintis, BRT, Wisata dan Sekolah) yang telah dilayani}}{\text{Jumlah Kawasan Prioritas Layanan Angkutan (Perintis, BRT, Wisata dan Sekolah) yang telah ditetapkan}} \times 100 \%$	Perbandingan antara Jumlah Kawasan Prioritas Layanan Angkutan (Perintis, BRT, Wisata dan Sekolah) yang telah dilayani dibagi dengan Jumlah Kawasan Prioritas Layanan Angkutan (Perintis, BRT, Wisata dan Sekolah) yang telah ditetapkan yang didapatkan dari data laporan bulanan layanan angkutan Perintis, BRT, Wisata dan Sekolah. Data kinerja diperoleh dari Laporan Realisasi Program Kegiatan Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo
		Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Provinsi	$\frac{\text{Jumlah Perlengkapan jalan yang terpasang pada tahun (n)}}{\text{Jumlah Kebutuhan total perlengkapan jalan di ruas jalan Provinsi}} \times 100 \%$	Perbandingan antara Jumlah Perlengkapan jalan yang terpasang pada tahun (n) dibagi dengan Jumlah Kebutuhan total perlengkapan jalan di ruas jalan Provinsi. Data kinerja diperoleh dari Laporan Realisasi Program Kegiatan Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo.
		Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan	Perusahaan angkutan umum yang telah memperoleh sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) dari instansi berwenang dan sertifikat tersebut masih berlaku pada tahun berjalan	Perusahaan angkutan umum dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum yang telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) dan mendapatkan sertifikat resmi dari instansi yang berwenang dan Perusahaan angkutan umum tersebut yang terdaftar dan beroperasi di wilayah Provinsi Gorontalo. Data kinerja diperoleh dari Laporan Realisasi Program Kegiatan Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo.
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut	Rasio Konektivitas Laut	$\frac{\text{Dukungan untuk konektivitas Sarana dan Prasarana Pelabuhan dan Bandara tahun berjalan yang dikelola oleh pusat (Kementerian Perhubungan)}}{\text{Dukungan untuk konektivitas Sarana dan Prasarana Pelabuhan dan Bandara tahun sebelumnya}} \times 100 \%$	Perbandingan antara Dukungan untuk konektivitas Sarana dan Prasarana Pelabuhan dan Bandara. tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Data kinerja diperoleh dari Laporan Realisasi Program Kegiatan Bidang Pelayaran dan Pengembangan



			Dukungan untuk konektivitas Sarana dan Prasarana Pelabuhan dan Bandara tahun sebelumnya	Transportasi Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo dan Kementerian Perhubungan RI.
	Rasio Konektivitas Antar Wilayah		Dukungan untuk kelancaran Produktivitas Penumpang dan Barang di Pelabuhan dan Bandara tahun berjalan yang dikelola pusat (Kementerian Perhubungan)	Perbandingan antara Dukungan untuk Kelancaran Produktivitas Penumpang dan Barang tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Data kinerja diperoleh dari Laporan Realisasi Program Kegiatan Bidang Pelayaran dan Pengembangan Transportasi Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo dan Kementerian Perhubungan RI.
			Dukungan untuk kelancaran Produktivitas Penumpang dan Barang di Pelabuhan dan Bandara tahun sebelumnya	
	Persentase Pelayanan Jasa terkait Angkutan di Perairan		Jumlah perusahaan jasa terkait angkutan di perairan dan keudaraan yang aktif beroperasi di Pelabuhan dan Bandara	Perbandingan antara jumlah perusahaan jasa terkait angkutan di perairan dan keudaraan yang aktif beroperasi di Pelabuhan dan Bandara dibagi dengan Jumlah Perusahaan jasa terkait angkutan di perairan dan keudaraan yang telah memperoleh izin. Data kinerja diperoleh dari Laporan Realisasi Program Kegiatan Bidang Pelayaran dan Pengembangan Transportasi Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo.
			Jumlah Perusahaan jasa terkait angkutan di perairan dan keudaraan yang telah memperoleh izin	

6. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Berikut Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo Tahun 2024 berdasarkan RPD tahun 2023 – 2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan RPJMD 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo berdasarkan RPD tahun 2023 - 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Wilayah	Rasio Konektivitas Transportasi Darat	Rasio	0.54	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0.54
		Rasio Konektivitas Transportasi Aglomerasi Perkotaan (BRT)	Rasio	0.33		0.33
		Rasio dukungan Konektivitas Transportasi Laut dan Udara	Rasio	0.66		0.66
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	On-Time Performance (OTP) Transportasi Aglomerasi Perkotaan (BRT)	Persentase	70 %	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	70 %
3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) per 1000 keberangkatan	Rasio	0 (Zero Accident)	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0 (Zero Accident)
		Persentase Perlengkapan Jalan yang terpasang di ruas jalan Provinsi	Persentase	48.27		48.27
4	Meningkatnya kualitas dan Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP	A	A	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	A
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Persentase	80 %		80 %



Tabel 2.9 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo berdasarkan RPJMD tahun 2025 - 2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Transportasi Darat	Konektivitas Darat	Rasio	0.50	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0.50
		Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Provinsi	Persentase	48.59		48.59
		Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan	Perusahaan	2		2
2	Meningkatnya Kualitas Transportasi Laut	Rasio Konektivitas Laut	Persentase	70 %	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	70 %
		Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0.50		0.50
		Persentase Pelayanan Jasa terkait Angkutan di Perairan	Persentase	40		40



**FOTO PENANDATANGAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI GORONTALO**

7. Rencana Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni yang bersumber dari APBD sebesar 2025 mendapatkan alokasi anggaran sebesar sebesar **Rp. 22.442.704.353,-** yang kemudian mengalami perubahan anggaran sebesar **Rp. 26.974.432.353,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 22.334.525.713,-** atau **81.82 %**. dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 16.618.296.553,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 10.356.135.800,-



Target Belanja Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo

Di dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo menetapkan target belanja setelah perubahan sebesar Rp. 26.974.432.353,- dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 16.618.296.553,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 10.356.135.800,-

Tabel 2.10 Target Belanja Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo APBD Sebelum Perubahan Tahun 2025

No	Uraian	Target	Persentase
1	Belanja Operasi	Rp. 12.278.296.553,-	46.11 %
2	Belanja Modal	Rp. 10.506.135.800,-	53.89 %
	Jumlah	Rp. 22.784.432.353,-	100,00 %

Tabel 2.11 Target Belanja Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo APBD Perubahan Tahun 2025

No	Uraian	Target	Persentase
1	Belanja Operasi	Rp. 16.618.296.553,-	61.60 %
2	Belanja Modal	Rp. 10.356.135.800,-	38.40 %
	Jumlah	Rp. 26.974.432.353,-	100,00 %

Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2025 Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12 Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Persentase	Keterangan
1	Terwujudnya Pengembangan Wilayah dan Konektivitas Perkotaan dan Pedesaan			
	Dari Dana APBD	26.974.432.353,-	100,00	
	Jumlah	26.974.432.353	100,00	

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, 2025



8. Instrumen Pendukung

Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peran transportasi sebagai urat nadi kehidupan politik, ekonomi, social budaya, dan pertahanan keamanan. Oleh karena itu, pengembangan transportasi sangat penting artinya dalam menunjang dan menggerakkan dinamika pembangunan, karena transportasi berfungsi sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo Tahun 2025, digunakan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dalam pembangunan daerah dengan membangun beberapa sistem informasi.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Provinsi Gorontalo. Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo selalu berbenah untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya.

Dalam konteks pengembangan informasi tersebut Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo membangun beberapa sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja baik dalam hal meningkatkan kapasitas sebagai pelaksana pembangunan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai salah satu bentuk layanan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo membangun beberapa sistem informasi.

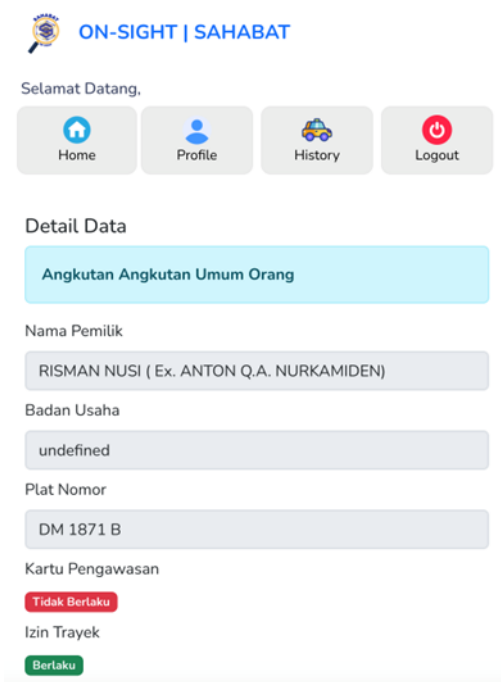
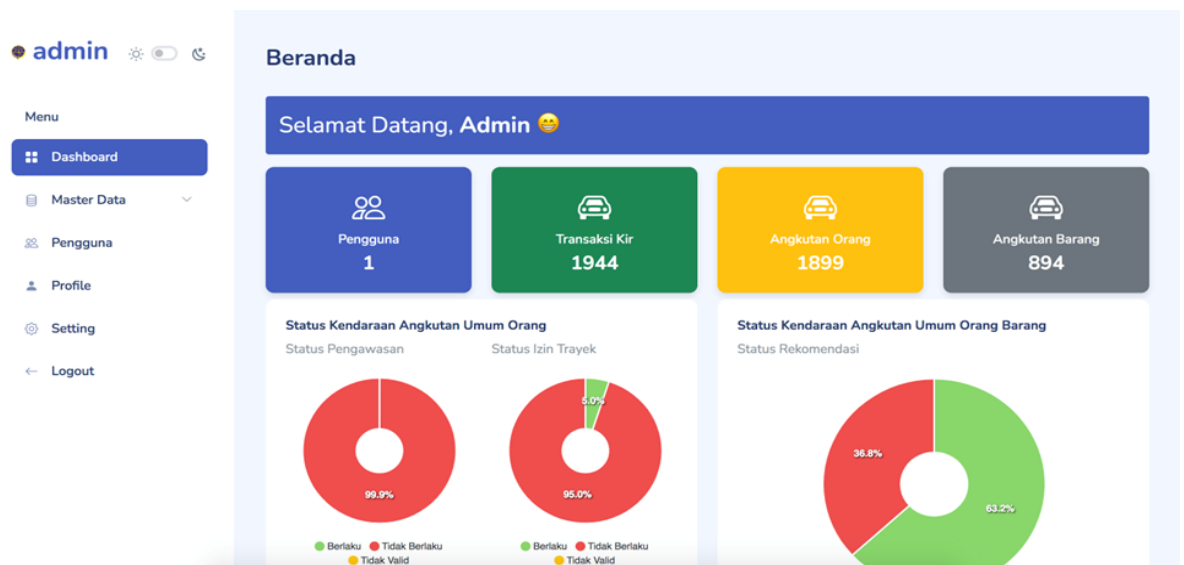
1. Aplikasi SAHABAT (Satu Hari Beres Angkutan Tertib)

SAHABAT “On-Sight” merupakan Pengembangan Aplikasi SAHABAT (Satu Hati Bangun Transportasi) melalui Pengawasan dari kamera/smartphone untuk mendata status perizinan angkutan yang ada di Provinsi Gorontalo dengan mengambil gambar plat nomor kendaraan. Untuk mendeteksi peizinan kendaraan



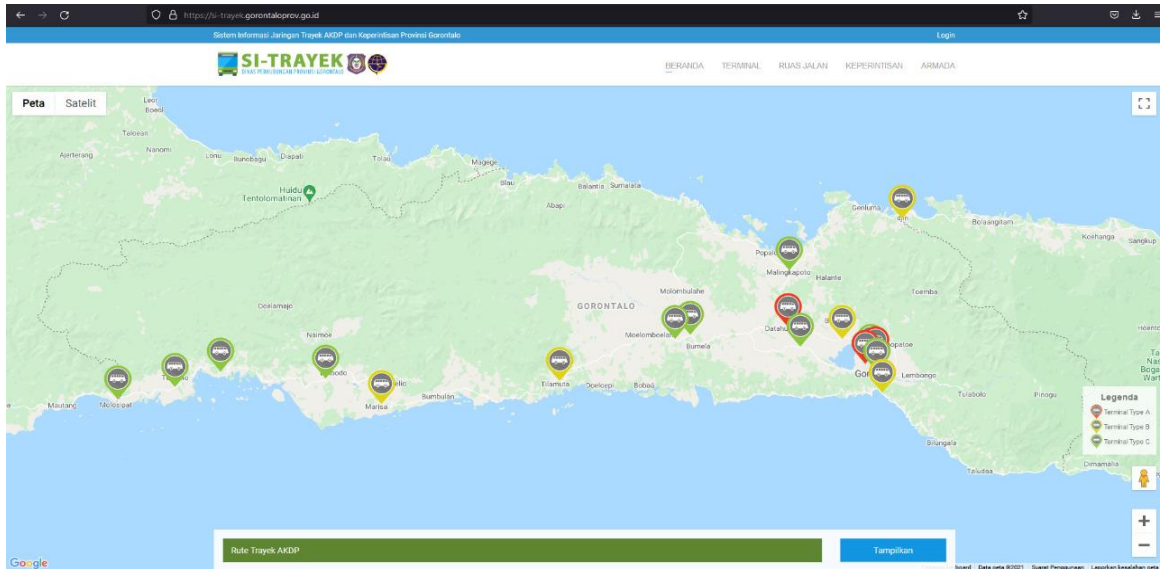
yang berizin, atau tidak berizin, sehingga optimalnya pelaksanaan kegiatan pengawasan, pembinaan dan penertiban yang dapat menciptakan efektivitas dalam pendataan perizinan.

Dari sisi Pelaporan/Pengaduan SAHABAT “On -Sight” dirancang untuk mempermudah Pengusaha Angkutan dalam mengajukan pengaduan terkait layanan perizinan angkutan umum. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan responsivitas dalam proses pengaduan. Masyarakat.



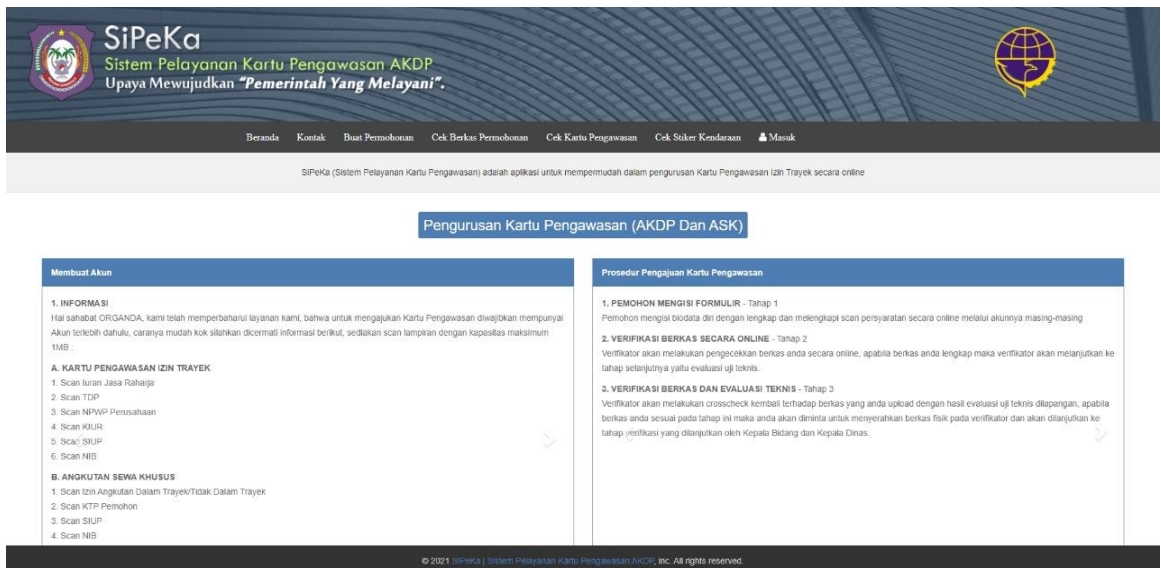


Aplikasi Penyedia Informasi Ketersediaan Jaringan Trayek AKDP Provinsi Gorontalo. Aplikasi tersebut untuk memudahkan para pemilik kendaraan pada pengurusan izin trayek AKDP.



3. Aplikasi Sipeka

Aplikasi Pelayanan Pengurusan Kartu Pengawasan Angkutan Umum.





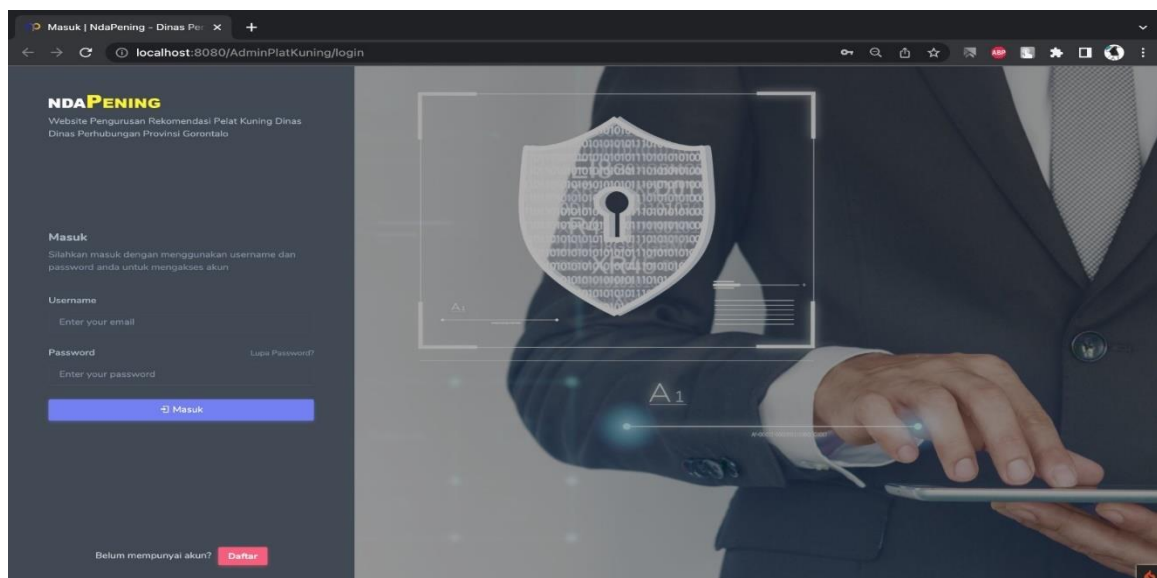
4. Utaeya

Aplikasi Pelayanan Angkutan Bus Rapid Transit (BRT) Trans NKRI Provinsi Gorontalo.



5. NdaPening

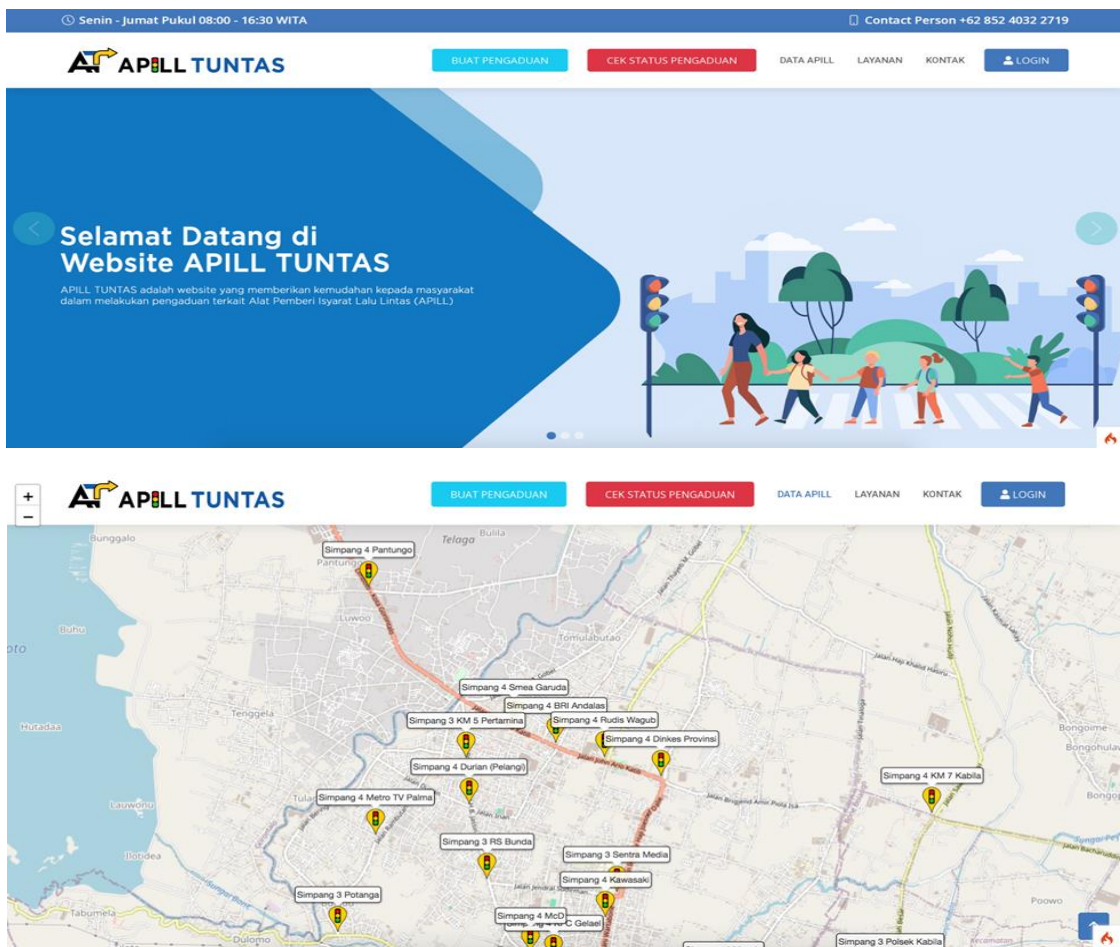
Aplikasi yang dapat mempermudah pengusaha Angkutan barang dalam melakukan pengurusan Rekomendasi pelat kuning agar terjadi peningkatan persentase pengusaha Angkutan barang yang sesuai ketentuan.





6. APIL TUNTAS (Optimalisasi Partisipasi masyarakat dalam pelayanan keselamatan lalu lintas di provinsi gorontalo)

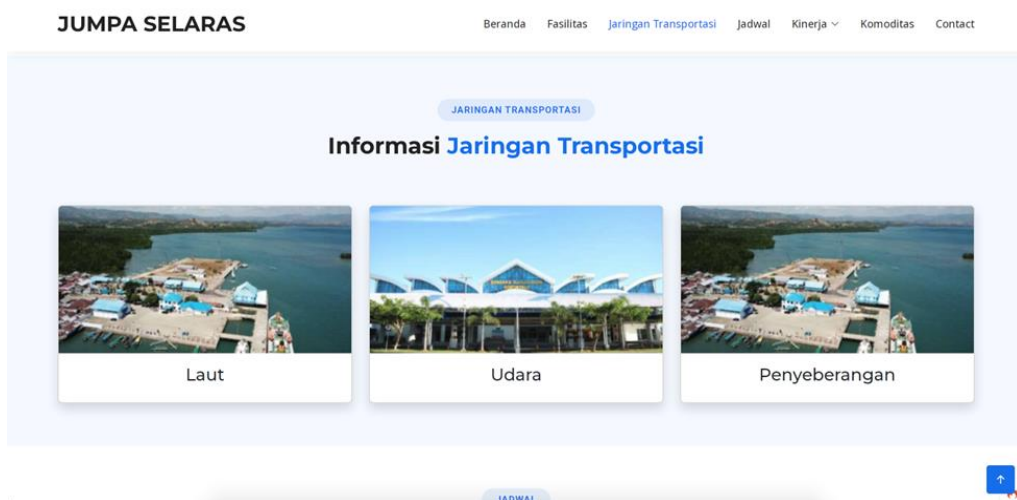
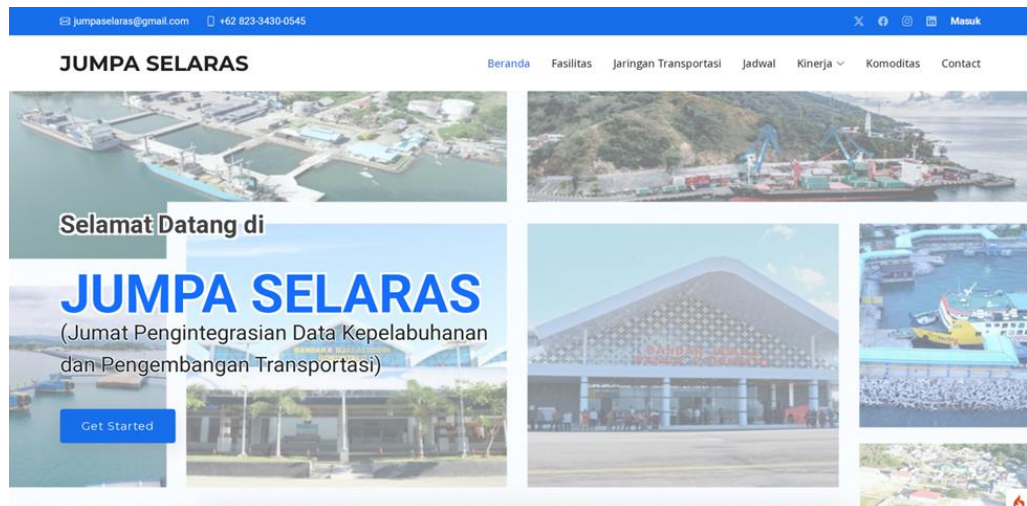
Inovasi APILL TUNTAS (Optimalisasi Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Keselamatan Lalu Lintas) di Provinsi Gorontalo bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga keselamatan lalu lintas. Program ini mengedepankan partisipasi aktif warga dalam memantau dan melaporkan pelanggaran atau masalah terkait keselamatan jalan raya melalui platform yang mudah diakses. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan dapat tercipta lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan tertib. Melalui inovasi ini, masyarakat dapat berperan langsung dalam upaya pencegahan kecelakaan dan meningkatkan kesadaran pentingnya keselamatan berlalu lintas. Program ini juga bertujuan mempercepat respon dari pihak berwenang terhadap masalah yang dilaporkan, sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan di jalan





7. Jumpa Selaras (Jumat Pengintegrasian data sektor dan pengembangan transportasi)

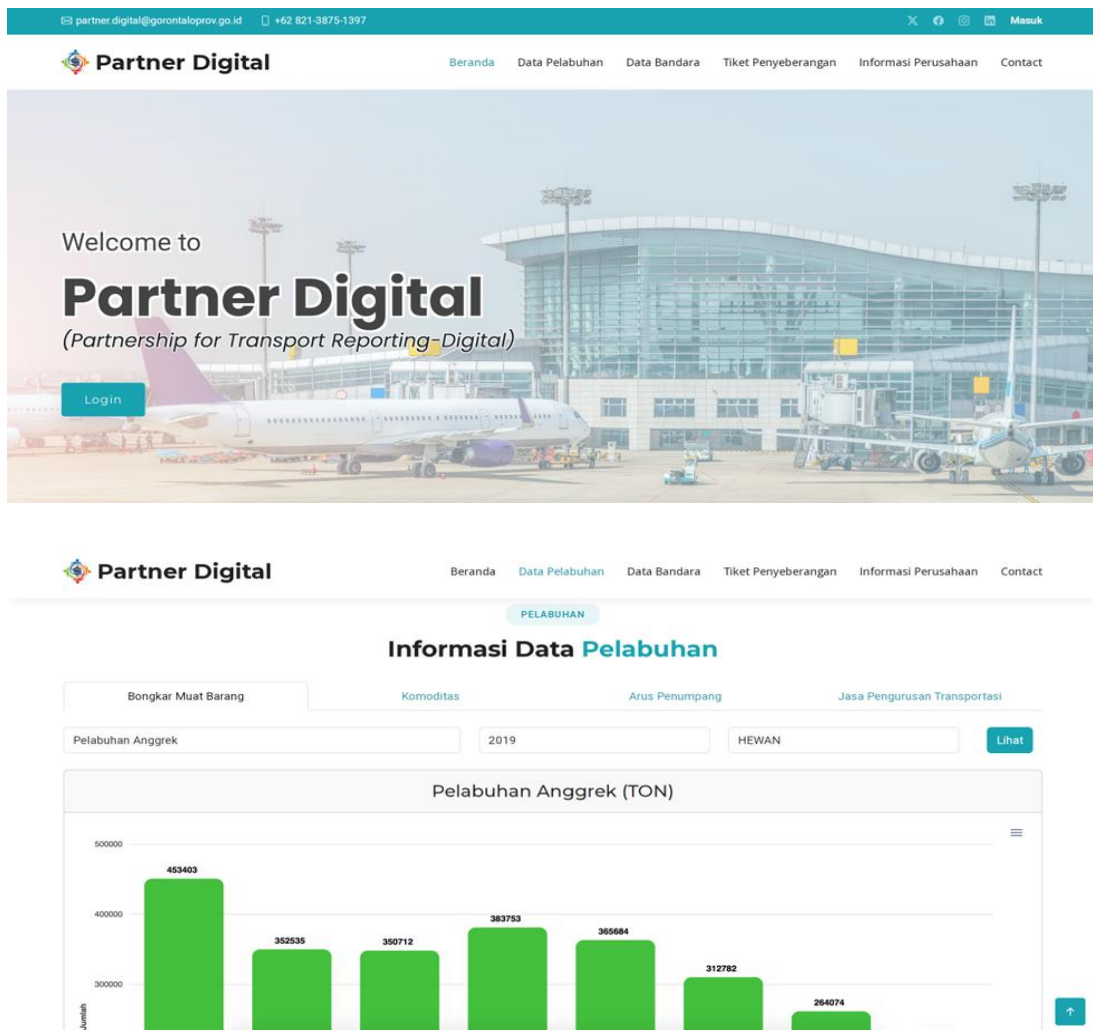
Melalui JUMPA SELARAS maka pada setiap hari Jumat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Perhubungan RI yang ada di Provinsi Gorontalo menyampaikan laporan kinerja kepada Gubernur Gorontalo sebagai perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah melalui Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo yang selama ini belum dilakukan secara rutin, efektif dan efisien. Dengan dukungan bahan berupa data yang memadai, cepat dan akurat maka Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan kolaborasi dan sinergitas dengan Pemerintah Pusat dalam pengembangan infrastruktur sektor perhubungan laut dan udara di Provinsi Gorontalo.





8. Partner Digital (Partnership For Transport Reporting Digital)

Sebuah Platform layanan pelaporan data aktivitas kepelabuhanan yang selama ini masih menggunakan cara konvensional sehingga memperbesar probabilitas human error pada saat rekapitulasi dan waktu pengumpulan data. layanan digital memangkas kemungkinan permasalahan diatas dengan maksud dan tujuan stakeholders bisa mengirim data secara realtime dan data yg masuk sudah direkap oleh database. data yg direkap juga bisa dilihat untuk masyarakat sebagai bentuk tranaparansi Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo.





9. KLAKSON (Kenali Laporkan Arahkan Sopir Kontainer)

Inovasi KLAKSON (Kenali Laporkan Arahkan Sopir Kontainer) adalah sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan ketertiban lalu lintas dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan sopir kontainer. Program ini memungkinkan masyarakat untuk mengenali perilaku sopir yang berpotensi membahayakan atau melanggar aturan lalu lintas, kemudian melaporkannya melalui platform yang telah disediakan. Setelah laporan diterima, sistem akan mengarahkan pihak berwenang untuk mengambil tindakan yang tepat guna mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan disiplin pengemudi kontainer. Inovasi ini bertujuan untuk memperkuat partisipasi publik dalam menjaga keselamatan lalu lintas serta mengurangi angka kecelakaan yang melibatkan kendaraan kontainer di jalan raya.

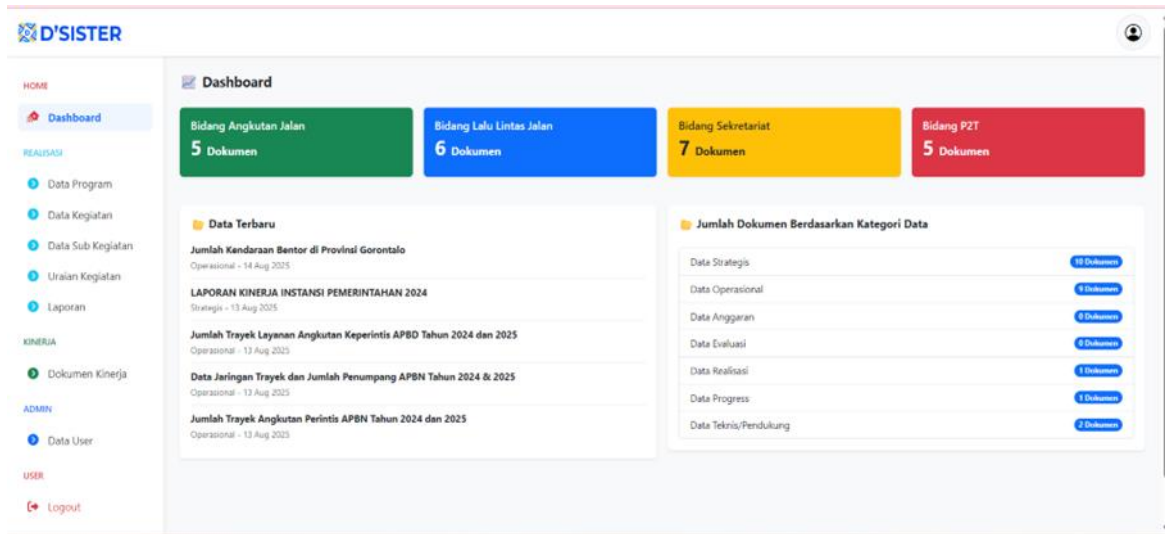


10. D'Sister (Digitalisasi Sistem Terintegrasi TERpadu)

Inovasi D'Sister adalah penyelesaian masalah perencanaan yang selalu terkendala dengan penyediaan data sehingga perlu dilakukan pengintegrasian data dalam sebuah sistem informasi yang mudah diakses serta Meningkatkan Efisiensi dan Akurasi Proses Perencanaan dan Menciptakan perencanaan yang lebih efisien, tepat waktu, dan berbasis data. Digitalisasi yang sistematis dan terpadu memungkinkan proses perencanaan dilakukan secara lebih transparan, partisipatif, berbasis data, serta sinkron antara perencanaan dan penganggaran. Sistem informasi perencanaan yang dirancang secara



terintegrasi juga mendorong kolaborasi lintas sektor dan tingkat pemerintahan, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat sasaran.



11. Optimalisasi Layanan Terminal Limboto melalui NALDO (traNsformAsi Layanan Data Operasional)

Aplikasi ini dibuat bertujuan karena belum optimalnya pelayanan dan pelaporan operasional angkutan umum AKDP di Terminal Tipe B Limboto akibat sistem pendataan kendaraan yang masih dilakukan secara manual sehingga kurang efektif, lambat, dan berpotensi menimbulkan kesalahan data.

Sebagai solusi, dikembangkan inovasi NALDO (traNsformAsi Layanan Data Operasional) yaitu sistem digital yang memanfaatkan teknologi kamera untuk mendeteksi dan mencatat kendaraan yang masuk dan keluar terminal secara otomatis serta terintegrasi dengan aplikasi SAKLAR. Inovasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi, akurasi data, serta mendukung monitoring dan evaluasi kinerja operasional terminal secara lebih efektif. Dengan inovasi ini diharapkan kinerja Terminal Limboto menjadi lebih optimal, pelayanan transportasi meningkat, serta sistem pengelolaan data operasional terminal menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan.



12. Salam Satu Jangkar

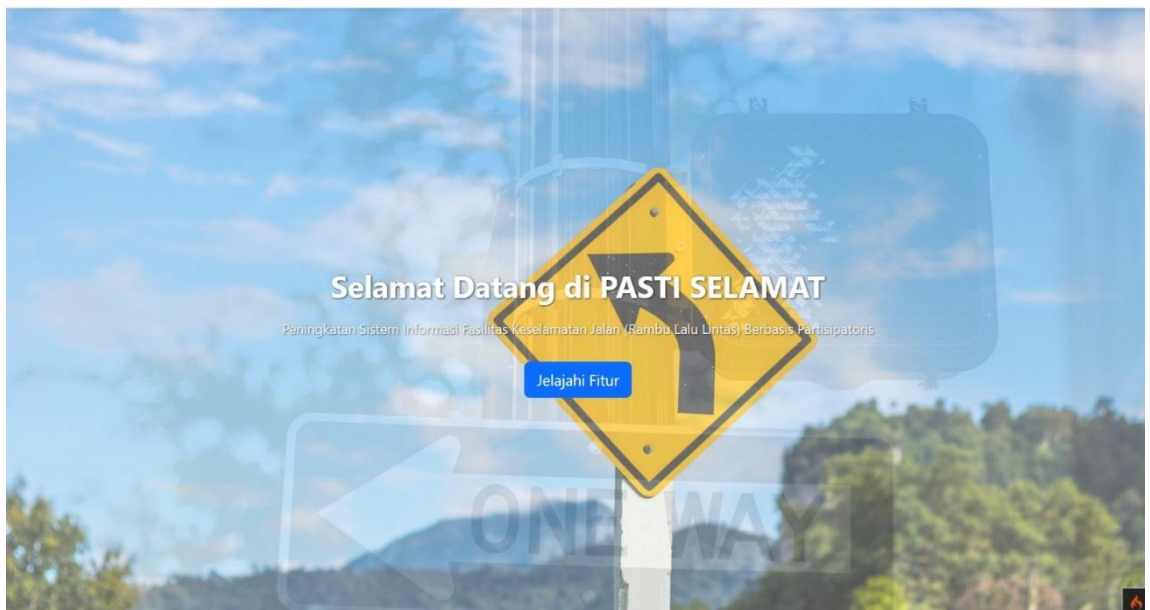
Layanan angkutan Perintis tersebut merupakan Program Kementerian Perhubungan RI dan dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Perhubungan RI yang ada di Provinsi Gorontalo. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (pasal 91) dan PP Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (pasal 1), Gubernur adalah perwakilan Pemerintah Pusat yang salah satu tugasnya adalah menyelaraskan perencanaan pembangunan dan mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan yang ada di wilayahnya. Oleh karena itu dalam Penyusunan layanan angkutan Perintis diperlukan kolaborasi dan sinergitas dengan Pemerintah Pusat dengan melakukan koordinasi sekaligus monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan layanan keperintisan yang diselenggarakan oleh UPT Kemenhub RI yang ada di Provinsi Gorontalo





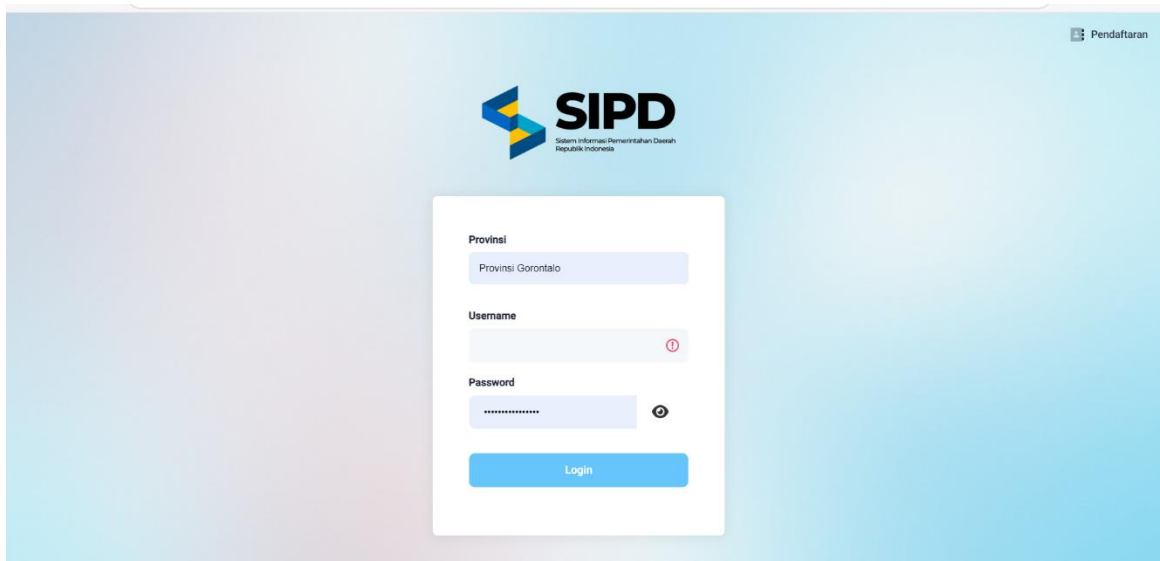
13. Pasti Selamat (Peningkatan Sistem Informasi Fasilitas Keselamatan Jalan (Rambu Lalu lintas jalan) berbasis Parsipatoris

Inovasi yang akan dilakukan adalah menciptakan system informasi pelaporan secara digital untuk mempermudah masyarakat dalam melaporkan kerusakan rambu rambu lalu lintas di ruas jalan provinsi Gorontalo, yang diberi nama PASTI SELAMAT Adapun partisipasi yang akan dilibatkan adalah masyarakat sekitar lokasi dan pengemudi online. mewujudkan sistem informasi yang mempunyai kemampuan untuk melakukan manajemen rambu lalu lintas dengan menggunakan titik koordinat sehingga memudahkan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo dalam melakukan pemeliharaan terhadap rambu lalu lintas yang ada di ruas jalan Provinsi Gorontalo dengan melibatkan masyarakat dapat melaporkan kondisi rambu lalu lintas yang ada kepada Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo yang selanjutnya dapat dilakukan langkah pemeliharaan atau perbaikan sesuai dengan kebutuhan.



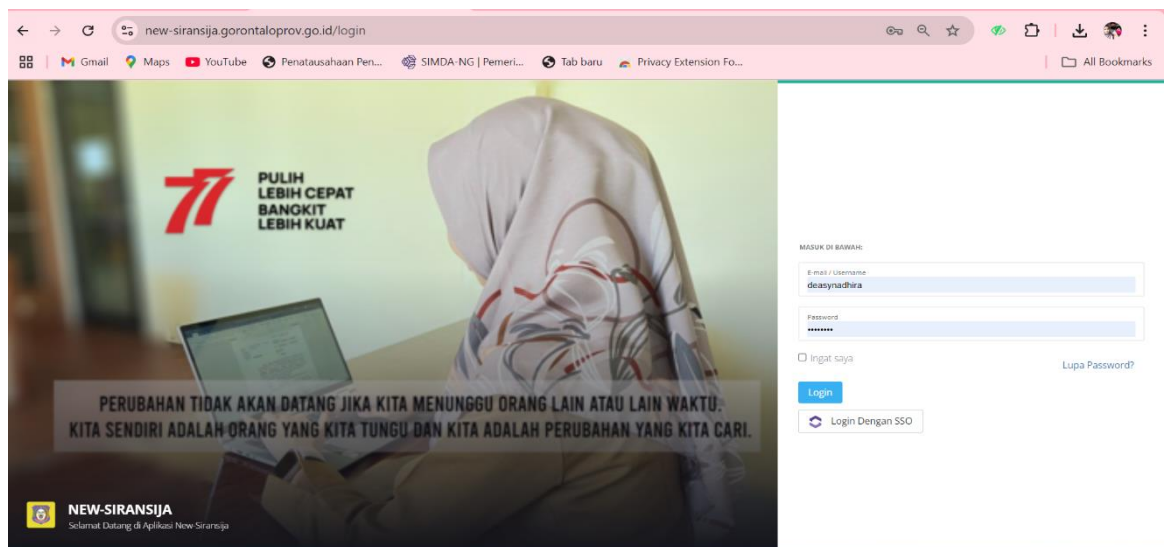
14. SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)

Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah adalah sistem informasi yang digunakan sebagai sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan daerah yang lain, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk



15. New Siransija

Aplikasi yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mengukur kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS).



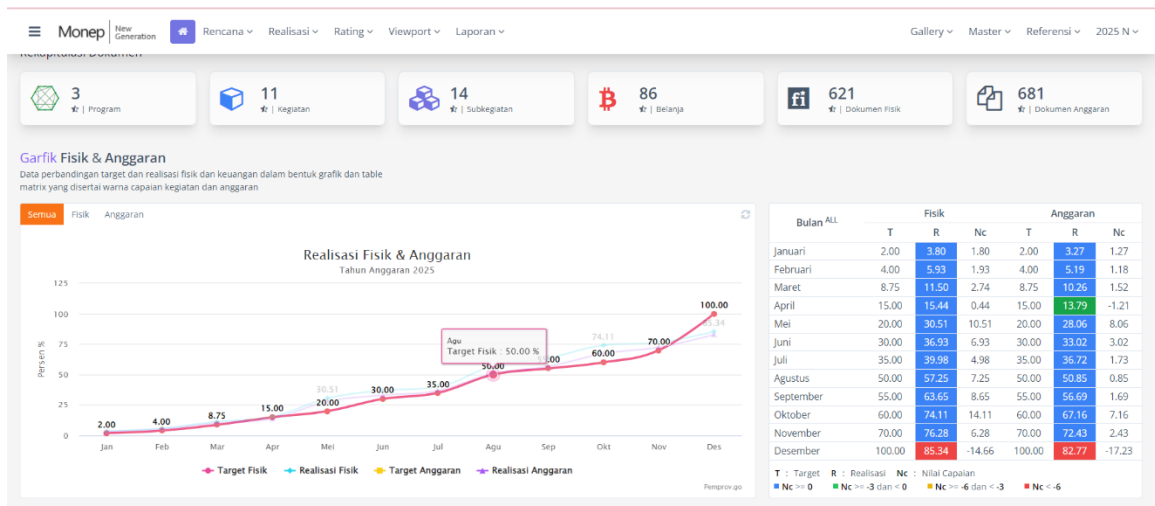


16. Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan (E-Monep, E-Sakip, SIMPD, Siransija) dengan alamat akses antara lain <http://e-monep.gorontaloprov.go.id>, <http://esr.menpan.go.id>, <http://sppd.gorontaloprov.go.id>, <http://new-siransija.gorontaloprov.go.id>.

Sistem Informasi Monev dikembangkan untuk mempermudah OPD dalam melaporkan pelaksanaan kegiatan dan penilaian kinerja setiap OPD. Sistem ini sangat mendukung dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi dapat lebih mudah dilakukan secara transparan dan akuntabel.



17. Sistem Informasi Metadata Sektor

Sistem Informasi Meta Data Sektor berfungsi untuk memberikan informasi data daerah yang dimiliki Pemda Provinsi Gorontalo secara umum. Meta Data dengan alamat akses <http://e-data-sektor.gorontaloprov.go.id>, juga berfungsi sebagai media untuk berbagi data antar pengguna sistem. Sistem Metadata Sektor merupakan sistem yang dibangun oleh Pemda Provinsi Gorontalo sebagai bentuk tanggung jawab atas penyediaan data.



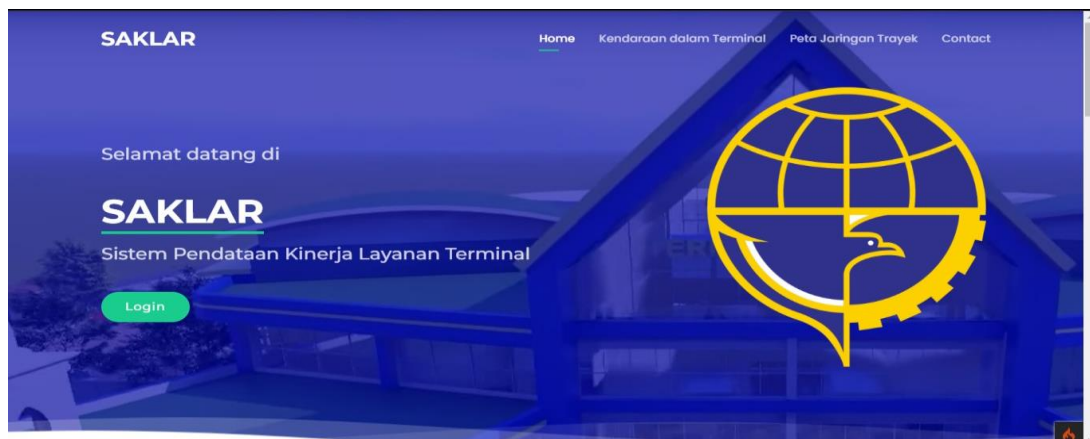
Sektor Besar

Perbandingan Jumlah Indikator aktif dikelompokkan berdasarkan Sektor

[Normal](#) [Grafik](#)

18. SAKLAR (Sistem Pendataan Kinerja Layanan Terminal)

SAKLAR Merupakan Aplikasi Pendataan Kinerja Layanan Terminal tipe B Limboto melalui system yang terintegrasi dengan perizinan angkutan sehingga Produksi dan Pengawasan Angkutan AKDP dapat di pantau dan diawasi secara langsung (realtime), serta mempermudah masyarakat dalam mencari informasi angkutan di terminal.



19. TILANG AMAN (Pembuatan Aplikasi Database Hasil Penertiban Angkutan Umum Orang dan Barang)

Aplikasi tilang aman yaitu aplikasi yang memuat database terkait dengan hasil penertiban angkutan umum orang dan barang di wilayah provinsi gorontalo. Aplikasi yang membantu memudahkan petugas dalam melakukan pencarian data dan

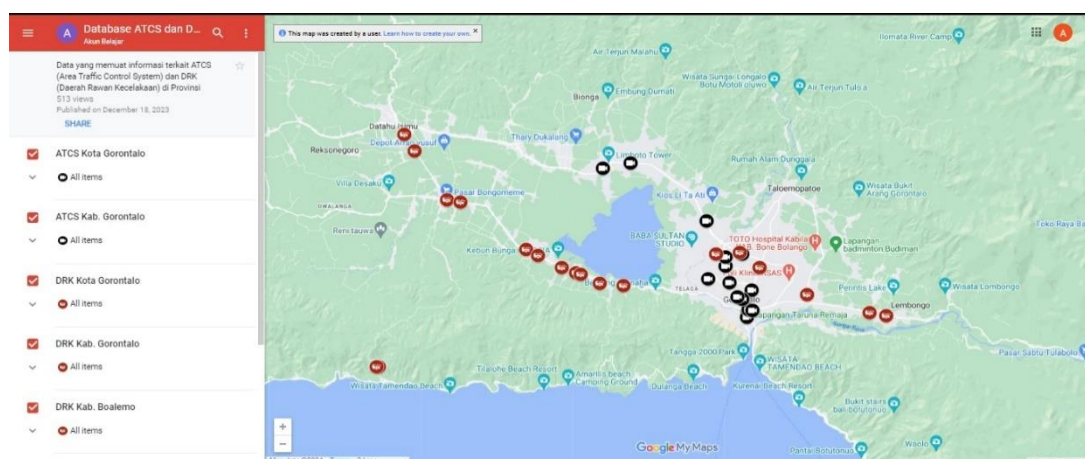


masyarakat apabila ada berkas yang hilang, serta meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait.



20. DITRADA (Digitalisasi Database ATCS (Area Traffic Control System) Dan DRK (Daerah Rawan Kecelakaan)

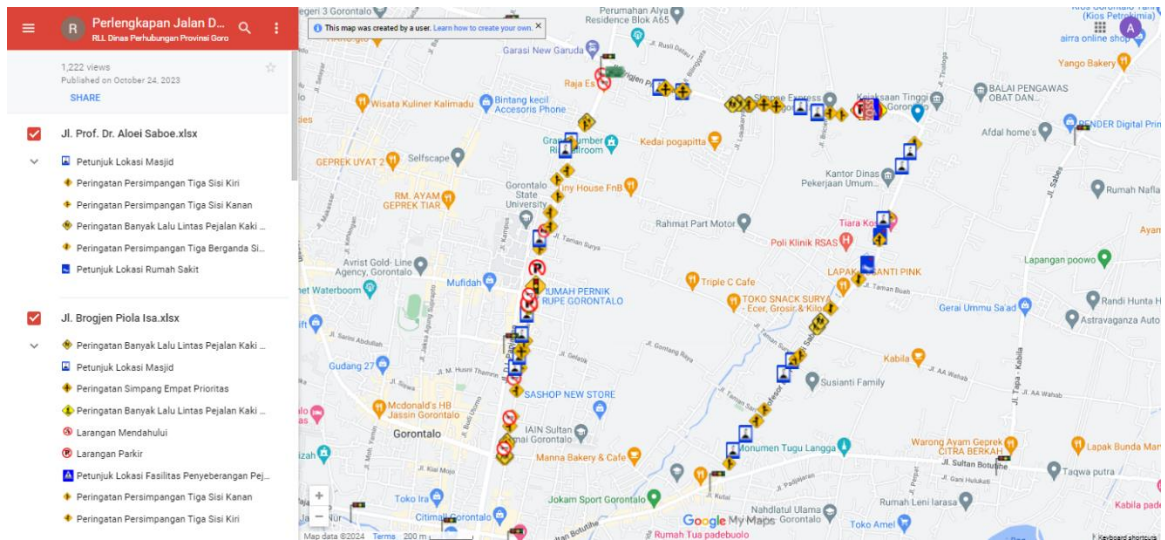
Digitalisasi Database ATCS (Area Traffic Control System) dan DRK (Daerah Rawan Kecelakaan) Menggunakan Google My Maps merupakan database digital yang menampilkan titik lokasi serta informasi ATCS dan DRK di sepanjang ruas jalan provinsi yang dapat diakses publik melalui web resmi Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo.





21. Mata Elang (optiMALisasi daTAbase pErlengkapan jaLAN dengan menggunakan Google my maps)

Merupakan sistem informasi titik lokasi perlengkapan jalan eksisting maupun yang akan direncanakan melalui website sehingga mempermudah dalam pendataan maupun pemantauan tanpa perlu turun langsung dilokasi.





Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo melaksanakan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang disusun sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis dengan membandingkan realisasi indikator kinerja sasaran strategis terhadap target yang telah ditetapkan.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo diukur dengan membandingkan pencapaian indikator kinerja dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perjanjian Kinerja yang digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja tahun 2025 adalah Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo setelah reviu oleh Inspektorat Provinsi Gorontalo.

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Kriteria	Interval Realisasi (%)	Kode
1	Sangat Baik	91 (= 100	Hijau Tua
2	Tinggi	76 (= 90	Hijau Muda
3	Sedang	66 (= 75	Kuning Tua
4	Rendah	51 (= 65	Kuning Muda
5	Sangat rendah	(= 50	Merah

Sumber: Permendagri nomor 86 tahun 2017



Dengan melihat persentase capaian kinerja yang dikelompokkan berdasarkan skala ordinal diatas, analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2025

Pengukuran target kinerja dari tujuan strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk meningkatkan peran sektor Perhubungan dalam pembangunan daerah secara berkelanjutan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2025

No	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria / Kode
1	Terwujudnya Pengembangan Wilayah dan Konektivitas Perkotaan dan Pedesaan	Pertumbuhan ekonomi	%	5.54	5.71	100	

Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo pada tahun 2025 untuk tujuan **Terwujudnya Pengembangan Wilayah dan Konektivitas Perkotaan dan Pedesaan** dengan indikator kinerja **Pertumbuhan Ekonomi** menunjukkan hasil yang baik. Target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 ditetapkan sebesar **5,54%**, sedangkan realisasinya mencapai **5,71%**. Dengan demikian tingkat capaian kinerja pada tahun 2025 mencapai 100%, yang berarti target yang ditetapkan telah terlampaui. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pembangunan daerah berjalan cukup efektif dalam mendorong aktivitas ekonomi, yang didukung oleh sektor-sektor utama seperti pertanian, perdagangan, konstruksi, serta transportasi dan pergudangan.



Selanjutnya dalam mendukung pencapaian tujuan strategis pemerintah Provinsi Gorontalo tersebut pengukuran target kinerja dari tujuan strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan strategis Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Tujuan Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo Tahun 2025

No	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria/Kode
1.	Terwujudnya Pengembangan Wilayah dan Konektivitas Perkotaan dan Pedesaan	Proporsi kontribusi PDRB Provinsi Gorontalo terhadap Nasional	%	0.25 %	0.25 %	100 %	

Realisasi indikator Proporsi Kontribusi PDRB Provinsi Gorontalo terhadap Nasional pada tahun 2025 tercatat sebesar 0,25%. Capaian ini menunjukkan bahwa kontribusi perekonomian Provinsi Gorontalo terhadap perekonomian nasional masih relatif stabil dan sejalan dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Stabilitasnya kontribusi tersebut mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi daerah tetap terjaga, didukung oleh sektor-sektor utama seperti pertanian, perdagangan, konstruksi, serta transportasi dan pergudangan yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan, Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan transportasi serta memperkuat konektivitas wilayah, baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan. Upaya tersebut diharapkan dapat terus mendukung pengembangan wilayah dan menjaga kontribusi ekonomi daerah terhadap perekonomian nasional.



Lebih lanjut dalam mendukung pencapaian tujuan strategis Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo tersebut pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari sasaran strategis Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo beserta target dan capaian realisasinya berdasarkan Renstra periode sebelumnya dan berdasarkan Renstra Periode sekarang sebagai berikut :

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo berdasarkan RPD tahun 2023 - 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase (%)	Kriteria / Kode
1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Wilayah	Rasio Konektivitas Transportasi Darat	Rasio	Rasio 0.54 (54 %)	Rasio 0.54 (54 %)	100	
		Rasio Konektivitas Transportasi Aglomerasi Perkotaan (BRT)	Rasio	Rasio 0.33 (33 %)	Rasio 0.33 (33 %)	100	
		Rasio dukungan Konektivitas Transportasi Laut dan Udara	Rasio	Rasio 0.66 (66 %)	Rasio 0.66 (66 %)	100	
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	On-Time Performance (OTP) Transportasi Aglomerasi Perkotaan (BRT)	Persentase	70 %	100 %	100	
3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) per 1000 keberangkatan	Rasio	0 (Zero Accident)	0 (Zero Accident)	0 (Zero Accident)	



		Persentase Perlengkapan Jalan yang terpasang di ruas jalan Provinsi	Persentase	48.27 %	48.59 %	100	
4	Meningkatnya kualitas dan Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP	A	A	A	100	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan	Persentase	80 %	80 %	100	

Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo memiliki 4 (empat) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo. Pada tahun 2024, capaian indikator sasaran untuk Meningkatnya Konektivitas Transportasi Wilayah Persentase dengan indikator kinerja Rasio Konektivitas Transportasi Darat tersebut dari target rasio 0.54 realisasinya sebesar 100 % atau Rasio 0.54 yang didukung oleh kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan sub kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Rasio konektivitas transportasi darat merupakan Perbandingan antara Jumlah Kawasan Prioritas Layanan Angkutan (Perintis, Sekolah dan Wisata) yang telah dilayani dibagi dengan Jumlah Kawasan Prioritas Layanan Angkutan (Perintis, Sekolah dan Wisata) yang telah ditetapkan.

Adapun kawasan prioritas nasional terdiri dari:

- Layanan Angkutan Bus Wisata dengan 5 Destinasi Pariwisata Di Provinsi Gorontalo, Diantaranya
 - Kawasan Destinasi Pariwisata Kabupaten Gorontalo, meliputi :
 1. Hutan Pinus Dulamayo;
 2. Objek Wisata Pentadio Resort;
 - Kawasan Destinasi Pariwisata Kabupaten Boalemo, meliputi :
 3. Pantai Bolihutuo;
 4. Pantai Mananggu;



- Kawasan Destinasi Pariwisata Kabupaten Puhowato, meliputi :
 5. Pantai Bumbulan
 6. Pantai Pohon Cinta Marisa
 7. Kawasan Desa Wisata Torosiaje
- Kawasan Destinasi Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara, meliputi :
 8. Pantai Pulau Diyonumo,
 9. Pantai Monano;
 10. Pantai Pulau Oile dan Pantai Minanga Atinggola
- Kawasan Destinasi Pariwisata Kabupaten Bone Bolango, meliputi :
 11. **Pemandian Objek Wisata Lombongo (sudah dilayani sampai tahun 2024) dan Objek Wisata Danau Perintis (dilayani tahun 2025)**
 12. Pantai Olele
 13. **Pantai Botutonuo (dilayani sampai tahun 2024 dan dilanjutkan di tahun 2025)**
 14. **Obyek Wisata Hius Paus (dilayani sampai tahun 2024 dan dilanjutkan di tahun 2025)**
- Layanan Angkutan Sekolah Yang Melayani 5 Sekolah, Diantaranya:
 1. SMA Negeri 1 Bone Kab. Bone Bolango
 2. SMA Negeri 4 Kab Gorontalo Utara
 3. SMK Negeri 1 Wonggarasi Kab. Puhuwato
 4. SMK Negeri 1 Taluditi Kab. Puhuwato
 5. SMA Negeri 1 Biluhu Kab. Gorontalo
- Layanan Angkutan Perintis Yang Melayani rute , Diantaranya:
 1. Pangea – Wonosari – Wonggahu
 2. Terminal Duingingi – Poduwoma
 3. Terminal Isimu – SMKN 1 Pulubala – SMAN 1 Pulubala kab. Gorontalo
 4. Desa Sidomukti – SMAN 1 Boliyohuto Kab. Gorontalo
 5. Terminal Duingingi – Tapa – Mongilo



Cara Perhitungannya:

Jumlah Kawasan Prioritas Layanan Angkutan (Perintis, Sekolah dan Wisata) yang telah dilayani

Jumlah Kawasan Prioritas Layanan Angkutan (Perintis, Sekolah dan Wisata) yang telah ditetapkan

$$= \frac{13}{24} \times 100 \% = 54.16\% \text{ atw } 0.54$$

Sedangkan untuk capaian indikator sasaran untuk Meningkatnya Konektivitas Transportasi Wilayah Persentase dengan indikator kinerja Rasio Konektivitas Transportasi Aglomerasi Perkotaan (BRT) tersebut dari target rasio 0.33 realisasinya nya sebesar 100 % atau Rasio 0.33 yang didukung oleh kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan sub kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Rasio konektivitas transportasi aglomerasi perkotaan merupakan Perbandingan antara Jumlah Kawasan Perkotaan yang telah dilayani angkutan Perkotaan dibagi dengan Jumlah Kawasan Perkotaan Prioritas yang telah ditetapkan. Transportasi Aglomerasi Perkotaan terdiri dari:

- Layanan Aglomerasi Perkotaan (BRT), dengan lintasan diantaranya:
 1. Koridor 1 : : Suwawa – Kabila – Kota Gorontalo
- Koridor 1.1 : Suwawa – Kota Gorontalo (Via City Mall)
- Koridor 1.2 : Suwawa – Kota Gorontalo (Via RS. Aloe Saboe)
 - Rute Tambahan : Botubarani – Leato – Talumolo – Botupingge – Tamalate (SMAN 5 Kota Gorontalo – Jln Sultan Botutihe – Ipilo (SMAN 1 dan SMAN 8 Kota Gorontalo)

Cara Perhitungannya:

Jumlah Kawasan Perkotaan yang telah dilayani angkutan Perkotaan

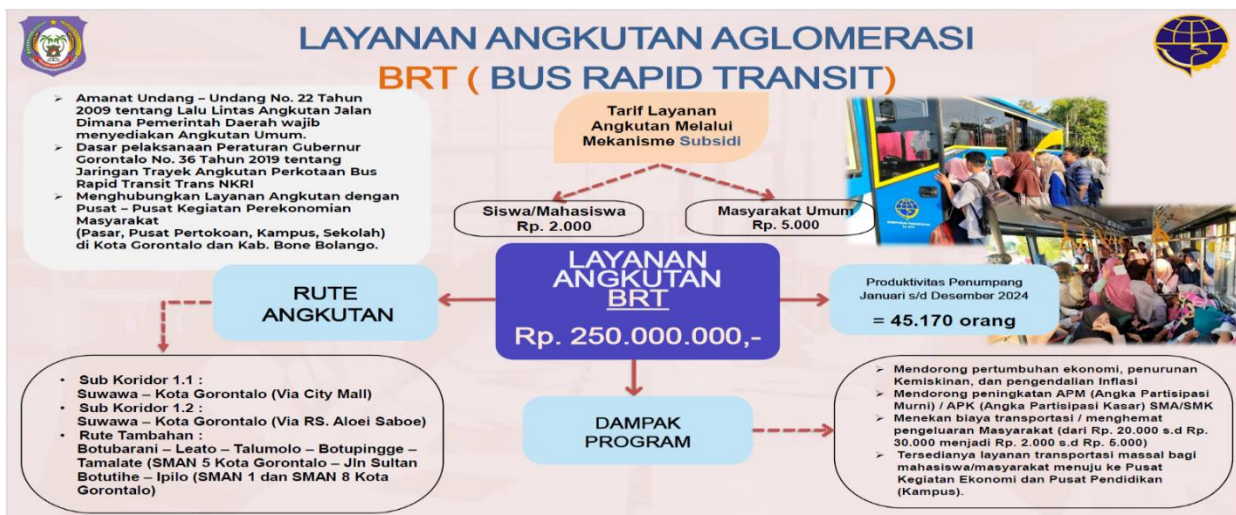
Jumlah Kawasan Perkotaan Prioritas

$$= \frac{1}{3} \times 100 \% = 33.3 \% = 0.33$$

Capaian indikator sasaran untuk Meningkatnya Konektivitas Transportasi Wilayah Persentase dengan indikator kinerja Rasio Konektivitas Transportasi Darat juga didukung



oleh Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B Sub Kegiatan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang. Terdapat 6 Terminal Tipe B yang berada di Kab/Kota yang merupakan kewenangan Provinsi namun sampai tahun 2024 baru 1 Terminal Tipe B yang diserahkan ke Pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu Terminal Tipe B Limboto Kab Gorontalo oleh karena itu pada tahun 2024 terdapat Pembangunan terminal Tipe B yang berlokasi di Limboto Kabupaten Gorontalo Utara yang sesuai amanat Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.







Pekerjaan Pembangunan Terminal Tipe B tahap I

Sedangkan untuk capaian indikator sasaran untuk Meningkatnya Konektivitas Transportasi Wilayah Persentase dengan indikator kinerja Rasio dukungan Konektivitas Transportasi Laut dan Udara tersebut dari target rasio 0.66 realisasinya nya sebesar 100 % atau Rasio 0.66 yang didukung oleh kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Bongkar Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa, Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas. Rasio konektivitas transportasi aglomerasi perkotaan merupakan Perbandingan antara Perbandingan antara jumlah perusahaan jasa terkait angkutan di perairan dan keudaraan yang aktif beroperasi di Pelabuhan dan Bandara dibagi dengan Jumlah Perusahaan jasa terkait angkutan di perairan dan keudaraan yang telah memperoleh izin. Adapun Perusahaan jasa bongkar muat barang, Jasa Transportasi Angkutan Perairan Pelabuhan di Provinsi Gorontalo dari 20 Perusahaan semuanya sudah memiliki izin JPT dan PBM sehingga capaiannya adalah 100 %.

Sedangkan untuk capaian indikator sasaran untuk Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Persentase dengan indikator kinerja On-time Performance (OTP) transportasi Aglomerasi Perkotaan (BRT) tersebut dari target 70% realisasinya nya sebesar 70% yang didukung oleh kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau



Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan sub kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Rata-rata on-time performance (OTP) transportasi perkotaan merupakan Perbandingan antara jumlah pelayanan RIT tepat waktu dibagi dengan jumlah pelayanan RIT tepat waktu dalam 1 tahun. Data ketepatan waktu diperoleh berdasarkan pencatatan yang dilaksanakan pelayanan subsidi angkutan perkotaan (BRT).

Sedangkan untuk capaian indikator sasaran untuk Meningkatkan Keselamatan Transportasi dengan indikator kinerja Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) per 1000 keberangkatan tersebut dari target 0% (*Zero Accident*) realisasinya nya sebesar 0% (*Zero Accident*) atau dengan realisasi 100% yang didukung oleh kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan sub kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Rasio kecelakaan transportasi jalan per 1.000 keberangkatan Perbandingan antara Jumlah kejadian Kecelakaan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) dibagi dengan Jumlah Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) per 1.000 keberangkatan. Adapun angkutan umum di jalan terdiri dari layanan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP). Dimana Data keberangkatan (ritase) angkutan umum di jalan didapatkan melalui data realisasi keberangkatan di Terminal Tipe B Limboto dan realisasi penyelenggaraan subsidi keperintisan angkutan jalan pada tahun (n).

Sedangkan untuk capaian indikator sasaran Meningkatkan Keselamatan Transportasi Persentase dengan indikator kinerja Persentase Perlengkapan Jalan yang terpasang di ruas jalan Provinsi tersebut dari target 48.27% realisasinya nya sebesar 48.59% yang didukung oleh kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi dan sub kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Provinsi. Perbandingan antara Jumlah Perlengkapan jalan yang terpasang pada tahun (n) dibagi dengan Jumlah Kebutuhan total perlengkapan jalan di ruas jalan Provinsi. Dimana Pengadaan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi adalah :

1. Rambu Lalu Lintas 12 Unit pada ruas Jalan Provinsi (Ruas Jalan Jhon Aryo Katili)
2. Daun Rambu Tambahan 3 Buah pada ruas Jalan Provinsi (Ruas Jalan Jhon Aryo Katili)



3. Rambu Tambahan 6 Buah pada ruas Jalan Provinsi (Ruas Jalan Jhon Aryo Katili)

4. Pita Penggaduh :

➤ SDN 69 Kota Tengah 13.6 Meter V = 108.8M²

➤ SDN 88 Sipatana 13.6 Meter V = 108.8M²



Pemasangan Rambu Lalu Lintas di Ruas Jalan Jhon Aryo Katili



Pemasangan Pita Penggaduh di SDN 69 Kota Tengah dan SDN 88 Sipatana

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo berdasarkan RPJMD tahun 2025 - 2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase (%)	Kriteria/ Kode
1	Meningkatnya Kualitas Transportasi Darat	Rasio Konektivitas Darat	Rasio	0.50	0.50	100	
		Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	Persentase	48.59	48.59	100	



		Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan	Perusahaan	2	2	100	
2	Meningkatnya Kualitas Transportasi Laut	Rasio Konektivitas Laut	Rasio	0.50	0.50	100	
		Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0.50	0.50	0.50	
		Persentase Pelayanan Jasa terkait Angkutan di Perairan	Persentase	40 %	40 %	100	

Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo memiliki 2 (dua) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo. Pada tahun 2025, capaian indikator sasaran untuk Meningkatkan Kualitas Transportasi Darat Persentase dengan indikator kinerja Rasio Konektivitas Darat tersebut dari target rasio 0.50 realisasinya sebesar 100 % atau Rasio 0.50 yang didukung oleh program Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan sub kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Rasio konektivitas transportasi darat merupakan Perbandingan antara Jumlah Kawasan Prioritas Layanan Angkutan (Perintis, Sekolah dan Wisata) yang telah dilayani dibagi dengan Jumlah Kawasan Prioritas Layanan Angkutan (Perintis, Sekolah dan Wisata) yang telah ditetapkan.

Adapun kawasan prioritas nasional terdiri dari:

- Layanan Angkutan Bus Wisata dengan 3 Destinasi Pariwisata Di Provinsi Gorontalo, Diantaranya
 - Kawasan Destinasi Pariwisata Kabupaten Gorontalo, meliputi :



1. Hutan Pinus Dulamayo;
 2. Objek Wisata Pentadio Resort;
 - Kawasan Destinasi Pariwisata Kabupaten Boalemo, meliputi :
 3. Pantai Bolihutuo;
 4. Pantai Mananggu;
 - Kawasan Destinasi Pariwisata Kabupaten Puhowato, meliputi :
 5. Pantai Bumbulan
 6. Pantai Pohon Cinta Marisa
 7. Kawasan Desa Wisata Torosiaje
 - Kawasan Destinasi Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara, meliputi :
 8. Pantai Pulau Diyonumo,
 9. Pantai Monano;
 10. Pantai Pulau Oile dan Pantai Minanga Atinggola
 - Kawasan Destinasi Pariwisata Kabupaten Bone Bolango, meliputi :
 - 11. Pemandian Objek Wisata Lombongo**
 - 12. Objek Wisata Danau Perintis**
 - 13. Pantai Olele**
 - 14. Pantai Botutonuo**
 - 15. Obyek Wisata Hius Paus**
- Layanan Angkutan Sekolah Yang Melayani 5 Sekolah, Diantaranya:
1. SMA Negeri 1 Bone Kab. Bone Bolango
 2. SMA Negeri 4 Kab Gorontalo Utara
 3. SMK Negeri 1 Wonggarasi Kab. Puhuwato
 4. SMK Negeri 1 Taluditi Kab. Puhuwato
 5. SMA Negeri 1 Biluhu Kab. Gorontalo
- Layanan Angkutan Perintis Yang Melayani 5 rute , Diantaranya:
1. Terminal Isimu - Boliyohuto
 2. Terminal Mananggu – Terminal Tilamuta
 3. Terminal Isimu – SMKN 1 Pulubala – SMAN 1 Pulubala kab. Gorontalo
 4. Desa Sidomukti – SMAN 1 Boliyohuto Kab. Gorontalo
 5. Terminal Duingingi – Tapa – Mongilo



- Layanan Aglomerasi Perkotaan (BRT), dengan lintasan diantaranya:
 - Koridor 1 :: Suwawa – Kabila – Kota Gorontalo
 - Koridor 1.1 : Suwawa – Kota Gorontalo (Via City Mall)
 - Koridor 1.2 : Suwawa – Kota Gorontalo (Via RS. Aloei Saboe)
 - Rute Tambahan : Botubarani – Leato – Talumolo – Botupingge – Tamalate (SMAN 5 Kota Gorontalo – Jln Sultan Botutihe – Ipilo (SMAN 1 dan SMAN 8 Kota Gorontalo)

Cara Perhitungannya:

Jumlah Kawasan Prioritas Layanan Angkutan (Perintis, BRT, Wisata dan Sekolah) yang telah dilayani

Jumlah Kawasan Prioritas Layanan Angkutan (Perintis, BRT, Wisata dan Sekolah) yang telah ditetapkan

$$= \frac{14}{28} \times 100 \% = 50 \% \text{ atw } 0.50$$

untuk mendukung indikator sasaran rasio konektivitas darat pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya Kualitas Transportasi Darat juga didukung oleh pelaksanaan pembangunan Terminal Tipe B Limboto tahap II yang dilaksanakan di tahun 2025. Pembangunan terminal ini merupakan salah satu upaya strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Perhubungan dalam meningkatkan kualitas pelayanan transportasi darat serta memperkuat sistem jaringan transportasi yang terintegrasi melalui Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B Sub Kegiatan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang. Terdapat 6 Terminal Tipe B yang berada di Kab/Kota yang merupakan kewenangan Provinsi namun sampai tahun 2024 baru 1 Terminal Tipe B yang diserahkan ke Pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu Terminal Tipe B Limboto Kab Gorontalo oleh karena itu pada tahun 2024 terdapat Pembangunan terminal Tipe B yang berlokasi di Limboto Kabupaten Gorontalo Utara yang sesuai amanat Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Terminal Tipe B Limboto dirancang sebagai simpul transportasi yang melayani angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) serta angkutan perkotaan dan perdesaan. Keberadaan terminal ini diharapkan dapat meningkatkan keteraturan operasional angkutan umum,



memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa transportasi, serta mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi barang.

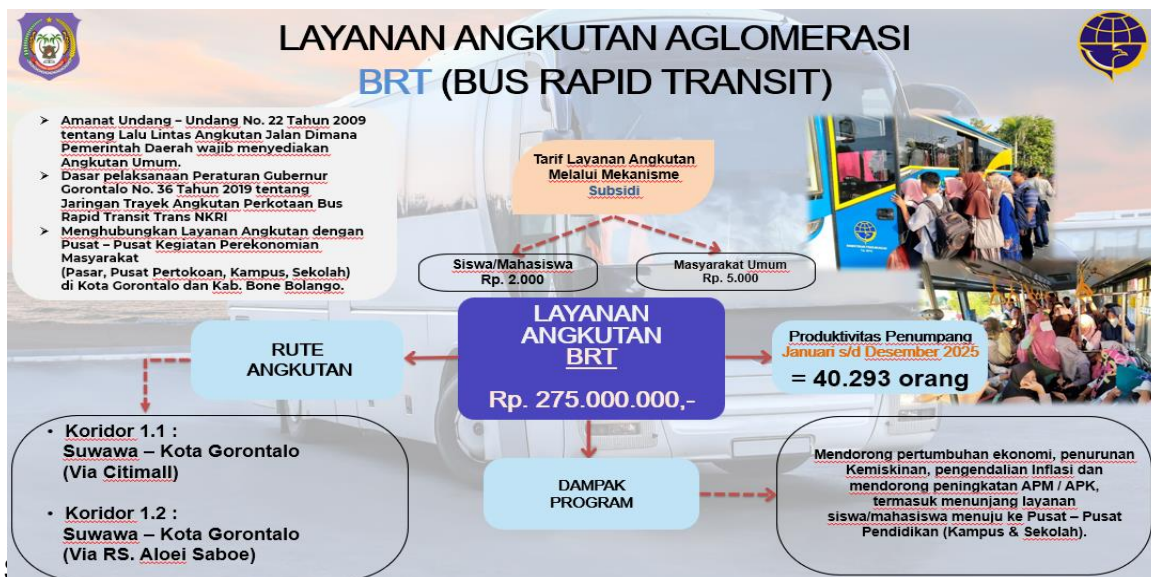
Selain itu, pembangunan terminal ini juga bertujuan untuk menata sistem transportasi darat agar lebih tertib, aman, dan efisien. Dengan tersedianya fasilitas terminal yang memadai, diharapkan aktivitas naik turun penumpang dapat berlangsung dengan lebih teratur, sehingga dapat mengurangi potensi kemacetan di kawasan sekitar serta meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa transportasi. Melalui pembangunan Terminal Tipe B Limboto, Pemerintah Provinsi Gorontalo berupaya memperkuat konektivitas antar wilayah serta mendukung pengembangan wilayah di Kabupaten Gorontalo dan sekitarnya. Keberadaan terminal ini diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong peningkatan kualitas layanan transportasi darat yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat di Provinsi Gorontalo. Terbangunnya Terminal Penumpang Tipe B beserta fasilitas utama dan penunjang, saat ini Pembangunan Terminal Tipe B Limboto ada di tahap II dengan item pekerjaan sebagai berikut :

1. Pekerjaan persiapan
2. Pekerjaan gedung terminal lantai 1
 - 2.1. Pekerjaan tanah dan struktur
 - 2.2. Pekerjaan tangga lantai 1
 - 2.3. Pekerjaan arsitektur lantai 1
3. Pekerjaan gedung terminal lantai 2
 - 3.1. Arsitektur
4. Pekerjaan mekanikal & plumbing
5. Pekerjaan finishing eksterior & interior
6. Pekerjaan pengecatan
7. Pekerjaan penataan halaman

Berikut dokumentasi Pembangunan terminal tipe B tahap II tahun 2025.







Darat Persentase dengan indikator kinerja Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang pada kondisi ideal tersebut dari target 48.59 % realisasinya nya sebesar 100 % yang didukung oleh program Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi dan sub kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi dan kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi sub kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. Indikator kinerja Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal digunakan untuk mengukur sejauh mana ketersediaan dan pemasangan perlengkapan jalan telah



memenuhi kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan kondisi ideal pada jaringan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Perlengkapan jalan tersebut meliputi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, pagar pengaman jalan, serta fasilitas keselamatan lainnya yang berfungsi untuk meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan keselamatan lalu lintas.

Indikator ini mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Transportasi Darat, karena keberadaan perlengkapan jalan yang memadai dan sesuai standar akan menciptakan sistem transportasi yang lebih aman, tertib, dan efisien. Dengan terpenuhinya perlengkapan jalan sesuai kondisi ideal, diharapkan dapat meminimalisir potensi kecelakaan lalu lintas, meningkatkan kenyamanan pengguna jalan, serta mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi barang di Provinsi Gorontalo. Melalui peningkatan persentase pemasangan perlengkapan jalan terhadap kondisi ideal, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Perhubungan terus berupaya memperkuat aspek keselamatan dan kualitas layanan transportasi darat sebagai bagian dari upaya mendukung pengembangan wilayah serta peningkatan konektivitas antar kawasan. Untuk lebih jelasnya persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang maupun kebutuhannya dapat dilihat di tabel berikut ini :



No	Ruas Jalan	Panjang Ruas (Km)	Lebar Ruas (M)	Marka Jalan			Rambu Lalu Lintas			APILL			Warning Light			LPJU			Guardrail			RPPJ			Cermin Tikung			ZOSS			Pita Penggaduh			KET	
				Existing	Keb	Sisa	Existing	Keb	Sisa	Existing	Keb	Sisa	Existing	Keb	Sisa	Existing	Keb (m)	Sisa	Existing	Keb	Sisa	Existing	keb	Sisa	Existing	keb	Sisa	Existing	keb	Sisa					
1	Isimu - Batudaa	14.38	7	14,380	132	160	28	2	2	0	2	2	0	14	18	4				2	2	0	1	3	2	5	7	2	1	4	3				
2	Batudaa - Gorontalo	5.11	7	5,110	5	20	15			0							500	500				0	1	4	3										
3	Jl. Usman Isa	6.90	4.5 - 7	6,900	28	42	14			0												0	4	4	0	2	2								
4	Jl. Hasanudin	0.35	7	350	0	6	6			0																									
5	Jl. Raja Ekyat	2.00	9	2,000	34	34	0	1	1	0												1	1					0	2	2	0				
6	Gorontalo - Suwawa - Tulabolo	26.98	4.5 - 8	26,980	74	129	55	1	1	0							660	1273	613	7	8	1			4	4		1	1	3	6	3			
7	Aladi - Tulabolo	30	4.5	30,000						0																							Bim ada survey		
8	Randangan - Taloditi	30.00	4.5	30,000	110	140	30			0						244	680	436	14	14	0														
9	Kabila - Tapa	9.50	4.5	9,500	29	51	22	1	1	0							840	840	4	4	0								0	1	1	0			
10	Jl. Toto Utara	1.10	4.5	1,100	0	4	4			0																									
11	Tapa - Alindola	45	4 - 9	45,000						0																								Bim ada survey	
12	Jl. Cokroaminoto	0.60	6	600	0	17	17	1	1	0																									
13	Jl. Ahmad Dahlan	1.20	6	1,200	0	4	4			0																									
14	Jl. Pangeran Hidayat	1.74	2 x 6	1,740	16	16	0			0																			1	1	0				
15	Jl. Rusli Datau	1.98	6	1,980	12	30	18			0																									
16	Jl. Kamboja	0.91	4	910	0	3	3	1	1	0																									
17	Tanqokobu-Pentadu	55.00	3 - 4	55,000		89	89			0				26	26	0																			Bim ada survey
18	Duhiyadaa - Imboddu	16.00	7	16,000	106	118	12			0				89	89	0																			Naik status Jl. Prov menjadi Jl. Nasional
19	Molombulahe - Bubaa	18.00	4.5	18,000	0	92	92	1	1	0				104	104							4	4												
20	Jl. Aryo Katili (Ex Jln Andalas)	2.70	2 x 7	2,700	18	36	18	4	4	0												1	1					4	4	2					
21	Jl. Thayeb Moh. Gobel	4.50	6 - 7	4,500	39	43	4			0												2	2					4	4	3	3	0			
22	Jln. Brigjen Piola Isa	2.30	6	2,300	26	26	0			0												1	1	0				1	1	1	1	0			
23	Jln. Prof Dr. Aloesi Saboe	2.80	6	2,800	22	22	0			0																									
24	Jln. Tinaloqa	4.50	4.5	4,500	11	11	0			0												2	2					0	1	1	0				
25	Jln. Tenilo - Pilolodaa - Iluta	7.20	7	7,200						0																									Bim ada survey keseluruhan
26	Jln. Akses Perkantoran Botu	3.46	9 - 11	3,460	34	34	0			0				1	3	2						2	2												
27	Talumolo - Buata - Duano (Botupingge)	25.00	4.5	25,000	64	64	0			0																									
28	Jln. Boidu - Longalo - Dulamayo	18.00	4	18,000	60	60	0			0							1141	1141				1	1		3	3			0	1	1	0			
29	Jln. Saleh Kadir (Hunggaluwa - Dehuwalolo)	3.70	7	3,700						0																			0	1	3	2			Bim ada survey keseluruhan
30	Jln. Pangadaa - Bakti	13.46	4.5	13,460						0																									Bim ada survey keseluruhan
31	Jln. Pilolalenga - Bituhu Tengah	20.50	4.5	20,500						0																									Bim ada survey keseluruhan
32	Jln. Mulyonegoro - Karya Mukti	14.00	4	14,000						0																									Bim ada survey keseluruhan
33	Jln. Runi Hemeto (Pongogaila - Buhu)	11.64	4	11,640						0																									Bim ada survey keseluruhan
34	Jln. Pilohayanga - Dulamayo Selatan	10.00	4	10,000						0																									Bim ada survey keseluruhan
35	Jln. Pentadu - Mananggu	39.00	4	39,000						0					52	52																			Bim ada survey keseluruhan
36	Jln. Labanu - Tolongio	9.20	4	9,200						0																									Bim ada survey keseluruhan
37	Jln. Teratai - Sipatana	3.51	4	3,510						0																									Bim ada survey keseluruhan
38	Jln. Imboddu - Patilanggio	0.80	4	800						0																									Bim ada survey keseluruhan
39	Jln. Taluditi - Wonggarasi	23.40	4	23,400						0																									Bim ada survey keseluruhan
40	Jln. Akses Bandara Imboddu	10.75	4	10,750						0																									Bim ada survey keseluruhan
JUMLAH				497	166	0	497,170	820	1,251	431	12	12	0	6	8	2	103	289	186	904	4,434	3,530	28	42	14	6	18	12	5	19	14	17	27	12	
							Marka Jalan	Rambu Lalu Lintas	APILL	Warning Light	LPJU	Guardrail	RPPJ	Cermin Tikung	ZOSS	Pita Penggaduh																			
							(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)																			
							0.00	65.55	100.00	75.00	35.64	20.39	66.67	33.33	26.32	62.96																			
							TOTAL PENCAPAIAN (%)			48.59																									



Dimana Pengadaan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi dengan rincian sebagai berikut :

6. Rambu Lalu Lintas 4 Unit pada ruas Jalan Provinsi (Ruas Jalan Jhon Aryo Katili)
7. Rambu Lalu Lintas 38 Unit pada ruas Jalan Provinsi (Ruas Jalan Akses Perkantoran Botu)
8. Rambu Tambahan 2 Buah pada ruas Jalan Provinsi (Ruas Jalan Jhon Aryo Katili)
9. Pita Penggaduh :
 - SDN 70 Kota Tengah 13.8 Meter V = 138 M²
 - SDN 66 & TK AB V Tamalate 7.2 Meter V = 72.20 M²
 - Masjid Al-Muhajirin 7,20 Meter V= 57.60 M²
 - Masjid Fathul Mubin 6,5 Meter V = 39 M²
 - Rudis Wagub, Sekda DPRD 5,15 Meter V = 51.50 M²



Pemasangan Rambu Lalu Lintas di Ruas Jalan Jhon Aryo Katili dan Ruas Jalan Akses

Perkantoran Botu



Pemasangan Pita Pengaduh di SDN 70 Kota Tengah dan SDN 66 & TK AB V Tamalate
Untuk kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah LPJU yang dipelihara di Kabupaten Gorontalo , yaitu

1. Kabel SR 2x10 MM + Aksesoris 250m
2. Box panel PJU outdoor + aksesoris = 7 paket
3. Tiang PJU double ornament parabola (LED 150W + Tiang 9m octagonal + aksesoris) = 12 paket
4. Kabel NYRGBY 3x6mm 3281m
5. MCB 1 phase 2A = 292pcs
6. Lampu LED 150watt = 6pcs



Pemeliharaan lampu Penerangan Jalan Umum di Ruas Jalan Trans Sulawesi Desa

Haya-haya

Selain Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan dan Pemeliharaan Lampu Jalan Penerangan Umum (LPJU) Dinas Perhubungan juga melakukan pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light di ruas Jalan Provinsi. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas bagi pengguna jalan.

Pemeliharaan tersebut meliputi pengecekan kondisi perangkat, perbaikan komponen yang mengalami kerusakan, serta memastikan seluruh perangkat pengatur lalu lintas dapat berfungsi dengan baik dan optimal. Keberadaan Traffic Light berperan penting dalam mengatur arus kendaraan pada persimpangan jalan guna menghindari kemacetan dan potensi kecelakaan, sedangkan Warning Light berfungsi sebagai alat peringatan bagi



pengguna jalan pada titik-titik rawan kecelakaan atau lokasi tertentu yang memerlukan kewaspadaan lebih.

- Lokasi Traffic Light yang Dilakukan Pemeliharaan Di Provinsi Gorontalo
 1. S4. Smea/Garuda
 2. S3. Polsek Kabila
 3. S4. Moodu
 4. S4. Emden
 5. S4. Dikes Provinsi
 6. S4. Rudis Wagub
 7. S4. Km 7 Desa Toto Kabila
 8. S3. Buladu/Potanga
 9. S3. Sentra Media
 10. S4. Bri Andalas Jl. Ario Katili Eks Jl Andalas
 11. S4. Hotel Maqna Jl. Sultan Botutihe
 12. S4. Kantor Pos Jl. A. Yani - Jl. 23 Januari
 13. S4. Masjid Agung Baiturrahim Jl. Nani Wartabone
 14. S4. Jl. Hb. Jasin-Durian (Pelangi)
 15. S4. Kfc Jl. Hb Jasin - Jl. Pangeran Diponegoro
 16. S4. Mc Donald Jl. Hb. Jasin - Jl. Moh. Yamin
- Lokasi Warning Light Yang Dilakukan Pemeliharaan Di Provinsi Gorontalo
 1. Warning Light Blok Plan 01 lokasi Jl. Thayeb Moh Gobel (Kompleks Blok Plan Perkantoran Provinsi)
 2. Warning Light Blok Plan 02 lokasi Jl. Thayeb Moh Gobel (Kompleks Blok Plan Perkantoran Provinsi)
 3. Warning Light Batudaa 01 lokasi Jl. Batudaa Gorontalo (Tabongo Barat)
 4. Warning Light Batudaa 02 lokasi Jl. Batudaa Gorontalo (Tabongo Barat)
 5. Warning Light Sapta Marga Lokasi Jl. By Pass (Akses Kantor Gubernur)
 6. Warning Light Jln. Brigjen Piola Isa Lokasi Jl. Brigjen Piola Isa (Simpang 3 Kemenkumham)
 7. Warning Light Jln. Tinaloga Jl. Tinaloga (Simpang 3 Kemenkumham)



8. Warning Light Jln. Aloei Saboe Lokasi Jl. Prof. Dr. H.Aloei Saboe (Simpang 3 Kemenkumham)



Pemeliharaan Traffic light dan warning light diruas jalan Provinsi

Sedangkan untuk capaian indikator sasaran Meningkatnya kualitas transportasi darat dengan indikator Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dengan target 2 perusahaan realisasinya adalah 2 perusahaan yang sudah tersertifikasi sistem Manajemen Keselamatan yaitu Perusahaan Koperasi Mitra



Usaha Gorontalo dan Koperasi Jasa Transportasi Angkasa Gorontalo Lipuu. Pencapaian tersebut menunjukkan adanya komitmen dari perusahaan angkutan umum dalam menerapkan standar keselamatan transportasi melalui penerapan Sistem Manajemen Keselamatan yang terstruktur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan sistem ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan operasional angkutan umum, meminimalisir risiko kecelakaan lalu lintas, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi.

Selain itu, keberhasilan sertifikasi kedua perusahaan angkutan umum tersebut juga mencerminkan peran aktif Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Perhubungan dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi terhadap penyelenggara angkutan umum agar dapat memenuhi standar keselamatan transportasi. Melalui penerapan Sistem Manajemen Keselamatan ini diharapkan kualitas pelayanan transportasi darat semakin meningkat, sehingga dapat mendukung terwujudnya sistem transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan di Provinsi Gorontalo yang didukung oleh Program Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan sub kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi.

Untuk capaian indikator sasaran Meningkatnya kualitas transportasi laut dengan indikator sasaran rasio konektivitas laut dengan target rasio 0.50 dengan realisasi 0.50 atau 100 % dengan Dukungan untuk konektivitas Sarana dan Prasarana Pelabuhan dan Bandara tahun berjalan yang dikelola oleh pusat (Kementerian Perhubungan). Dukungan terhadap konektivitas sarana dan prasarana pelabuhan serta bandar udara pada tahun berjalan pada dasarnya merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo berperan dalam memberikan dukungan melalui pelaksanaan koordinasi dan sinergi dengan unit pelaksana teknis Kementerian Perhubungan yang berada di daerah. Peran tersebut diwujudkan melalui kegiatan koordinasi, fasilitasi, serta penyampaian informasi terkait kebutuhan pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana transportasi laut maupun udara di



wilayah Provinsi Gorontalo. Melalui koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, diharapkan pembangunan dan pengembangan pelabuhan serta bandar udara dapat berjalan secara optimal dalam mendukung konektivitas antar wilayah, kelancaran mobilitas masyarakat, serta distribusi barang dan jasa. Indikator ini di dukung oleh program Pengelolaan Pelayaran dengan kegiatan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Bongkar Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa, Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Lautatau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas.

**PEDOMAN PERHITUNGAN :
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH**

$$K_{TDaerah} = (K_{TD} \times W_{TD}) + (K_{TL} \times W_{TL})$$

Ket :

KTD = Konektivitas Transportasi Darat

WTD = Bobot Konektivitas Transportasi Darat (Ditentukan Daerah, dengan satuan %)

KTL = Konektivitas Transportasi Laut

WTL = Bobot Konektivitas Transportasi Laut (Ditentukan Daerah, dengan satuan %)

Jumlah WTD + WTL = 100%

PERHITUNGAN :

KTD = 0,5 rasio

WTD = 100% karena Provinsi Gorontalo fokus Daratan sehingga fungsi Layanan Angkutan Darat lebih dominan lebih dari laut

KTL = 0 rasio

WTL = 0%

Jmlh WTD + WTL = 100% + 0% = 100%

Sehingga Rasio Konektivitas Provinsi :

KT Daerah = (0,50 x 100%) + (0 x 0%) = 0,50

Sedangkan untuk capaian indikator sasaran meningkatnya kualitas transportasi laut dengan indikator kinerja Rasio konektivitas wilayah dengan target 0.5 rasio realisasinya sebesar 100 % atau 0.5 Rasio didukung oleh program program Pengelolaan Pelayaran dengan kegiatan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Bongkar Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa, Pengurusan Transportasi,



Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Lautatau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas. Rasio Konektivitas antar wilayah merupakan Dukungan untuk kelancaran Produktivitas Penumpang dan Barang di Pelabuhan dan Bandara tahun berjalan yang dikelola pusat (Kementerian Perhubungan). Rasio Konektivitas antar wilayah merupakan dukungan untuk kelancaran produktivitas penumpang dan barang di pelabuhan dan bandara pada tahun berjalan yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Perhubungan berperan dalam memberikan dukungan melalui koordinasi dan sinergi dengan unit pelaksana teknis Kementerian Perhubungan yang berada di daerah.

Dukungan tersebut dilakukan melalui upaya penguatan konektivitas transportasi antar wilayah, khususnya dalam mengintegrasikan moda transportasi darat dengan moda transportasi laut dan udara. Integrasi konektivitas tersebut diharapkan dapat memperlancar mobilitas penumpang serta distribusi barang dari dan menuju pelabuhan maupun bandar udara yang ada di Provinsi Gorontalo.

Dengan adanya konektivitas yang baik antar moda transportasi, diharapkan aktivitas pelayanan transportasi di pelabuhan dan bandara dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat di Provinsi Gorontalo.

Sedangkan untuk capaian indikator sasaran meningkatnya kualitas transportasi laut dengan indikator kinerja Persentase Pelayanan Jasa terkait Angkutan di Perairan dengan target 40 % realisasinya sebesar 100 % atau Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) sebanyak 40 perusahaan yang Beroperasi Dan Sudah Berizin dari total 40 Perusahaan secara keseluruhan sehingga capaiannya adalah 100 %. Indikator ini didukung oleh program program Pengelolaan Pelayaran dengan kegiatan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Bongkar Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa, Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Lautatau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas.



2. Kegiatan Lainnya

Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo mempunyai beberapa kegiatan yang di laksanakan pada tahun 2025 antara lain:

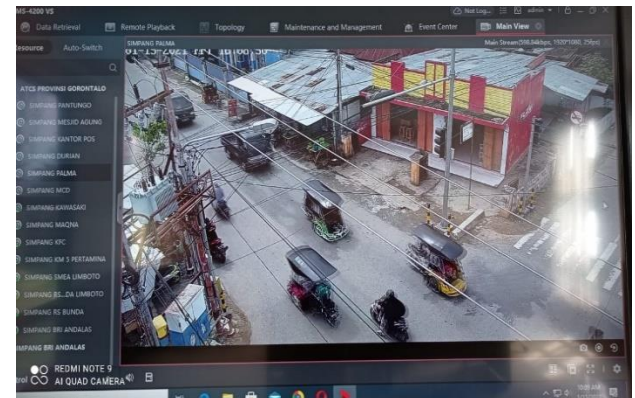
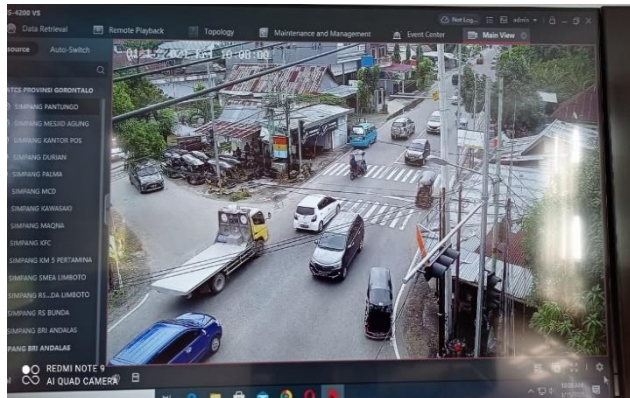
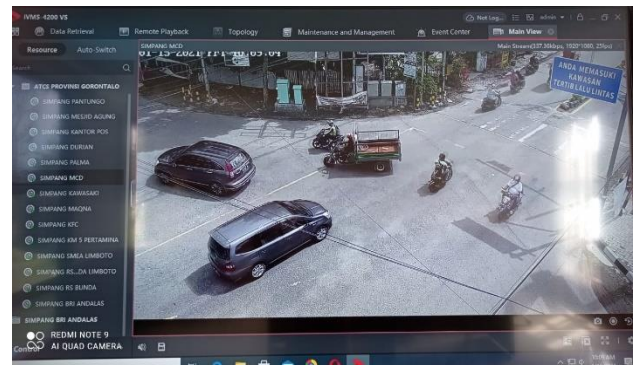
Tahun 2025 terdapat beberapa kegiatan yaitu : Jumlah penertiban izin angkutan secara terpadu bersama Polda Gorontalo dan Dishub Kab/Kota berhasil terealisasi 100% melalui kegiatan Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sebanyak 5 Kali. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan untuk memantau dan menertibkan izin-izin angkutan yang telah dikeluarkan oleh Dishub Provinsi Gorontalo baik untuk angkutan umum, angkutan sewa khusus, angkutan barang, maupun kontainer dalam rangka mewujudkan transportasi yang tertib, lancar, dan selamat. Sebagai upaya untuk melakukan pengawasan dan pengendalian yang ketat agar menjamin tersedianya angkutan jalan yang selamat, aman, nyaman dan lancar bagi pengguna moda transportasi ini maka pemerintah maupun pemerintah daerah melakukan mekanisme kontrol berupa pemberian izin kepada perusahaan angkutan umum. Izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sesuai ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek, dimana izin ini terdiri dari Izin Trayek yang berlaku selama 5 tahun dan Kartu Pengawasan yang berlaku selama 1 tahun. Selain upaya tersebut, dalam rangka penyediaan transportasi untuk mudik lebaran yang tertib, lancar, dan selamat, maka Pemerintah berkewajiban pula untuk melakukan pengecekan (rampcheck) terhadap setiap moda angkutan yang akan digunakan sebagai angkutan lebaran.



Penertiban angkutan umum bersama sama Polda Gorontalo dan Dishub Kab/Kota

Untuk memantau kepadatan maupun tingkat kecelakaan lalu lintas khususnya pada persimpangan Ruas Jalan Provinsi maka pada tahun 2020 melalui Anggaran APBN Kemenhub RI Balai Transportasi Darat Provinsi Gorontalo, Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo mendapatkan 1 Set Perangkat ATCS (Automatic Control System) dimana ATCS tersebut berfungsi untuk memantau tingkat kepadatan maupun kemacetan di 14 Titik Traffic Light yang ada di Kota dan Kab. Gorontalo yang masih berfungsi dengan baik sampai dengan tahun 2025.





Ruang Kendali ATCS 14 Titik di Dinas Perhubungan Prov. Gorontalo

Pada tahun 2025 juga terdapat kegiatan lainnya dengan indikator sasaran strategis Meningkatnya kinerja pengelolaan pelayanan transportasi telah terealisasi 100% dengan output sebanyak 12 laporan, terget ini didukung melalui kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Bongkar Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa, Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Lautatau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas, dimana kegiatan ini difokuskan untuk koordinasi pengembangan perhubungan sektor udara, laut, penyeberangan dan perkeretapiian dan berkoordinasi langsung dengan UPT di bawah Kementerian Perhubungan yaitu Bandara Djalaludin, KSOP Pelabuhan, Pelabuhan Tilamuta, Pelabuhan Anggrek, Pelabuhan Bumbulan, dan Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo. Di bidang perhubungan laut, udara dan penyeberangan intervensi anggaran adalah melalui sumber dana APBN melalui UPT



lingkup Kementerian Perhubungan, dengan hasil capaian kinerja yang telah dicapai pada tahun 2025 yaitu :

Perhubungan Laut

Sektor transportasi laut menjadi salah satu fasilitas Perhubungan yang banyak bersolek sepanjang tahun ini. Program nasional Tol Laut ikut dirasakan warga Gorontalo. Akses transportasi laut semakin mudah dengan penyediaan kapal-kapal pengangkut orang, barang dan ternak yang melayani pelayaran ke berbagai daerah.

Pelabuhan Kwandang di Kabupaten Gorontalo misalnya terdapat 1 (satu) unit Kapal Angkutan Tol Laut Khusus Ternak dengan menggunakan Kapal KM. Camara 05 yang dioperasikan oleh PT. ASDP (Persero) Cabang Balikpapan, dan berpangkalan di Pelabuhan Kwandang Kab. Gorontalo Utara untuk melayani rute Kwandang – Tarakan – Balikpapan/Samarinda – Palu – Balikpapan/Samarinda – Kwandang. Kehadiran Kapal Angkutan Tol Laut Khusus Ternak sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam memasarkan hasil ternaknya ke Pulau Kalimantan. Selain mampu mengangkut ternak dalam jumlah banyak sekali jalan, kapal ini mampu memangkas ongkos transportasi lebih kurang Rp 750 ribu per ekor ke berbagai daerah tetangga dan mendapatkan asuransi jika ternak mati di atas kapal.

Ada juga KM Sabuk Nusantara 97 dengan rute Pelabuhan Kwandang - Palele - Leok - Toli-toli - Tarakan - Nunukan - Pulau Sebatik - Tarakan – Toli-Toli – Leok – Kwandang. Kapal tersebut sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat untuk pendistribusian bahan pokok dan pergerakan orang serta meningkatkan konektivitas wilayah.

Berikutnya Kapal Rede KM. Gandha Nusantara 05 yang melayani masyarakat yang tinggal di pulau Ponelo dan sekitarnya serta melayani wisatawan yang akan berkunjung ke destinasi wisata unggulan Pulau Saronde maupun destinasi wisata lain disekitarnya. KM. Gandha Nusantara 05 merupakan kapal yang pengoperasiannya disubsidi oleh PT. Pelni (Persero) dan masyarakat dapat memanfaatkannya secara gratis.

Di Pelabuhan Gorontalo, tercatat ada empat kapal motor yang melayani berbagai wilayah di Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. KM Daraki Nusa (yang berpangkalan di Pelabuhan Gorontalo) merupakan kapal perintis yang melayani Pelabuhan



Gorontalo - Bunta - Bualemo (Sulteng) - Bobong - Tikong (PP). KM Narita, kapal yang berpangkalan di Poso dan melayani Poso – Wakai –Torosik - Bitung (PP).

Berikutnya KM Sabuk Nusantara 59, kapal perintis yang berpangkalan di Pagimana dan melayani rute Pagimana – Gorontalo – Pasokan – Wakai – Ampana – Una Una – Parigi - Una Una – Ampana –Wakai – Pasokan – Gorontalo – Pagimana – Gorontalo – Banggai – Bobong – Banggai – Gorontalo - Pagimana (PP). KM Sabuk Nusantara 102, kapal perintis yang berpangkalan di Poso dan melayani rute Poso – Ampana – Wakai – Malenge – Popolii – Pasokan – Gorontalo – Bitung (PP).

Terdapat juga layanan transportasi angkutan penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo. Ada Kapal perintis KMP Tuna Tomini yang melayani Gorontalo – Wakai - Ampana – Wakai (PP). Pemprov Gorontalo berhasil meyakinkan pemerintah pusat untuk meningkatkan trip KM Tuna Tomini menjadi tiga kali seminggu yang sebelumnya hanya dua kali dalam seminggu. Selain itu terdapat juga KMP Moinit, merupakan kapal penyeberangan komersil yang melayani Gorontalo – Pagimana (PP) setiap dua hari sekali.

Untuk Pelabuhan Tilamuta di Kabupaten Boalemo, tersedia kapal tol laut KM Kendhaga Nusantara 13 dengan rute Pelabuhan Bitung – Tilamuta – Parigi – Poso – Ampana – Luwuk – Banggai. Keberadaan kapal tol laut tersebut sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena mampu menurunkan disparitas harga yang selama ini dirasakan cukup berat oleh masyarakat, terutama pada komoditas semen yang merupakan muatan utamanya.

Angkutan perintis laut KM Kannon Moon dengan rute Tilamuta – Boalemo – Banggai – Makassar – Banggai – Boalemo –Bumbulan – Tilamuta. Keberadaan kapal tersebut sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Boalemo karena menunjang pendistribusian bahan pokok dan pergerakan orang, meningkatkan konektivitas wilayah serta menurunkan disparitas harga semen(semen dari Makassar). Di Pelabuhan Penyeberangan Marisa terdapat kapal komersil KM Cengkeh Afo, yang melayani rute Marisa-Pasokan-Dolong-Ampana (PP) yang juga berhasil ditingkatkan tripnya menjadi dua kali dalam seminggu dimana sebelumnya hanya sekali dalam seminggu.



KM. Camara Nusantara 05



KM. Darakinusa



Bapak Gubernur Gorontalo bersama Bapak Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo melakukan pemantauan Posko Angkutan Natal tahun 2025 dan Tahun baru 2026

Capaian produktivitas arus penumpang dan barang di 4 (empat) Pelabuhan yang ada di Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini :

**ARUS PENUMPANG DI PELABUHAN
PROVINSI GORONTALO
PER TAHUN 2025**

NO	PELABUHAN	2025		PERIODE
		TURUN	NAIK	
1	PELABUHAN GORONTALO	55.360	57.171	2025
2	PELABUHAN ANGGREK	-	-	2025
3	PELABUHAN KWANDANG	1.433	1.468	2025
4	PELABUHAN TILAMUTA	1.264	2.436	2025
5	PELABUHAN BUMBULAN	-	-	2025
JUMLAH		58.057	61.075	



**BONGKAR MUAT DI PELABUHAN
PROVINSI GORONTALO
PER TAHUN 2025**

NO	PELABUHAN	2025					
		BONGKAR (TON)	MUAT (TON)	EXPORT (TON)	IMPORT (TON)	BONGKAR HEWAN	MUAT HEWAN
1	PELABUHAN GORONTALO	672836	255558			0	0
2	PELABUHAN ANGGREK	369615,585	363552,5	92508	4121	0	0
3	PELABUHAN KWANDANG	237689,4976	142674,8177	-	-	350	3357
4	PELABUHAN TILAMUTA	77254	19308,94	-	-	0	0
5	PELABUHAN BUMBULAN	0	0	-	0	0	0
	JUMLAH	1357395,083	781094,2577	92508	4121	0	3357

**AKTIFITAS PELABUHAN GORONTALO
TAHUN 2025**

No.	Bulan	Kapal		Barang		Penumpang		Keg. Konteiner Berisi		Keg. Konteiner Kosong	
		Tiba	Berangkat	Bongkar (Ton)	Muat (Ton)	Turun (Org)	Naik (Org)	Bongkar (TEUS)	Muat (TEUS)	Bongkar (TEUS)	Muat (TEUS)
1	Januari	53	53	68.540	23.310	3.610	5.058	1.980	1.000	-	1.253
2	Pebruari	44	44	53.714	28.237	3.280	2.436	2.006	1.079	16	590
3	Maret	58	58	53.642	31.612	3.384	5.062	1.888	805	-	1.143
4	April	66	66	66.237	24.217	7.198	6.635	1.814	863	-	1.028
5	Mei	75	75	77.291	34.921	4.335	5.155	2.406	1.225	-	1.074
6	Juni	85	85	66.753	35.880	8.205	8.164	1.874	870	-	1.520
7	Juli	71	71	86.483	15.916	8.180	7.741	2.477	373	-	1.588
8	Agustus	68	68	62.481	21.807	6.407	6.051	1.936	695	-	1.544
9	September	70	70	64.744	16.855	5.454	5.450	2.257	524	-	1.391
10	Oktober	69	69	72.951	22.803	5.307	5.419	2.610	733	-	1.946
11	November										
12	Desember										
	Jumlah	659	659	672.836	255.558	55.360	57.171	21.248	8.167	16	13.077

**AKTIFITAS PELABUHAN ANGGREK
TAHUN 2025**

No.	Bulan	Kapal		Barang (Ton/M ³)				Penumpang		Hewan		Keg. Konteiner	
		Tiba	Berangkat	Bongkar (Ton)	Muat (Ton)	Import (Ton)	Export (Ton)	Turun (Org)	Naik (Org)	Turun (Ekor)	Naik (Ekor)	Bongkar (TEUS)	Muat (TEUS)
1	Januari	18	16	34	18.787	1.475	-	-	-	-	-	838	947
2	Pebruari	20	16	30.955	33.115	-	10.320	-	-	-	-	1.521	1.462
3	Maret	25	18	39.831	43.930	-	-	-	-	-	-	1.870	1.636
4	April	15	11	26.017	38.297	-	10.429	-	-	-	-	900	1.013
5	Mei	19	16	30.354	52.188	-	15.314	-	-	-	-	2.670	2.443
6	Juni	18	13	38.257	21.120	-	-	-	-	-	-	1.025	1.246
7	Juli	20	15	31.059	27.411,0	-	10.999	-	-	-	-	975	-
8	Agustus	24	18	44.334	23.353	1.911	12.001	-	-	-	-	1.119	1.203
9	September	26	18	52.841	30.372	-	-	-	-	-	-	1.582	1.335
10	Oktober	21	15	31.238	39.750	-	-	-	-	-	-	1.404	1.609
11	November	15	12	29.085	15.082	-	22.945	-	-	-	-	849	1.001
12	Desember	14	14	15.611	20.147	735	10.500	-	-	-	-	1.017	924
	Jumlah	235	182	369.616	363.553	4.121	92.508	-	-	-	-	15770	14819

**AKTIFITAS PELABUHAN KWANDANG
TAHUN 2025**

No	Bulan	Kapal		Barang		Hewan		Penumpang		Ket.
		Tiba	Berangkat	Bongkar (Ton)	Muat (Ton)	Bongkar (Ekor)	Muat (Ekor)	Turun (Org)	Naik (Org)	
1	Januari	22	22	32,3	8	-	-	90	101	
2	Pebruari	8	8	2,5	1,0	-	-	44	33	
3	Maret	22	19	51	7	-	301	172	100	
4	April	25	21	30,5	16.989	-	232	124	167	
5	Mei	32	30	50	39	-	1.487	128	188	
	Juni	27	20	40.006	22.954,3	-	100	128	82	
7	Juli	24	20	42.600	7.420	-	272	192	225	
8	Agustus	21	17	21.652	70.498	-	199	133	116	
9	September	18	15	32.000	473	-	360	115	147	
10	Oktober	22	16	31.027	2.597	350	207	147	181	
11	November	15	12	29.085	15.082	-	-	-	-	
12	Desember	26	16	41.153	6.606	-	199	160	128	
	Jumlah	262	216	237.689,50	142.675	350	3.357	1433	1468	



**AKTIFITAS PELABUHAN TULAMUTA
TAHUN 2025**

No	Bulan	Kapal		Barang		Luar Negeri		Hewan		Penumpang	
		Tiba	Berangkat	Bongkar (Ton)	Muat (Ton)	Import (Ton)	Eksport (Ton)	Turun (Ekor)	Muat (Ekor)	Turun (Org)	Naik (Org)
1	Januari	3	3		8.000	-	-	-	-	121	302
2	Pebruari	2	2	4	2	-	-	-	-	54	106
3	Maret	4	4	4.950	-	-	-	-	-	125	251
4	April	3	3	-	-	-	-	-	-	125	251
5	Mei	3	3		4.295	-	-	-	-	48	100
6	Juni	4	4	800	-	-	-	-	-	151	338
7	Juli	3	3	-	2.003	-	-	-	-	105	162
8	Agustus	4	4	66.000	-	-	-	-	-	170	227
9	September	5	5	-	1.955	-	-	-	-	146	262
10	Oktober	3	3	2.500	-	-	-	-	-	88	115
11	November	3	3	3.000	-	-	-	-	-	36	157
12	Desember	4	4	-	3.054	-	-	-	-	95	165
Jumlah		41	41	77.254	19.309	0	0	0	0	1264	2436

**AKTIFITAS PELABUHAN BUMBULAN
TAHUN 2025**

No	Bulan	Kapal		Dalam Negeri		Luar Negeri		Hewan		Penumpang	
		Tiba	Berangkat	Bongkar (Ton)	Muat (Ton)	Bongkar (Ton)	Muat (Ton)	Bongkar (Ekor)	Muat (Ekor)	Turun (Org)	Naik (Org)
1	Januari	7	7	6.090	4.900	-	-	-	-	55	-
2	Pebruari	6	6	5.744	4.900	-	-	-	-	40	8
3	Maret	4	4	5.118	2.500	-	-	-	-	51	-
4	April	6	6	5.570	2.500	-	-	-	-	162	15
5	Mei	18	18	5.659	5.000	-	-	-	-	284	365
6	Juni	18	18	13.889	200	-	-	-	-	395	413
7	Juli	16	16	8.569	5.000	-	-	-	-	400	493
8	Agustus	21	21	2.385	4.999	-	-	-	-	468	374
9	September	16	16	13.552	2.500	-	-	-	-	303	312
10	Oktober	16	16	7.431	2.500	-	-	-	-	308	357
11	November	18	18	5.733	5.789	-	-	-	-	495	522
12	Desember	19	19	13.449	9.609	-	-	-	-	563	557
Jumlah											

Perhubungan Udara

Di sektor perhubungan udara Pemerintah Provinsi Gorontalo juga fokus untuk mendorong penyelesaian pembangunan Bandara Pohnwato dengan anggaran 369 Milyar. Mulai dari tahun 2023 telah dilakukan Penyiapan Badan Runway, Pemenuhan Runway Strip, Infrastruktur sisi darat, Konstruksi landasan pacu. Pemerintah Provinsi Gorontalo berhasil meyakinkan Pemerintah Pusat untuk memprioritaskan Bandara Pohnwato sebagai salah satu bandara dari total sepuluh bandara yang akan dioperasikan pada periode 2020 – 2025 dan sekarang pada tahun 2025 Bandara Pohnwato sudah beroperasi dimana pada tahun 2025 telah terdapat penerbangan subsidi angkutan udara perintis yang melayani rute



Gorontalo – Bolmong, Gorontalo – Manado, Manado – Siau, Siau – Miangas, Miangas – Melonguane, Melonguane – Miangas, Miangas – Naha, Naha – Siau, Siau – Manado, Manado – Bolmong, Bolmong – Gorontalo, Gorontalo- Buol, Buol – Gorontalo, Gorontalo – Bolmong, Bolmong – Manado, Manado – Bolmong, Bolmong – Gorontalo, Gorontalo – Buol, Buol – Gorontalo, Gorontalo - Pohuwato Pohuwato – Palu, Palu – Pohuwato, Pohuwato – Gorontalo, Gorontalo – Pohuwato, Pohuwato – Palu, Palu – Pohuwato, Pohuwato – Gorontalo, Gorontalo – Bolmong, Bolmong - Manado

Untuk Bandara Djalaluddin berfokus pada pengembangan infrastruktur untuk mendukung kesiapan Bandara Djalaluddin Gorontalo menuju Embarkasih Haji Penuh (dengan *supporting* pesawat wide body B777-300ER). Pada tahun 2025 frekuensi penerbangan sudah normal kembali sehingga capaian arus pesawat masuk dan penumpang sudah mulai stabil di tahun 2025, maskapai yang beroperasi saat ini adalah Garuda Indonesia, Lion Air, Batik Air, dan Wings Air.

Pada tahun 2025 pelaksanaan Haji telah dilaksanakan dan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo mendukung pelaksanaan haji setiap tahunnya.



Kegiatan Pemberangkatan dan Pemulangan Musim Haji 2025



3. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun yang Lalu

Capaian kinerja tujuan strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo dari indikator kinerja pertumbuhan ekonomi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.6 di bawah ini:

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 dengan beberapa tahun lalu

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Capaian				
		2021	2022	2023	2024	2025
Terwujudnya Pengembangan Wilayah dan Konektivitas Perkotaan dan Pedesaan	Pertumbuhan ekonomi	2,41	4,04	4,50	4,13	5.71

Perkembangan indikator Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Gorontalo selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 2,41%, yang merupakan fase pemulihan ekonomi setelah dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi daerah. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 4,04%, yang menunjukkan mulai pulihnya aktivitas produksi dan perdagangan di daerah. Selanjutnya pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi kembali mengalami peningkatan menjadi 4,50%, yang didorong oleh peningkatan aktivitas pada beberapa sektor utama seperti pertanian, perdagangan, dan konstruksi. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,13%, yang masih menunjukkan stabilitas perekonomian daerah meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Memasuki tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo menunjukkan kinerja yang lebih baik dengan realisasi sebesar 5,71%, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 5,54%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan daerah, termasuk peningkatan



konektivitas wilayah serta kelancaran mobilitas transportasi, turut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Selanjutnya untuk mendukung pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah, capaian kinerja tujuan strategis Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo dari indikator kinerja Ratio Konektivitas antar wilayah dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.7 di bawah ini :

Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo Tahun 2025 dengan beberapa Tahun Lalu

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja		Capaian					
			2021	2022	2023	2024	2025	
Terwujudnya Pengembangan Wilayah dan Konektivitas Perkotaan dan Pedesaan	1	Proporsi kontribusi PDRB Provinsi Gorontalo terhadap Nasional	%	0.24	0.24	0.25	0.25	0.25

Perkembangan indikator Proporsi Kontribusi PDRB Provinsi Gorontalo terhadap Nasional selama periode 2021–2025 menunjukkan kondisi yang relatif stabil. Pada tahun 2021 kontribusi PDRB Provinsi Gorontalo terhadap perekonomian nasional tercatat sebesar 0,24%, yang merupakan periode pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19 yang berdampak pada aktivitas ekonomi daerah. Pada tahun 2022, kontribusi tersebut masih berada pada kisaran 0,24%, menunjukkan bahwa perekonomian daerah mulai pulih secara bertahap.

Selanjutnya pada tahun 2023, kontribusi PDRB Provinsi Gorontalo terhadap nasional meningkat menjadi 0,25%, seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi daerah yang didorong oleh sektor pertanian, perdagangan, dan konstruksi. Kondisi tersebut relatif stabil pada tahun 2024 dengan kontribusi sebesar 0,25%.

Pada tahun 2025, target kontribusi PDRB Provinsi Gorontalo terhadap nasional ditetapkan sebesar 0,25% dan realisasi yang dicapai juga sebesar 0,25%, sehingga tingkat capaian



indikator mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi perekonomian Provinsi Gorontalo terhadap perekonomian nasional tetap terjaga dan stabil.

Stabilnya kontribusi tersebut juga didukung oleh berbagai kebijakan pembangunan daerah, termasuk peningkatan konektivitas wilayah, kelancaran mobilitas masyarakat, serta distribusi barang dan jasa yang turut mendorong aktivitas ekonomi di Provinsi Gorontalo. Lebih lanjut untuk mendukung pencapaian tujuan strategis Dinas Perhubungan, capaian kinerja sasaran strategis Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo dari indikator Persentase konektivitas pelayanan transportasi, Persentase fatalitas kecelakaan lalu lintas dan V/C Rasio di jalan Provinsi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.8 di bawah ini.

Tabel 3.8 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo Tahun 2025 dengan Tahun Lalu

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian				
		2021	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya Kualitas Transportasi Darat	1 Rasio Konektivitas Darat	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	2 Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	48.27	48.27	48.27	48.27	48.59
	3 Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan	1	1	2	2	2



Meningkatnya Kualitas Transportasi Laut	1	Rasio Konektivitas Laut	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	2	Rasio Konektivitas Antar Wilayah	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	3	Persentase Pelayanan Jasa terkait Angkutan di Perairan	30 %	30 %	40 %	40 %	40 %

Dari tabel diatas capaian indikator kinerja Meningkatnya Kualitas Transportasi Darat dari tahun 2021 sampai tahun 2025 untuk indikator Rasio Konektivitas Darat adalah 100 % karena Berdasarkan data capaian indikator kinerja pada periode 2021–2025, secara umum kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo dalam mendukung sasaran Meningkatnya Kualitas Transportasi Darat dan Transportasi Laut menunjukkan kondisi yang relatif stabil dengan beberapa peningkatan pada indikator tertentu.

Pada sasaran Meningkatnya Kualitas Transportasi Darat, indikator Rasio Konektivitas Darat selama periode 2021 hingga 2025 menunjukkan nilai yang konsisten sebesar 0,50. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keterhubungan jaringan transportasi darat di wilayah Provinsi Gorontalo tetap terjaga dan mampu mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi barang antar wilayah secara relatif stabil.

Selanjutnya pada indikator Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal, capaian pada tahun 2021 hingga 2024 berada pada angka 48,27%, dan pada tahun 2025 mengalami peningkatan menjadi 48,59%. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan dalam meningkatkan penyediaan fasilitas keselamatan jalan, seperti rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta perlengkapan keselamatan lainnya pada ruas jalan provinsi.

Sementara itu, indikator Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan menunjukkan tren peningkatan dari 1 perusahaan pada



tahun 2021 dan 2022, kemudian meningkat menjadi 2 perusahaan pada tahun 2023 dan tetap bertahan hingga tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran serta komitmen dari penyelenggara angkutan umum dalam menerapkan standar keselamatan transportasi melalui penerapan Sistem Manajemen Keselamatan.

Pada sasaran Meningkatkan Kualitas Transportasi Laut, indikator Rasio Konektivitas Laut dan Rasio Konektivitas Antar Wilayah selama periode 2021 hingga 2025 menunjukkan nilai yang stabil sebesar 0,50. Kondisi ini mencerminkan bahwa tingkat konektivitas transportasi laut dan hubungan antar wilayah tetap terjaga dengan baik dalam mendukung mobilitas penumpang maupun distribusi barang melalui jalur perairan.

Adapun pada indikator Persentase Pelayanan Jasa terkait Angkutan di Perairan, capaian pada tahun 2021 dan 2022 sebesar 30%, kemudian mengalami peningkatan menjadi 40% pada tahun 2023 dan tetap stabil hingga tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya peningkatan kualitas pelayanan jasa transportasi di sektor perairan yang mendukung kelancaran aktivitas transportasi laut di Provinsi Gorontalo.

Secara keseluruhan, tren capaian indikator pada kedua sasaran strategis tersebut menunjukkan bahwa kualitas layanan transportasi darat dan transportasi laut di Provinsi Gorontalo dapat dipertahankan dengan baik, bahkan mengalami peningkatan pada beberapa indikator yang berkaitan dengan keselamatan transportasi dan pelayanan jasa transportasi.

4. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Capaian kinerja tujuan strategis pemerintah Provinsi Gorontalo dari indikator kinerja pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan target RPJMD dapat dilihat pada tabel 3.9 di bawah ini:



Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2025 dengan Target jangka Menengah dalam Dokumen RPJMD

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja		Target RPJMD	Realisasi sampai dengan Tahun 2025	Capaian (%)	Kriteria/ Kode
Terwujudnya Pengembangan Wilayah dan Konektivitas Perkotaan dan Pedesaan	1	Pertumbuhan ekonomi	5.54	5.71	100	

Dari tabel tersebut di atas capaian dari indikator kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo dibandingkan dengan target RPJMD pada tahun 2025 ini capaian kinerjanya sebesar 100 % dengan kriteria sangat baik. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pembangunan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berjalan dengan baik. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh berkembangnya berbagai sektor ekonomi daerah serta semakin baiknya konektivitas wilayah yang mendorong kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi barang dan jasa.

Upaya peningkatan konektivitas wilayah, baik antara kawasan perkotaan maupun pedesaan, turut memberikan kontribusi dalam memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan semakin baiknya aksesibilitas dan keterhubungan antar wilayah, diharapkan dapat membuka peluang pengembangan potensi ekonomi daerah, meningkatkan aktivitas perdagangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Gorontalo

Selanjutnya untuk mendukung pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah tersebut capaian kinerja tujuan strategis Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo dari indikator kinerja Proporsi Kontribusi PDRB Provinsi Gorontalo terhadap nasional dibandingkan dengan target Renstra dapat dilihat pada tabel 3.10 di bawah ini:



Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2025 dengan Target jangka Menengah dalam Dokumen Renstra

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja		Target Renstra	Realisasi sampai dengan Tahun 2025	Capaian (%)	Kriteria/ Kode	
Terwujudnya Pengembangan Wilayah dan Konektivitas Perkotaan dan Pedesaan	1	Proporsi kontribusi PDRB Provinsi Gorontalo terhadap Nasional	%	0.25	0.25	100 %	

Dari tabel tersebut diatas capaian dari indikator kinerja Proporsi Kontribusi PDRB Provinsi Gorontalo terhadap nasional dibandingkan dengan target Renstra pada tahun 2025 ini capaiannya sebesar 100 % sesuai dengan target Renstra. Tujuan strategis Terwujudnya Pengembangan Wilayah dan Konektivitas Perkotaan dan Pedesaan juga diukur melalui indikator kinerja Proporsi Kontribusi PDRB Provinsi Gorontalo terhadap Nasional. Berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam Renstra, pada tahun 2025 kontribusi PDRB Provinsi Gorontalo terhadap perekonomian nasional ditargetkan sebesar 0,25%. Hingga akhir tahun 2025, realisasi yang dicapai juga sebesar 0,25%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kontribusi perekonomian Provinsi Gorontalo terhadap perekonomian nasional dapat dipertahankan secara stabil sesuai dengan target yang telah direncanakan. Stabilitasnya kontribusi ini mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi daerah tetap berjalan dengan baik serta didukung oleh berbagai sektor ekonomi utama di daerah.

Selain itu, upaya peningkatan konektivitas wilayah melalui penguatan sistem transportasi, baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan, turut mendukung kelancaran mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut diharapkan dapat terus mendorong perkembangan ekonomi daerah serta menjaga kontribusi Provinsi Gorontalo terhadap perekonomian nasional secara berkelanjutan.



Lebih lanjut untuk mendukung pencapaian tujuan strategis Dinas Perhubungan, capaian kinerja sasaran strategis Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo dari indikator kinerja Meningkatnya Kualitas Transportasi Darat dan Meningkatnya Kualitas Transportasi Laut dibandingkan dengan target Renstra dapat dilihat pada tabel 3.11 di bawah ini:

Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi sampai dengan Tahun 2025	Capaian (%)	Kriteria/ Kode
Meningkatnya Kualitas Transportasi Darat	Rasio Konektivitas Darat	0,50	0,50	100 %	
	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	48.27	48.59	100 %	
	Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan	2	2	100 %	
Meningkatnya Kualitas Transportasi Laut	Rasio Konektivitas Laut	0,50	0,50	100 %	
	Rasio Konektivitas Antar Wilayah	0,50	0,50	100 %	
	Persentase Pelayanan Jasa terkait Angkutan di Perairan	40 %	40 %	100 %	

Berdasarkan capaian kinerja sampai dengan tahun 2025, sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Transportasi Darat dan Meningkatnya Kualitas Transportasi Laut menunjukkan hasil yang sangat baik, dimana seluruh indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra dengan tingkat capaian sebesar 100%. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo dalam meningkatkan kualitas pelayanan transportasi serta memperkuat konektivitas wilayah.



Pada sasaran Meningkatkan Kualitas Transportasi Darat, tercapainya indikator Rasio Konektivitas Darat sebesar 0,50 dipengaruhi oleh terjaganya keterhubungan jaringan transportasi darat antar wilayah di Provinsi Gorontalo yang didukung oleh pengelolaan jaringan trayek angkutan umum serta koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi barang.

Pencapaian indikator Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal yang mencapai 48,59% juga didukung oleh pelaksanaan kegiatan pengadaan, pemasangan, serta pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan, seperti rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas (traffic light), warning light, serta pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) pada ruas jalan provinsi. Upaya tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan anggaran dan prioritas kebutuhan di lapangan guna meningkatkan keselamatan dan ketertiban lalu lintas.

Selain itu, tercapainya indikator Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan juga dipengaruhi oleh adanya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap perusahaan angkutan umum. Melalui pembinaan tersebut, perusahaan angkutan umum didorong untuk menerapkan standar keselamatan transportasi melalui penerapan Sistem Manajemen Keselamatan sehingga dapat meningkatkan keselamatan operasional angkutan umum. Sementara itu, pada sasaran Meningkatkan Kualitas Transportasi Laut, tercapainya indikator Rasio Konektivitas Laut dan Rasio Konektivitas Antar Wilayah sebesar 0,50 dipengaruhi oleh terjaganya konektivitas transportasi antar wilayah yang didukung oleh keberadaan simpul transportasi laut yang berfungsi dalam melayani mobilitas penumpang maupun distribusi barang.

Pada indikator Persentase Pelayanan Jasa terkait Angkutan di Perairan yang mencapai 40%, capaian tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya pelayanan jasa transportasi di sektor perairan melalui pengawasan kegiatan angkutan laut serta koordinasi dengan instansi terkait dalam mendukung kelancaran operasional transportasi laut di wilayah Provinsi Gorontalo.

Selain faktor program dan kegiatan yang dilaksanakan, pencapaian indikator kinerja tersebut juga didukung oleh sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta pemangku kepentingan di sektor transportasi, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan



dapat berjalan secara efektif dalam mendukung peningkatan kualitas transportasi di Provinsi Gorontalo.

Dengan tercapainya seluruh indikator kinerja pada kedua sasaran strategis tersebut, diharapkan kualitas pelayanan transportasi di Provinsi Gorontalo dapat terus ditingkatkan sehingga mampu mendukung peningkatan konektivitas wilayah, kelancaran mobilitas masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Keberhasilan capaian karena didukung oleh beberapa program dan kegiatan yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi, Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi dan Program Pengelolaan Pelayanan kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas. Program dan Kegiatan tersebut yang kegiatan tersebut mendukung konektivitas baik darat, laut dan udara dan kegiatan Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B Sub Kegiatan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang.

5. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional

Capaian kinerja tujuan strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo dari indikator kinerja pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan standar nasional dapat dilihat pada tabel 3.12 di bawah ini:

Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Pemprov Gorontalo	Standar Nasional	Capaian (%)
Terwujudnya Pengembangan Wilayah dan Konektivitas Perkotaan dan Pedesaan	1 Pertumbuhan ekonomi (%)	5.71	5.11	100



Dari tabel tersebut di atas capaian dari indikator kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo dibandingkan dengan standar nasional pada tahun 2025 ini Capaian indikator Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup baik jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo pada tahun 2025 tercatat sebesar 5,71%, sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional berada pada kisaran 5,11%. Dengan demikian, kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo berada di atas rata-rata nasional.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di Provinsi Gorontalo berkembang dengan cukup baik dan mampu tumbuh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh berkembangnya sektor-sektor ekonomi utama daerah serta semakin baiknya konektivitas wilayah yang mendorong kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi barang dan jasa

Selanjutnya untuk mendukung pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah, capaian kinerja tujuan strategis Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo dari indikator kinerja dibandingkan dengan standar nasional dapat dilihat pada tabel 3.13 di bawah ini.

Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja		Realisasi Kinerja Dishub Provinsi Gorontalo	Standar Nasional	Capaian (%)	
Terwujudnya Pengembangan Wilayah dan Konektivitas Perkotaan dan Pedesaan	1	Proporsi kontribusi PDRB Provinsi Gorontalo terhadap Nasional	%	0,25	0,67	80.60 %



Dari tabel tersebut di atas capaian dari indikator kinerja Proporsi kontribusi PDRB Provinsi Gorontalo terhadap nasional Realisasi Kinerja adalah 0,25 dibandingkan dengan Standar Nasional 0,67 dengan capaian sebesar 80.60 %.

Lebih lanjut untuk mendukung pencapaian tujuan strategis Dinas Perhubungan, capaian kinerja sasaran strategis Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo dari indikator kinerja Meningkatnya Kualitas Transportasi Darat dan Meningkatnya Kualitas Transportasi Laut, dibandingkan dengan standar nasional dapat dilihat pada tabel 3.14 di bawah ini:

Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Dishub Provinsi Gorontalo	Standar Nasional	Capaian (%)
Meningkatnya Kualitas Transportasi Darat	Rasio Konektivitas Darat	0,50 Rasio	0,77 Rasio	64,94 %
	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	48.59 %	100 %	48,59 %
	Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan	2 Perusahaan	2 Perusahaan	100 %
Meningkatnya Kualitas Transportasi Laut	Rasio Konektivitas Laut	0,50 Rasio	0,95 Rasio	52,63 %
	Rasio Konektivitas Antar Wilayah	0,50 Rasio	0,77 Rasio	64,94 %
	Persentase Pelayanan Jasa terkait Angkutan di Perairan	40 %	100 %	40 %

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja dengan standar nasional, secara umum indikator kinerja pada sasaran Meningkatnya Kualitas Transportasi Darat dan Transportasi Laut menunjukkan capaian yang cukup baik meskipun masih terdapat beberapa indikator yang perlu ditingkatkan untuk mendekati standar nasional.

Pada sasaran Meningkatnya Kualitas Transportasi Darat, indikator Rasio Konektivitas Darat menunjukkan capaian sebesar 0,50 dibandingkan dengan standar



nasional sebesar 0,77, sehingga tingkat capaian mencapai 64,94%. Hal ini menunjukkan bahwa konektivitas jaringan transportasi darat di Provinsi Gorontalo sudah berjalan cukup baik dalam mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang antar wilayah, namun masih memerlukan peningkatan untuk mencapai tingkat konektivitas yang lebih optimal. Sementara itu, indikator Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal mencapai 48,59% dari standar nasional yang mengarah pada pemenuhan kondisi ideal sebesar 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan fasilitas keselamatan jalan masih perlu ditingkatkan melalui kegiatan pengadaan, pemasangan, serta pemeliharaan perlengkapan jalan seperti rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan fasilitas keselamatan lainnya.

Pada indikator Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan, capaian yang diperoleh telah memenuhi standar yang ditetapkan, yaitu sebanyak 2 perusahaan yang telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan, sehingga tingkat capaian indikator ini mencapai 100%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dari penyelenggara angkutan umum dalam menerapkan standar keselamatan operasional transportasi.

Pada sasaran Meningkatnya Kualitas Transportasi Laut, indikator Rasio Konektivitas Laut menunjukkan capaian sebesar 0,50 dibandingkan dengan standar nasional sebesar 0,95, sehingga tingkat capaian mencapai 52,63%. Kondisi ini menunjukkan bahwa konektivitas transportasi laut masih perlu ditingkatkan guna mendukung mobilitas penumpang serta distribusi barang melalui jalur perairan. Dikarenakan Provinsi Gorontalo tidak mengelola Pelabuhan.

Indikator Rasio Konektivitas Antar Wilayah menunjukkan capaian sebesar 0,50 dibandingkan dengan standar nasional sebesar 0,77, sehingga capaian indikator ini mencapai 64,94%. Hal ini menunjukkan bahwa konektivitas antar wilayah di Provinsi Gorontalo sudah berjalan cukup baik namun masih memerlukan penguatan melalui peningkatan integrasi antar moda transportasi.

Adapun indikator Persentase Pelayanan Jasa terkait Angkutan di Perairan mencapai 40% dari standar pelayanan yang mengarah pada pemenuhan layanan secara optimal sebesar 100%. Oleh karena itu, peningkatan pelayanan jasa transportasi di sektor



perairan masih perlu terus dilakukan melalui peningkatan pengawasan operasional transportasi laut serta koordinasi dengan instansi terkait.

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja tersebut menunjukkan bahwa kualitas transportasi di Provinsi Gorontalo telah berkembang dengan cukup baik, namun masih diperlukan berbagai upaya peningkatan guna mendukung konektivitas wilayah serta meningkatkan kualitas pelayanan transportasi secara lebih optimal.

6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Terwujudnya Pengembangan Wilayah dan Konektivitas Perkotaan dan Pedesaan dengan indikator kinerja pertumbuhan ekonomi

Sasaran strategis Terwujudnya Pengembangan Wilayah dan Konektivitas Perkotaan dan Pedesaan dengan indikator kinerja Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan capaian yang sangat baik pada tahun 2025, dimana realisasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo sebesar 5,71%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 5,54%. Pencapaian ini menunjukkan bahwa pembangunan daerah berjalan dengan baik serta didukung oleh meningkatnya aktivitas ekonomi di berbagai sektor.

Kinerja Dinas Perhubungan memiliki keterkaitan yang cukup erat dengan pencapaian indikator tersebut, khususnya dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa. Melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan, seperti penyediaan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan, peningkatan konektivitas jaringan transportasi darat, serta dukungan terhadap pengembangan simpul transportasi laut dan udara, Dinas Perhubungan berperan dalam menciptakan sistem transportasi yang lebih aman, tertib, dan efisien.

Peningkatan kualitas transportasi dan konektivitas wilayah tersebut memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Akses transportasi yang lebih baik memungkinkan masyarakat untuk menjangkau pusat-



pusat ekonomi dengan lebih mudah, memperlancar distribusi hasil produksi dari daerah ke pasar, serta mendukung kelancaran arus logistik antar wilayah. Kondisi ini secara tidak langsung mendorong peningkatan produktivitas masyarakat dan memperkuat aktivitas perdagangan di daerah.

Selain itu, keberadaan infrastruktur transportasi yang memadai juga dapat membuka akses bagi pengembangan potensi ekonomi di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Dengan semakin baiknya konektivitas wilayah, potensi sumber daya daerah dapat dimanfaatkan secara lebih optimal sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah di masa mendatang, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana transportasi pada beberapa wilayah, belum optimalnya integrasi antar moda transportasi, serta keterbatasan akses transportasi menuju kawasan produksi dan distribusi barang.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo terus melakukan berbagai upaya peningkatan kinerja, antara lain melalui peningkatan penyediaan fasilitas keselamatan jalan, penguatan konektivitas jaringan transportasi antar wilayah, serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam pengembangan sarana dan prasarana transportasi strategis seperti pelabuhan dan bandar udara. Upaya tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan aksesibilitas wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta memperkuat sistem distribusi barang dan jasa yang pada akhirnya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

b. Terwujudnya Pengembangan Wilayah dan Konektivitas Perkotaan dan Pedesaan dengan Indikator Kinerja Proporsi Kontribusi PDRB Provinsi Gorontalo terhadap Nasional

Pada sasaran strategis Terwujudnya Pengembangan Wilayah dan Konektivitas Perkotaan dan Pedesaan dengan indikator kinerja Proporsi Kontribusi PDRB Provinsi Gorontalo terhadap Nasional, realisasi pada tahun 2025 tercatat sebesar 0,25%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi



perekonomian Provinsi Gorontalo terhadap perekonomian nasional dapat dipertahankan secara stabil.

Keberhasilan pencapaian indikator tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari sisi internal maupun eksternal. Dari sisi internal, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan konektivitas wilayah melalui pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi, khususnya pada jaringan transportasi darat yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Upaya tersebut dilakukan melalui pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan jalan, pemeliharaan perlengkapan jalan, serta peningkatan kualitas pelayanan transportasi darat guna mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang antar wilayah.

Selain itu, dukungan terhadap konektivitas transportasi laut dan udara juga turut berperan dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah. Meskipun pengelolaan pelabuhan dan bandar udara berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Perhubungan tetap melakukan koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait guna mendukung kelancaran operasional transportasi di wilayah Provinsi Gorontalo.

Dari sisi faktor eksternal, stabilnya kontribusi PDRB Provinsi Gorontalo terhadap nasional juga dipengaruhi oleh perkembangan sektor-sektor ekonomi utama daerah seperti sektor pertanian, perdagangan, dan konstruksi yang menjadi penopang utama perekonomian daerah. Aktivitas ekonomi pada sektor-sektor tersebut turut memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB daerah sehingga mampu menjaga stabilitas kontribusi ekonomi daerah terhadap perekonomian nasional.

Meskipun capaian indikator telah mencapai target yang ditetapkan, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, antara lain masih terbatasnya skala ekonomi daerah dibandingkan dengan provinsi lain yang memiliki kapasitas ekonomi lebih besar, serta belum optimalnya konektivitas transportasi menuju beberapa kawasan produksi dan distribusi barang.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo terus melakukan berbagai upaya peningkatan kinerja, antara lain melalui



peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan transportasi, penguatan konektivitas antar wilayah, serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam pengembangan sarana dan prasarana transportasi strategis. Melalui upaya tersebut diharapkan konektivitas wilayah dapat semakin meningkat sehingga mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat serta meningkatkan kontribusi perekonomian Provinsi Gorontalo terhadap perekonomian nasional secara berkelanjutan.

c. Meningkatnya Kualitas Transportasi Darat dengan Indikator Kinerja Rasio Konektivitas Transportasi Darat

Pada sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Transportasi Darat dengan indikator kinerja Rasio Konektivitas Transportasi Darat, capaian kinerja menunjukkan hasil yang baik dimana nilai rasio konektivitas transportasi darat mencapai 0,50 sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keterhubungan jaringan transportasi darat di Provinsi Gorontalo telah berjalan secara optimal dalam mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi barang antar wilayah.

Keberhasilan pencapaian indikator ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dari sisi faktor internal, Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo secara konsisten melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas layanan transportasi darat, antara lain melalui penguatan jaringan trayek angkutan umum, peningkatan fasilitas keselamatan jalan, serta pemeliharaan perlengkapan jalan seperti rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan fasilitas pendukung lainnya pada ruas jalan provinsi. Upaya tersebut berperan dalam menjaga kelancaran arus lalu lintas serta meningkatkan aksesibilitas antar wilayah.

Selain itu, koordinasi dan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota serta instansi terkait juga menjadi faktor pendukung dalam menjaga keterhubungan jaringan transportasi darat. Kolaborasi tersebut penting dalam memastikan keterpaduan sistem transportasi antar wilayah sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien.



Dari sisi faktor eksternal, perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat serta meningkatnya kebutuhan mobilitas juga turut mendorong optimalnya pemanfaatan jaringan transportasi darat yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan jaringan transportasi darat memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan pelayanan masyarakat di Provinsi Gorontalo.

Meskipun capaian indikator telah mencapai target yang ditetapkan, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, antara lain keterbatasan infrastruktur transportasi pada beberapa wilayah, belum optimalnya integrasi antar moda transportasi, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung transportasi yang dapat mempengaruhi tingkat konektivitas wilayah secara keseluruhan.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas konektivitas transportasi darat ke depan, Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo terus melakukan berbagai langkah perbaikan, antara lain melalui peningkatan penyediaan fasilitas keselamatan jalan, penguatan sistem transportasi darat yang terintegrasi, serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengembangan infrastruktur transportasi. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan konektivitas transportasi darat di Provinsi Gorontalo dapat terus meningkat sehingga mampu mendukung mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi barang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

d. Meningkatkan Kualitas Transportasi Darat dengan Indikator Kinerja Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal

Persentase perlengkapan jalan yang terpasang terhadap kondisi ideal merupakan indikator penting dalam mengukur kualitas penyelenggaraan transportasi darat, khususnya dalam mendukung keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Provinsi Gorontalo. Capaian indikator ini menunjukkan sejauh mana ketersediaan fasilitas keselamatan jalan seperti rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL), serta fasilitas perlengkapan



jalan lainnya telah memenuhi kebutuhan ideal pada ruas jalan kewenangan provinsi.

Peningkatan capaian indikator ini dipengaruhi oleh beberapa faktor keberhasilan, antara lain meningkatnya komitmen Pemerintah Provinsi dalam memperkuat infrastruktur keselamatan jalan melalui pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan secara bertahap serta optimalisasi perencanaan berbasis kebutuhan lapangan. Selain itu, koordinasi yang lebih intensif antara Dinas Perhubungan dengan instansi terkait seperti Kepolisian, Balai Pengelola Transportasi Darat, serta pemerintah kabupaten/kota turut mendukung penataan manajemen lalu lintas secara lebih terpadu. Upaya ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan keteraturan lalu lintas serta penurunan potensi risiko kecelakaan pada beberapa titik rawan.

Namun demikian, pemenuhan perlengkapan jalan hingga mencapai kondisi ideal masih menghadapi sejumlah tantangan. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi kecepatan pemenuhan kebutuhan perlengkapan jalan, mengingat jumlah ruas jalan yang membutuhkan penanganan masih cukup besar. Selain itu, kerusakan dan kehilangan perlengkapan jalan yang disebabkan oleh faktor cuaca, kecelakaan lalu lintas, maupun vandalisme masyarakat juga menjadi kendala yang mengakibatkan menurunnya fungsi perlengkapan jalan yang telah terpasang. Di sisi lain, pertumbuhan aktivitas lalu lintas serta perkembangan wilayah perkotaan dan pedesaan yang semakin pesat turut meningkatkan kebutuhan akan perlengkapan jalan yang lebih memadai.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Perhubungan terus melakukan berbagai langkah strategis, antara lain dengan melakukan pemetaan kebutuhan perlengkapan jalan secara lebih komprehensif berdasarkan tingkat kerawanan kecelakaan, volume lalu lintas, serta fungsi jalan. Selain itu, dilakukan peningkatan prioritas pengalokasian anggaran secara bertahap untuk pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan, penguatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan keselamatan jalan, serta peningkatan pengawasan terhadap keberadaan dan fungsi perlengkapan jalan di



lapangan. Upaya edukasi kepada masyarakat juga terus dilakukan guna meningkatkan kesadaran dalam menjaga fasilitas keselamatan lalu lintas.

Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan pemenuhan perlengkapan jalan terhadap kondisi ideal dapat terus meningkat secara bertahap, sehingga mampu mendukung terciptanya sistem transportasi darat yang lebih aman, tertib, dan berkelanjutan serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan transportasi dan keselamatan pengguna jalan di Provinsi Gorontalo.

e. Meningkatkan Kualitas Transportasi Darat dengan Indikator Kinerja Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan

Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) merupakan indikator strategis dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan transportasi darat, khususnya dalam memastikan bahwa operasional angkutan umum dilaksanakan sesuai dengan standar keselamatan yang ditetapkan. Implementasi sistem manajemen keselamatan menjadi instrumen penting dalam membangun budaya keselamatan transportasi, mengingat sektor transportasi darat masih memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap risiko kecelakaan lalu lintas yang dapat menimbulkan kerugian sosial maupun ekonomi.

Peningkatan jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi dipengaruhi oleh adanya komitmen pemerintah daerah dalam mendorong penerapan standar keselamatan transportasi melalui pembinaan, sosialisasi, serta pengawasan terhadap penyelenggara angkutan umum. Upaya tersebut secara bertahap mendorong perusahaan angkutan untuk meningkatkan tata kelola operasionalnya agar lebih profesional, terstruktur, dan berorientasi pada aspek keselamatan penumpang maupun pengguna jalan lainnya. Selain itu, koordinasi dengan instansi terkait dalam pengawasan operasional angkutan turut memperkuat upaya peningkatan kepatuhan terhadap standar keselamatan transportasi.

Namun demikian, implementasi sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan pada perusahaan angkutan umum masih menghadapi sejumlah



tantangan. Salah satu permasalahan utama adalah masih terbatasnya jumlah perusahaan angkutan yang memiliki kesiapan administratif, manajerial, serta sumber daya manusia yang memadai untuk memenuhi seluruh persyaratan sertifikasi. Kondisi ini terutama terjadi pada perusahaan angkutan dengan skala usaha yang relatif kecil, yang masih menghadapi keterbatasan kapasitas kelembagaan dan kemampuan finansial dalam melakukan penyesuaian terhadap standar operasional keselamatan yang dipersyaratkan. Di sisi lain, tingkat pemahaman sebagian pelaku usaha terhadap pentingnya penerapan sistem manajemen keselamatan sebagai bagian dari tata kelola perusahaan juga masih perlu ditingkatkan.

Apabila kondisi tersebut tidak ditangani secara sistematis, maka berpotensi menghambat upaya peningkatan kualitas transportasi darat serta memperbesar risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan umum. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang lebih terarah dalam memperkuat implementasi sistem manajemen keselamatan pada perusahaan angkutan.

Sebagai upaya perbaikan, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Perhubungan terus mendorong peningkatan jumlah perusahaan angkutan yang tersertifikasi melalui penguatan pembinaan dan pendampingan teknis kepada pelaku usaha transportasi, peningkatan sosialisasi terkait standar keselamatan transportasi, serta penguatan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap operasional angkutan umum. Selain itu, dilakukan pula upaya pemetaan terhadap perusahaan angkutan yang berpotensi untuk didorong mengikuti proses sertifikasi secara bertahap, sehingga implementasi sistem manajemen keselamatan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan penerapan sistem manajemen keselamatan pada perusahaan angkutan umum dapat terus meningkat, sehingga mampu memperkuat tata kelola keselamatan transportasi darat, meminimalkan risiko kecelakaan lalu lintas, serta meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum bagi masyarakat di Provinsi Gorontalo



f. Meningkatnya Kualitas Transportasi Laut dengan indikator kinerja Rasio Konektivitas Laut

Rasio konektivitas laut merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat keterhubungan wilayah melalui jaringan transportasi laut, khususnya dalam mendukung mobilitas penumpang, distribusi logistik, serta integrasi ekonomi antar wilayah. Bagi Provinsi Gorontalo yang memiliki wilayah pesisir dan posisi strategis dalam jaringan transportasi kawasan Sulawesi, konektivitas laut menjadi salah satu faktor kunci dalam memperkuat aksesibilitas wilayah serta meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa.

Capaian indikator rasio konektivitas laut dipengaruhi oleh keberadaan simpul transportasi laut berupa pelabuhan yang berfungsi sebagai titik pelayanan mobilitas masyarakat dan arus logistik. Selain itu, dukungan program pemerintah pusat melalui penyediaan layanan angkutan laut perintis dan jaringan pelayaran nasional turut berkontribusi dalam membuka akses transportasi ke wilayah yang memiliki keterbatasan konektivitas. Keberadaan layanan tersebut secara bertahap membantu memperkuat keterhubungan wilayah serta mendukung kelancaran distribusi logistik di Provinsi Gorontalo.

Namun demikian, upaya peningkatan konektivitas transportasi laut masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Salah satu permasalahan utama adalah masih terbatasnya frekuensi dan jaringan trayek pelayaran yang secara langsung menghubungkan Provinsi Gorontalo dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah lainnya. Kondisi ini menyebabkan mobilitas barang dan penumpang masih sangat bergantung pada jaringan pelayaran tertentu sehingga fleksibilitas distribusi logistik belum optimal. Selain itu, kapasitas dan fasilitas pendukung pada beberapa pelabuhan masih memerlukan peningkatan agar mampu menunjang aktivitas transportasi laut secara lebih efisien dan berkelanjutan.

Di sisi lain, penyelenggaraan transportasi laut sebagian besar merupakan kewenangan pemerintah pusat sehingga ruang intervensi pemerintah daerah dalam penyediaan layanan pelayaran relatif terbatas. Ketergantungan terhadap kebijakan dan program nasional ini menyebabkan upaya peningkatan konektivitas laut daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan pengembangan jaringan transportasi laut secara



nasional. Apabila kondisi ini tidak diantisipasi dengan strategi koordinasi yang kuat, maka berpotensi menghambat upaya peningkatan konektivitas wilayah serta berdampak pada tingginya biaya logistik daerah yang pada akhirnya dapat mempengaruhi daya saing ekonomi Provinsi Gorontalo.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Perhubungan terus melakukan langkah-langkah strategis antara lain dengan memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemerintah pusat dalam rangka mendorong peningkatan jaringan trayek pelayaran yang menghubungkan wilayah Gorontalo dengan daerah lainnya. Selain itu, dilakukan pula upaya pemetaan kebutuhan konektivitas transportasi laut yang berbasis pada potensi ekonomi wilayah serta kebutuhan mobilitas masyarakat. Pemerintah daerah juga terus mendorong penguatan peran pelabuhan sebagai simpul transportasi dan distribusi logistik melalui peningkatan perencanaan pengembangan fasilitas pendukung transportasi laut.

Melalui berbagai langkah strategis tersebut diharapkan rasio konektivitas transportasi laut di Provinsi Gorontalo dapat terus meningkat secara bertahap, sehingga mampu memperkuat keterhubungan antar wilayah, meningkatkan efisiensi distribusi logistik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata dan berkelanjutan.

g. Meningkatnya Kualitas Transportasi Laut dengan Indikator Rasio Konektivitas antar wilayah

Rasio konektivitas antar wilayah melalui transportasi laut merupakan indikator strategis yang menggambarkan tingkat keterhubungan wilayah dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta integrasi ekonomi antar daerah. Bagi Provinsi Gorontalo, transportasi laut memiliki peran penting dalam memperkuat aksesibilitas wilayah, terutama dalam menghubungkan daerah pesisir dengan pusat-pusat aktivitas ekonomi baik di dalam maupun di luar wilayah provinsi.

Capaian indikator rasio konektivitas antar wilayah dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain keberadaan pelabuhan yang berfungsi



sebagai simpul transportasi laut serta tersedianya layanan angkutan laut yang menghubungkan wilayah Provinsi Gorontalo dengan daerah lain. Selain itu, dukungan program pemerintah pusat dalam penyelenggaraan layanan transportasi laut seperti angkutan perintis dan jaringan pelayaran nasional turut memberikan kontribusi dalam membuka akses transportasi dan meningkatkan keterhubungan wilayah. Kondisi ini secara bertahap mendukung kelancaran mobilitas masyarakat serta distribusi barang yang menjadi faktor penting dalam mendorong aktivitas ekonomi daerah.

Upaya peningkatan konektivitas transportasi laut antar wilayah masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu permasalahan utama adalah masih terbatasnya frekuensi layanan dan jaringan trayek pelayaran yang secara langsung menghubungkan Provinsi Gorontalo dengan beberapa wilayah tujuan strategis. Kondisi tersebut menyebabkan akses transportasi laut belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan mobilitas masyarakat dan distribusi logistik secara optimal. Selain itu, kapasitas dan fasilitas pendukung pada beberapa pelabuhan masih perlu ditingkatkan untuk menunjang aktivitas transportasi laut secara lebih efisien. Penyelenggaraan transportasi laut yang sebagian besar berada di bawah kewenangan pemerintah pusat menyebabkan ruang intervensi pemerintah daerah dalam pengembangan jaringan layanan pelayaran relatif terbatas.

Apabila kondisi tersebut tidak diantisipasi secara optimal, maka berpotensi menghambat peningkatan konektivitas antar wilayah serta menurunkan efisiensi distribusi logistik yang pada akhirnya dapat mempengaruhi daya saing ekonomi daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat konektivitas transportasi laut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan transportasi secara berkelanjutan.

Sebagai upaya perbaikan, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Perhubungan terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemerintah pusat serta instansi terkait dalam rangka mendorong peningkatan jaringan trayek pelayaran yang menghubungkan wilayah Gorontalo dengan daerah lain. Selain itu, dilakukan pula pemetaan kebutuhan konektivitas transportasi laut berdasarkan potensi ekonomi wilayah dan kebutuhan mobilitas masyarakat, serta mendorong



peningkatan peran pelabuhan sebagai simpul distribusi logistik daerah. Pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan perencanaan pengembangan fasilitas pendukung transportasi laut guna menunjang kelancaran arus penumpang dan barang.

Melalui berbagai upaya tersebut diharapkan rasio konektivitas transportasi laut antar wilayah di Provinsi Gorontalo dapat terus meningkat secara bertahap, sehingga mampu memperkuat keterhubungan wilayah, meningkatkan efisiensi distribusi logistik, serta mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan daerah.

h. Meningkatkan Kualitas Transportasi Laut dengan Indikator Persentase Pelayanan Jasa terkait Angkutan di perairan

Persentase pelayanan jasa terkait angkutan di perairan merupakan indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan transportasi laut, khususnya dalam memastikan bahwa kegiatan angkutan di perairan dilaksanakan secara tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indikator ini mencerminkan tingkat pelayanan pemerintah dalam mendukung kelancaran aktivitas transportasi laut melalui penyediaan layanan administrasi, pengawasan operasional, serta pembinaan terhadap pelaku usaha jasa angkutan di perairan.

Capaian indikator ini dipengaruhi oleh meningkatnya upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan terhadap penyelenggara jasa angkutan di perairan. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait serta peningkatan pelayanan administrasi perizinan dan operasional turut mendorong tertibnya penyelenggaraan kegiatan angkutan di perairan. Selain itu, adanya peningkatan kesadaran pelaku usaha transportasi terhadap pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan operasional dan standar keselamatan juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan jasa transportasi laut.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi pelayanan jasa terkait angkutan di perairan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana pendukung pelayanan transportasi laut serta keterbatasan kapasitas



sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan secara optimal. Selain itu, masih terdapat pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami atau mematuhi ketentuan operasional angkutan di perairan, sehingga memerlukan pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi kualitas pelayanan transportasi laut apabila tidak ditangani secara sistematis.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Perhubungan terus melakukan langkah-langkah strategis antara lain dengan meningkatkan pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku usaha jasa angkutan di perairan terkait pemenuhan standar pelayanan dan keselamatan transportasi laut. Selain itu, dilakukan penguatan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kegiatan angkutan di perairan serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepada pelaku usaha transportasi laut. Pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia guna mendukung penyelenggaraan pelayanan transportasi laut yang lebih optimal.

Melalui berbagai upaya tersebut diharapkan persentase pelayanan jasa terkait angkutan di perairan dapat terus meningkat secara bertahap, sehingga mampu mendukung terciptanya penyelenggaraan transportasi laut yang lebih tertib, aman, dan efisien serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan pelaku usaha di Provinsi Gorontalo.

7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pada tahun 2025 Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo menganggarkan belanja langsung APBD maupun APBD-P sebesar **Rp. 26.974.432.353,-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 22.334.525.713,-** atau sebesar **81.82 %**. Dari pagu tahun 2025 sebesar **Rp. 26.974.432.353,-** yang terdapat efisiensi anggaran sebesar **Rp. 4.639.906.640,- (18.18%)** berikut rinciannya :



Analisis efisiensi ditampilkan pada tabel berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya Pengembangan Wilayah dan Konektivitas Perkotaan dan Pedesaan	Proporsi kontribusi PDRB Provinsi Gorontalo terhadap Nasional	%	0,25	0,25	100 %			
	Dana APBD						26.974.432.353	22.334.525.713	81.82

No	Sasaran	Indikator Kinerja		(Capaian Kinerja) = 100%)	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7
	Terwujudnya Pengembangan Wilayah dan Konektivitas Perkotaan dan Pedesaan	Proporsi kontribusi PDRB Provinsi Gorontalo terhadap Nasional	%	100%	81.82%	18.18 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	Efisiensi Anggaran	Persentase
1	Meningkatnya Kualitas Transportasi Darat	Konektivitas Darat	20.478.482.553	19.854.066.884	624.415.669	99.96
		Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Provinsi	2.284.592.800	2.270.087.997	14.504.803	99.37
		Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan	139.119.000	138.246.475	872.525	99.75
2	Meningkatnya Kualitas Transportasi Laut	Rasio Konektivitas Laut	4.072.238.000	72.124.357	4.000.113.653	1.77



		Rasio Konektivitas Antar Wilayah				
		Persentase Pelayanan Jasa terkait Angkutan di Perairan				
	TOTAL		26.974.432.353	22.334.525.713	4.639.906.640	81.82

Untuk upaya efisiensi penggunaan sumberdaya manusia telah dilaksanakan secara efektif sehingga kegiatan-kegiatan yang sudah disusun sebelumnya tidak terlaksana secara optimal hal ini terlihat bahwa dengan anggaran yang tersedia kegiatan maksimal dapat di selesaikan dengan target yang telah ditetapkan dan dukungan SDM yang tersedia, serta dengan adanya koordinasi dan sinergitas lintas sektor antara Kementerian Perhubungan, UPT Lingkup Perhubungan dan Dishub Kab/Kota maka capaian Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi bisa berhasil 100%.

8. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2025 dengan sasaran program yang mendukung sasaran strategis Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Transportasi Darat dengan indikator kinerja Rasio Konektivitas Darat didukung oleh program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) dan tingkat keberhasilan yang dapat didapatkan Sebagai Simpul Transportasi dalam hal penataan lalu lintas dan kenyamanan penumpang dan terhubungnya daerah daerah terpencil dan sentra-sentra produksi, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui Kemudahan Aksesibilitas Layanan Transportasi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui Kemudahan Aksesibilitas Layanan Transportasi antar Kabupaten/Kota di



Provinsi Gorontalo, dan Mendorong tumbuhnya Kawasan Ekonomi Wilayah (Pasar, UMKM, dan Sentra – Sentra Ekonomi).

2. Meningkatnya Kualitas Transportasi Darat dengan indikator kinerja indikator kinerja Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang pada kondisi ideal didukung oleh Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi dan sub kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi dan kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi sub kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. Indikator kinerja Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal digunakan untuk mengukur sejauh mana ketersediaan dan pemasangan perlengkapan jalan telah memenuhi kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan kondisi ideal pada jaringan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Perlengkapan jalan tersebut meliputi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, pagar pengaman jalan, serta fasilitas keselamatan lainnya yang berfungsi untuk meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan keselamatan lalu lintas dan tingkat keberhasilan yang dapat didapatkan Mendorong pertumbuhan ekonomi, Meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas yang berpotensi menimbulkan kemiskinan baru bagi keluarga korban kecelakaan.
3. Meningkatnya Kualitas transportasi Darat dengan indikator kinerja Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan. keberhasilan sertifikasi kedua perusahaan angkutan umum tersebut juga mencerminkan peran aktif Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Perhubungan dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi terhadap penyelenggara angkutan umum agar dapat memenuhi standar keselamatan transportasi. Melalui penerapan Sistem Manajemen Keselamatan ini diharapkan kualitas pelayanan transportasi darat semakin meningkat, sehingga dapat mendukung terwujudnya sistem transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan di Provinsi Gorontalo yang didukung oleh Program Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan sub kegiatan



Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi.

4. Meningkatnya kualitas transportasi laut dengan indikator sasaran rasio konektivitas laut didukung oleh program program Pengelolaan Pelayaran dengan kegiatan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Bongkar Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa, Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Lautatau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas. Dukungan tersebut dilakukan melalui upaya penguatan konektivitas transportasi antar wilayah, khususnya dalam mengintegrasikan moda transportasi darat dengan moda transportasi laut dan udara. Integrasi konektivitas tersebut diharapkan dapat memperlancar mobilitas penumpang serta distribusi barang dari dan menuju pelabuhan maupun bandar udara yang ada di Provinsi Gorontalo. Dengan adanya konektivitas yang baik antar moda transportasi, diharapkan aktivitas pelayanan transportasi di pelabuhan dan bandara dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat di Provinsi Gorontalo.
5. Meningkatnya kualitas transportasi laut dengan indikator sasaran Rasio Konektivitas antar wilayah tingkat keberhasilannya menunjukkan bahwa tingkat konektivitas wilayah melalui jaringan transportasi laut di Provinsi Gorontalo terus mengalami peningkatan. Hal ini mencerminkan adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memperkuat aksesibilitas wilayah serta mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi barang melalui transportasi laut.
6. Meningkatnya kualitas transportasi laut dengan indikator sasaran Persentase pelayanan Jasa terkait angkutan di perairan tingkat keberhasilannya menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan transportasi laut di Provinsi Gorontalo telah berjalan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pencapaian indikator ini mencerminkan bahwa pelayanan administrasi, pembinaan, serta



pengawasan terhadap kegiatan angkutan di perairan telah dilaksanakan secara optimal sehingga mampu mendukung kelancaran operasional transportasi laut. Tingkat keberhasilan ini dipengaruhi oleh meningkatnya upaya pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan dalam memberikan pelayanan kepada pelaku usaha jasa angkutan di perairan, baik dalam bentuk pelayanan administrasi, fasilitasi operasional, maupun pengawasan terhadap kegiatan angkutan di perairan. Selain itu, koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan transportasi laut turut mendukung terciptanya pelayanan transportasi yang lebih tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing memberikan kontribusi/dukungan terhadap pencapaian kinerja sasaran Tahun 2025.

9. Realisasi Anggaran

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil. Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo dengan anggaran **Rp. 26.974.432.353,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 22.334.525.713,-** atau sebesar **81.82%**. Terdapat kegiatan pembebasan lahan Bandara Djalaluddin sebesar Rp. 4.000.000.000 yang tidak dapat dilaksanakan karena ketidaksesuaian nomenklatur dan dianggarkan kembali pada tahun 2026.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2025 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.15 Anggaran dan realisasi belanja tahun 2025**

Realisasi belanja tahun 2025 ditampilkan pada tabel berikut :

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2025 (Rp)	REALISASI TAHUN 2025		
			ANGGARAN	KEUANGAN	FISIK
			(Rp)	(%)	(%)
1.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8,521,690,553.00	8,016,535,438.00	94.07	100.00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	345,759,000	340,569,260	98.50	100.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,927,983,478	6,482,323,725	93.57	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	77,145,000	77,124,500	99.97	100.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	84,010,000	69,800,153	83.09	100.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	611,419,575	609,415,210	99.67	100.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	475,373,500	437,302,590	91.99	100.00
	2.	PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	14,380,503,800.00	14,245,865,918.00	99.06
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi					
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		1,103,780,000	1,093,691,547	99.09	100.00
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B					
Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang		10,500,000,000	10,484,883,453	99.86	100.00
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi		539,075,000	536,586,270	99.54	100.00
Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		641,737,800	639,810,180	99.70	100.00
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					



	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	139,119,000	138,246,475	99.37	100.00
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1,436,792,000	1,332,647,993	92.75	100.00
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi				
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	20,000,000	20,000,000	100.00	100.00
	PENGELOLAAN PELAYARAN	4,072,238,000.00	72,124,357.00	1.77	2.77
3	Penerbitan Izin Usaha Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut, atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut, atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas	4,072,238,000	72,124,357	1.77	2.77
TOTAL		26,974,432,353.00	22,334,525,713.00	81.82	85.34



10. Penghargaan yang diterima

Pada tahun 2025 Penghargaan / Prestasi yang telah didapatkan selama tahun 2025 sebagai berikut :

1. Terbaik 2 dalam kategori Penataan ruang kantor pada peringatan 17 Agustus tahun 2025, yang dinilai mampu menciptakan lingkungan kerja yang tertib, rapi, bersih, serta mendukung peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Penghargaan ini menjadi bukti komitmen dalam mewujudkan tata kelola perkantoran yang efektif, nyaman, dan professional.



2. Penghargaan Inovasi SAHABAT ON-SIGHT Antar Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo masuk tiga besar Inovator terbaik daerah. Program SAHABAT ON-SIGHT mempersingkat proses pelayanan administrasi dan verifikasi kendaraan angkutan jalan yang sebelumnya membutuhkan waktu lama, menjadi dapat diselesaikan hanya dalam satu hari. Pendekatan tersebut dinilai mampu meningkatkan efisiensi layanan, memperpendek alur birokrasi dan memberikan kepastian waktu kepada pelaku angkutan agar pelayanan lebih responsif





3. Terbaik 2 dalam Akuntabilitas kinerja tahun 2024 yang diberikan pada tahun 2025. sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan keberhasilan dalam menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja yang transparan, terukur, serta berorientasi pada pencapaian hasil yang optimal.





Bab IV

Penutup

Secara umum, Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo telah berupaya merealisasikan program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kinerja Tahun 2025 untuk tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo dan khususnya yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Hasil capaian tersebut dapat terwujud berkat dukungan dan kerjasama semua pihak baik seluruh aparat/staf Perhubungan Provinsi Gorontalo, instansi pemerintah, *stakeholder* terkait maupun masyarakat pengguna. Hasil tersebut juga menunjukkan komitmen Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo yang tinggi untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Agar capaian kinerja yang telah diperoleh Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo ke depannya dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan, maka beberapa hal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Terdapat 6 Terminal Tipe B yang berada di Kab/Kota yang merupakan kewenangan Provinsi namun sampai tahun 2025 baru 1 Terminal Tipe B yang diserahkan ke Pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu Terminal Tipe B Limboto Kab Gorontalo.
- b. Terdapat wilayah/daerah yang terisolir, sentra-sentra produksi dan objek wisata unggulan yang terlayani oleh angkutan umum dan belum masih kurangnya angkutan massal di perkotaan sehingga memerlukan adanya layanan angkutan yang lebih memadai.
- c. Terdapat beberapa sekolah SMA/SMK yang belum/tidak dilayanani angkutan umum.
- d. Minimnya sarana penunjang pelaksanaan pengawasan angkutan jalan.
- e. Masih minimnya layanan digitalisasi perizinan dan pengawasan angkutan umum.



- f. Terdapat beberapa ruas jalan Provinsi yang belum terpasang fasilitas keselamatan LLAJ.
- g. Belum optimalnya layanan sistem ATCS pada simpang bersinyal.
- h. Belum optimalnya sistem pelaporan aktivitas/produktivitas dari masing-masing UPT Kementerian Perhubungan RI kepada Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah.
- i. Belum optimalnya layanan sistem pelaporan aktifitas Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan sesuai kewenangan Gubernur yang beraktifitas di Pelabuhan.
- j. Di kawasan Timur Indonesia (Pulau Sulawesi) embarkasi haji hanya berada di Makassar sehingga mengalami penumpukan layanan haji yang berpusat di Makassar Sulawesi Selatan Terdapat beberapa badan usaha yang beraktifitas di Pelabuhan yang belum memiliki izin.